

p-ISSN 2089-0338  
e-ISSN 2502-7921

Vol. 11 No. 01 (2021)

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Sosial RI

Vol 11, No. 01 (2021)

# SOSIO KONSEPSIA

**Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020).

**Alamat :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Gd. Cawang Kencana Lt. 2 Gd. Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Rt.07 Rw. 07 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630

Surat elektronik: [puslitbangkesos@kemsos.go.id](mailto:puslitbangkesos@kemsos.go.id)

Laman: <http://puslit.kemsos.go.id>

e-mail : [sosiokonsepsia@gmail.com](mailto:sosiokonsepsia@gmail.com)

e-journal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

## *Editorial Team*

---

### **Pembina**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

### **Penanggungjawab**

Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

### **Manajer Jurnal**

*Nyi R Irmayani, SH, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

### **Pimpinan Editor**

*Dr. Hari Harjanto Setiawan*, (Scopus ID; 57225011816) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Editor Bagian**

*Drs. Setyo Sumarno, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Drs. B. Mujiyadi, M.SW*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Drs. Muhtar, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Ita Konita, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

*Sugiyanto, S.Pd, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Badrun Susantyo, Ph.D*, (Scopus ID; 57223215291) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Lasarus Jehamat, S.Sos, MA*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Nyi R Irmayani, SH, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Habibullah, S.Sos. M.Kesos*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Layout Editor**

*Delfirman, S.Sos*, (Scopus ID; 57223247709) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Proofreader**

*Mery Ganti, S.Sos. M.Kesos*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Prof. Adi Fahrudin, Ph.D*, (Scopus ID; 35261484600), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

*Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D*, (Scopus ID; 57210976685), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Prof. Irwanto, Ph.D*, (Scopus ID; 7409586829), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

*Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc*, (Scopus ID; 25823852000), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Agus Fanar Syukri, Ph.D*, (Scopus ID; 56516912500), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia.

*Binahayati Rusyidi, Ph.D*, (Scopus ID; 55778489900), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

*Dr. Bambang Rudito*, (Scopus ID; 36632972600), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

*Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D*, (Scopus ID; 57209449684), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Dr. Santoso Tri Raharjo*, (Scopus ID; 56051579300), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

*Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D*, (Scopus ID; 57210163446), Program Studi Bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Tauhid Komara Yudhai, S.Sos. M.PD*, (Scopus ID; 57201631933), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia



## Daftar isi

---

<b>Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang</b> <i>Oman Sukmana</i>	291- 306
<b>Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar</b> <i>Muhammad Alwi dan Marwati Sulni</i>	306- 318
<b>Strategi Adaptasi Ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada Masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kalimantan Barat</b> <i>Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya, Jagad Aditya Dewantara</i>	319- 334
<b>Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta</b> <i>Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi</i>	335- 348
<b>Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah</b> <i>Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto</i>	349- 361
<b>Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan</b> <i>Haffuaddi, Ety Rahayu</i>	362 - 382
<b>Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: <i>Asset-Based Community Development Perspective</i></b> <i>Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso</i>	383 - 397



## *Pengantar Redaksi*

---

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 11, No. 01, September – Desember 2021 menyoroti tentang pemberdayaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Tulisan Oman Sukmana tentang “Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulus, Malang”. Menyatakan Hasil penelitian bahwa Lingkungan sosial merupakan modal sosial; Lingkungan harus dikelola dengan baik untuk kemanfaatan masyarakat; Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial yang harus diselaraskan. Lingkungan Kampung Wolulus memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi”. Peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi: Inisiator, Motivator, Koordinator, Planner, Fasilitator, dan Komunikator. Dari hasil penelitian ini disarankan agar peran aktor pemberdaya lebih ditingkatkan; Perlu keterlibatan pemerintah dalam pelatihan peningkatan kemampuan aktor pemberdaya; Perlu kerjasama dan partisipasi dari masyarakat.

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni meneliti tentang “Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menghantam sektor perekonomian yang berimplikasi pada pendapatan dan daya beli masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah melalui Program Keluarga Harapan memberikan bantuan sosial agar masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang terimplementasi dengan baik di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam implementasi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dimasa pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar mengalami banyak skema perubahan penyesuaian bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, harapan besar pemerintah melalui bantuan sosial, masyarakat kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi Covid-19, tidak hanya kemudian bersifat konsumtif dan bergantung pada bantuan pemerintah.

Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya dan Jagad Aditya Dewantara meneliti tentang “Strategi Adaptasi Ekonomi Pengerajin dan Tukang Ojek pada masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi”. Penelitian ini bertujuan menemukan praktik baik yakni strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan oleh pengrajin dan tukang ojek di perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 5 pengrajin dan 3 tukang ojek dan pengamatan langsung, ditemukan empat strategi adaptasi ekonomi yakni (1) Beralih ke Produk dalam Negeri (2) Menciptakan Alternatif Hidup Hemat, dan (3) Beralih Pekerjaan Lain. Strategi ini tampak dalam dua bentuk yakni adaptasi material dan adaptasi nonmaterial. Adaptasi material yakni perubahan konsumsi produk, yang kini telah beralih pada produk-produk dalam negeri, sementara adaptasi nonmaterial yakni pengetahuan ekonomi, keterampilan dan jaringan sosio-kultural. Kajian ini relevan pada pengembangan ekonomi berbasis komunitas untuk ketahanan ekonomi masyarakat pada masa penutupan perbatasan.

Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, dan Muhammad Hendri Nuryadi meneliti tentang “Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui lima tahap yakni pendekatan awal melalui upaya turun ke jalan mencari ODGJ, asesmen melalui identifikasi gejala objektif, persiapan intervensi melalui pemisahan ODGJ yang kooperatif dengan yang nonkooperatif, intervensi melalui pemenuhan kebutuhan dasar; sandang; shelter; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik; bimbingan mental spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan sehari-hari; fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta resosialisasi melalui pemulangan ODGJ yang sudah ditemukan atau mengingat keluarganya. Hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial berupa terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan bagi ODGJ telantar yang baru saja bergabung ke program. Selain itu kondisi shelter ODGJ perempuan kurang memadai karena akses cahaya matahari yang kurang.

Yessilia Osira dan Bayu Risdiyanto meneliti tentang “Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perawatan lansia, baik yang di dalam institusi maupun di rumah, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perawatan di dalam institusi dirasakan lebih sistematis dan komprehensif melalui berbagai aktifitas fisik, mental, sosial dan spiritual, dibandingkan dengan perawatan lansia di rumah. Meskipun demikian, perawatan lansia di rumah, ternyata lebih membuat nyaman karena kedekatannya dengan keluarga, dibandingkan bila dirawat di dalam institusi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan adanya kolaborasi aktifitas antara perawatan lansia di dalam institusi dengan perawatan di rumah, sehingga tujuan perawatan lansia dapat tercapai secara optimal. Bentuk layanan yang direkomendasikan adalah pembentukan Paguyuban Keluarga Lansia dan pelaksanaan layanan Day Care di Institusi yang bisa diakses bukan saja oleh lansia di institusi, namun juga lansia di rumah.

Haffuaddi dan Ety Rahayu meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Layanan dan Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako berbeda secara signifikan di area perkotaan dan di area pedesaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan KPM Program Sembako. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan segregasi wilayah pada Program Sembako dan menjadikan kualitas layanan sebagai fokus dari program. Hasil penelitian juga merekomendasikan peningkatan kualitas layanan Program Sembako, terutama terkait jenis produk, kualitas produk, dan kuantitas produk di e-warong.

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo dan Meilanny Budiarti Santoso meneliti tentang “Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective”. Penelitian menemukan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat menunjang kehidupan berkelanjutan warga desa dan mencapai kesejahteraan sosialnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas BUMDES agar dapat menarik bagi masyarakat dan terbangun kepercayaan dari masyarakat kepada BUMDES Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.

Jakarta, Desember 2021  
Redaksi

# Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang

Oman Sukmana<sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

\* Korespondensi: [oman@umm.ac.id](mailto:oman@umm.ac.id) ; Tel: +62 82244333075

Diterima : 14 Oktober 2020; Direvisi: 11 Desember 2021; Disetujui : 31 Januari 2022

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas, Malang. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni aktor pemberdaya yang meliputi: Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Tokoh masyarakat, Ketua Rukun Warga, dan Pengurus Karang Taruna —di lingkungan Rukun Warga 18. Teknik pengumpulan data: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Lingkungan sosial merupakan modal sosial; Lingkungan harus dikelola dengan baik untuk kemanfaatan masyarakat; Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial yang harus diselaraskan. Lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi”. Peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi: Inisiator, Motivator, Koordinator, *Planner*, Fasilitator, dan Komunikator. Dari hasil penelitian ini disarankan agar peran aktor pemberdaya lebih ditingkatkan; Perlu keterlibatan pemerintah dalam pelatihan peningkatan kemampuan aktor pemberdaya; Perlu kerjasama dan partisipasi dari masyarakat.

**Kata kunci:** Literasi Lingkungan; Aktor Pemberdayaan; Pemberdayaan Masyarakat.

**Abstract:** This research aims to identification of the literacy of empowering actors about the social environment and the role of empowering actors in the community-based community empowerment process, in Wolulas Village, Malang. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The research subjects were determined purposively, namely empowering actors which included: manager of family welfare, community leaders, and youth organizations, in citizen organizations 18. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques: process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusion of the research is a description of actor's literacy about the social environment in the process of community empowerment in Wolulas Village which includes the social environment as social capital, the environment must be managed properly for the benefit of the community, the environment consists of the physical and social environment that must be harmonized; and the environment of Kampung Wolulas has the potential to be developed as a “Tourism and Education Village”.. Meanwhile, the roles of actors in the community empowerment process include: Initiator, Motivator, Coordinator, Planner, Facilitator, and Communicator. Furthermore, suggestions and recommendations: in order to increase the role of empowering actors, it is necessary to involve the government in training to increase the capacity of empowering actors, and need for cooperation and participation from the community.

**Keywords:** : Environment Literacy; Empowerment Actors; Community Empowerment.

## 1. Pendahuluan

Salah satu problem sosial di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas merupakan proses yang tepat dalam upaya mengurangi masyarakat miskin. Oleh karena itu maka model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas perlu dikembangkan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling mendasar, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Masyarakat yang dikategorikan miskin karena pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Jayaputra, 2015). Upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pembangunan, khususnya pembangunan berbasis masyarakat.

Konsep yang dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan, konsep literasi lingkungan dan konsep peran aktor pemberdaya. **Pertama**, konsep pemberdayaan. Mengacu kepada pandangan Theresia, dkk., (2014), secara sederhana pengertian konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah merupakan suatu proses pembangunan yang memanfaatkan semua potensi sumberdaya, baik alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai social budaya, dan lain sebagainya, yang direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berbasis masyarakat semestinya suatu proses pembangunan yang berangkat dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan suatu pembangunan yang direncanakan dan diatur oleh "pihak lain" atau oleh elit masyarakat. Suatu pembangunan yang berbasis masyarakat mengandung makna bahwa pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, modal sosial lokal, budaya local, kearifan lokal, dan modal spiritual yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradig baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Menurut pandangan Soleh (2014) tujuan dari pemberdayaan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bertumpu kepada kekuatan atau daya yang mereka miliki sendiri, melalui optimalisasi daya dan peningkatan posisi tawar yang dimiliki masyarakat sendiri. Pemahaman hal tersebut memiliki arti bahwa proses pemberdayaan harus memposisikan kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat sebagai asset utama, sedangkan pihak luar seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lain yang berkepentingan dipandang sebagai modal pelengkap. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran actor pemberdaya sangat penting. Sementara menurut Theresia, dkk. (2014), konsep pemberdayaan masyarakat mengacu kepada dua pengertian, yakni pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam rangka melepaskan diri dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konteks lain suatu pemberdayaan adalah suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan orang-orang agar: (1) memiliki akses atas sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Pandangan Zimmerman (2000), proses pemberdayaan dapat dianalisis dalam tiga level, yakni: level individu (*individual*), level organisasi (*organizational*), dan level masyarakat (*community*). Pada level individu, proses pemberdayaan diarahkan kepada aspek: proses belajar dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan (*decision making skills*), kemampuan pengelolaan sumberdaya (*managing resources*), dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain (*working with others*). Pada level organisasi, proses pemberdayaan diarahkan kepada aspek: meningkatkan peluang partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Opportunities to participate in decision-making*), berbagi tanggung jawab (*shared responsibilities*), dan berbagi kepemimpinan (*shared leaderships*). Sedangkan pada level masyarakat (*community*), proses pemberdayaan diarahkan kepada tiga aspek, yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses terhadap sumberdaya (*acces to resources*), terbukanya struktur pemerintahan (*open government structure*), dan toleransi terhadap keberagaman (*tolerance for diversity*).

Selanjutnya, pemberdayaan juga bisa dimaknai sebagai usaha pengembangan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, marjinal, dan terpinggirkan untuk mengemukakan pandangan, pendapat, dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya. Dalam pandangan tersebut, pemberdayaan memiliki pengertian sebagai perbaikan kualitas kehidupan atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: (1) perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; (2) perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); (3) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; (4) terjaminnya keamanan; dan (5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran (Theresia, 2014).

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), pada saat permulaan gerakan modern, tujuan dari konsep pemberdayaan adalah untuk mencari pilihan berbagai alternative baru dalam proses pembangunan masyarakat. Pada dasarnya, proses pemberdayaan dapat diasumsikan sebagai suatu proses *depowerment* dari sistem kekuasaan yang cenderung mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini memiliki kesamaan dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala model kekuasaan yang berujung hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Begitu juga aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menentang industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas apa mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri. Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan (Amalia dan Syawie, 2015: 186).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dengan demikian pemberdayaan yang dikaitkan dengan kemiskinan dapat disebutkan sebagai upaya untuk merubah keadaan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat miskin dengan mendayagunakan atau menguatkan potensi yang dimiliki individu dan potensi sumber daya lainnya yang terdapat di sekitar lingkungannya. Menurut Mubarak (Sabarisman, 2017) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai proses untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas agar memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Sehingga dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, yang mengharuskan masyarakat berperan aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Perspektif disiplin pekerjaan social (*social work*) kajian tentang pemberdayaan masyarakat termasuk kedalam seting praktik makro (*social work macro practice*). Menurut Netting, Kettner, McMurry, dan Thomas (2017) praktik makro pekerjaan social dimaksudkan sebagai intervensi yang dipandu secara profesional yang dirancang untuk menghasilkan perubahan dalam arena organisasi, komunitas, dan/atau kebijakan. Menurut Kirst-Ashman (2010) terdapat tiga metode utama dalam praktik makro pekerjaan social, yakni: aksi social (*social action*), perencanaan social (*social planning*), dan pemberdayaan komunitas local (*locality community development/empowerment*).

**Kedua**, konsep literasi lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum pengertian Lingkungan hidup, Pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, dan Daya dukung lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup; Selanjutnya Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan Daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Sukmana, 2003).

Literasi memiliki arti, yaitu kesanggupan atau kemampuan membaca dan menulis (Melani, 2016). Menurut Gumperz (2006) *literacy* adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menafsirkan teks tertulis. Secara umum literasi mengacu kepada kemampuan membaca dan menulis secara efektif dalam berbagai konteks. Namun pada abad ke-21 dewasa ini, konsep literasi maknanya mencerminkan kemampuan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola dan mengkomunikasikan informasi (Pilgrim & Martinez, 2017).

Konteks lingkungan, literasi lingkungan berarti kemampuan individu dalam memahami lingkungan. Literasi lingkungan adalah pengetahuan tentang mekanisme kerja lingkungan alami dan peran manusia untuk melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Hubungan yang sangat dinamis antara manusia dan lingkungannya, dapat dilihat dari bagaimana manusia hidup bersama, berdampingan dengan semua komponen di sekitarnya. Suatu perilaku dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan ketika tindakan individu atau kelompok mengadvokasi pemanfaatan sumber daya lingkungan yang memperhatikan aspek berkelanjutan (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017).

Dalam memahami pembentuk perilaku ramah lingkungan bisa merunut kepada perspektif teori perilaku berencana (*theory of planned behavior*) (Ajzen, 1991). Menurut *theory of planned behavior*, suatu perilaku (*behavior*) muncul karena adanya tujuan (*intention*), dimana *intention* ini akan ditentukan oleh adanya sikap seseorang atas perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pemahaman kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Oleh karena itu terbentuknya perilaku ramah lingkungan pada seseorang akan ditentukan oleh sikap perilaku, norma subjektif, dan pemahaman kontrol atas perilaku akan mempengaruhi tujuan (minat), dan selanjutnya akan membentuk perilaku yang positif terhadap lingkungan.

Literasi lingkungan salah satunya dapat diukur dengan menggunakan instrumen literasi lingkungan menurut Hesham dan NEP (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017), yang meliputi 3 dimensi yakni: pengetahuan lingkungan, sikap, dan kepedulian terhadap lingkungan.

**Tabel 1:** Aspek Literasi Lingkungan

No.	Dimensi	Aspek
1.	Pengetahuan (knowledge) (McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013) (NAAEE, 2011) (Ramdasa & Mohameda, 2014)	a. Pengetahuan ekologis b. Pengetahuan politik Sosio c. Pengetahuan tentang Masalah Lingkungan
2.	Sikap (attitude) (Dunlap, Liere, Mertig, & Jones, 2000) (Erdogan & Marcinkowski, 2015) (Ajzen I., 2001)	a. Kepekaan lingkungan: (1) Sikap ramah dan perhatian terhadap lingkungan. (2) Berpartisipasi aktif dalam mengarahkan penyelesaian dan pemecahan masalah lingkungan.

Oman Sukmana

Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulus, Malang

- (3) Menerapkan sikap perhatian dalam gaya hidup sehari-hari.
    - (4) Mengimplementasi regulasi lingkungan.
  - b. Motivasi dan niat untuk berperan serta secara aktif dalam perlindungan dan peningkatan lingkungan:
    - (1) berpartisipasi aktif terhadap peningkatan dan perlindungan lingkungan.
    - (2) kepercayaan untuk membuat keputusan dan menilai masalah lingkungan
      - a. Respon terhadap masalah lingkungan:
        - (1) menggambarkan dan menyajikan fakta tentang masalah lingkungan.
        - (2) menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap masalah lingkungan.
        - (3) Mampu membedakan jenis-jenis masalah lingkungan

---

Sumber: Meilinda, Prayitno, & Karyanto. 2017.

**Ketiga**, konsep tentang aktor pemberdaya. Secara umum istilah aktor mengacu kepada dua hal, yakni: (1) pria yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film; dan (2) orang yang berperan dalam suatu kejadian penting. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aktor berarti orang yang berperan dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat atau sering disebut juga agen perubahan masyarakat. Mengacu kepada pandangan Lunenburg (2010), agen perubahan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam merangsang, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan suatu tujuan perubahan (*"is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort"*). Selanjutnya Lunenburg menyatakan bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya perubahan.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, agen perubahan (*change agent system*) adalah seorang individu yang melakukan inisiatif dalam proses perubahan makro (macro change process), yakni perubahan pada lembaga/organisasi atau sistem komunitas (Kirst-Ashman & Hull, 2006). Selanjutnya disebutkan bahwa peran dari agen perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) *Enabler* (pemungkin), (2) *Mediator*, (3) *Coordinator*, (4) *General Manager*, (5) *Educator*, (6) *Evaluator*, (7) *Broker*, (8) *Facilitator*, (9) *Initiator*, (10) *Negotiator*, (11) *Mobilizer*, dan (12) *Advocate*. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, aktor pemberdayaan disebut juga sebagai kader pemberdayaan. Menurut Ghazali (2015) dalam perspektif organisasi, konsep "kader" mengacu kepada orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen serta dedikasi yang kuat untuk menggerakkan organisasi dalam mewujudkan visi misinya. Sementara dalam perspektif desa, muncul istilah "kader desa", yakni orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa untuk bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. "kader desa" adalah mereka yang berperan aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kader-kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya baik sebagai kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar,

mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak. Kader desa mengemban amanat untuk melakukan pengorganisasian pembangunan desa bidang (1) infrastruktur, (2) sarana dan prasarana kesehatan, (3) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, (4) sarana dan prasarana ekonomi, dan (5) lingkungan hidup.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan RW 18, Kelurahan Turen, Kabupaten Malang, melalui program pengelolaan lingkungan yang diberi nama Kampung Wolulas sebagai Kampung Wisata dan Edukasi. Program Kampung Wolulas sebagai Kampung Wisata dan Edukasi berbasis potensi modal sosial dan modal lingkungan lokal yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada masyarakat Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan: Bagaimanakah literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas?; dan Bagaimana peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas?. Berdasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang bentuk literasi aktor tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam program pemberdayaan berbasis komunitas di Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif (Denzim dan Lincoln, 2009). Penelitian ini dilakukan di Kampung Wolulas, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Penentuan informan penelitian secara *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008:204; Neuman, 2007), dimana teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi ketika seorang pakar (peneliti) menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka informan dalam penelitian ini adalah: Ketua RW 18, Ketua dan anggota PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat di wilayah Kampung Wolulas.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Nopember 2019, dimulai dari proses penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan (luaran) penelitian. Dalam proses pengumpulan data, digunakan tiga teknik yang saling melengkapi, yakni: wawancara, pengamatan, dan dokumentation. Oleh karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka untuk menganalisisnya digunakan pendekatan interpretif (*interpretive approach*) (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan suatu proses atau prosedur (Helaluddin & Wijaya, 2019). Tahapan proses atau prosedur analisa data dalam penelitian ini mengacu kepada pandangan Babbie (2008), yang meliputi: (1) Proses *Coding*, yaitu proses melakukan klasifikasi dan kategorisasi data, yang meliputi: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Menurut Kalof, Dan, dan Dietz (2008), *coding* adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data, yakni melakukan pemetaan data ke dalam seperangkat kategori-kategori dimana peneliti akan menjadikannya sebagai teks kesimpulan dan pernyataan teoritik; (2) Proses *Memoing*, yaitu proses menulis memo atau catatan untuk diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam proyek (*writing memos or notes to yourself and others involved in the project*). Strauss dan Corbin (Babbie, 2008) menyatakan bahwa proses *memoing* meliputi tiga jenis, yakni: *Code Notes*, *Theoretical Notes*, dan *Operational Notes*; dan (3) Proses *Concept Mapping*, yaitu proses pemetaan relasi antar berbagai konsep. Pemetaan ini bisa berupa: alur, diagram, tabel, grafik, dan sebagainya.

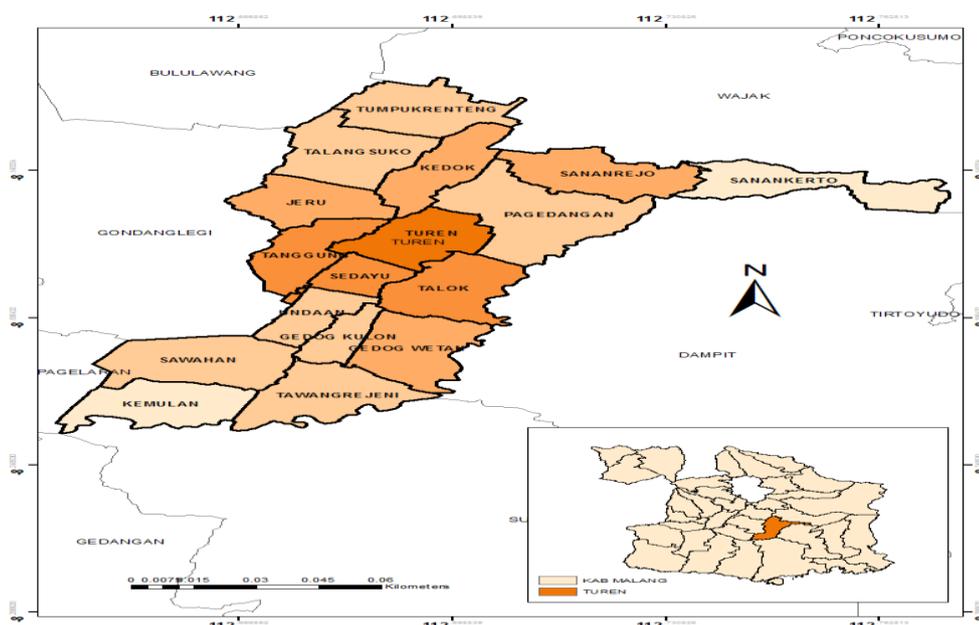
Pada memberikan jaminan keabsahan data, peneliti menggunakan uji keabsahan yang memfokuskan pada kriteria kredibilitas (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2006). Teknik uji kredibilitas (*credibility*) yang digunakan meliputi: (1) perpanjangan keikutsertaan; (2) ketekunan pengamatan; (3) triangulasi; dan (4) kecukupan referensial. Sementara teknik uji kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran.

### 3. Hasil

#### 3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Turen merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Turen Malang terletak diantara 112,3953 sampai 122,4477 Bujur Timur dan 8,0773 sampai 8,1353 Lintang Selatan. Berdasarkan data potensi Kecamatan Turen, posisi letak geografi seluruh desa yang ada di Kecamatan Turen termasuk secara topografi tergolong kawasan dataran. Wilayah Kecamatan Turen secara keseluruhan memiliki luas sekitar 63,90 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,15 persen dari total luas wilayah Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayahnya dataran, maka menjadikan wilayah Kecamatan Turen sebagai jalur transit yang menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten Lumajang.

Gambar 1: Peta Wilayah Kelurahan Turen

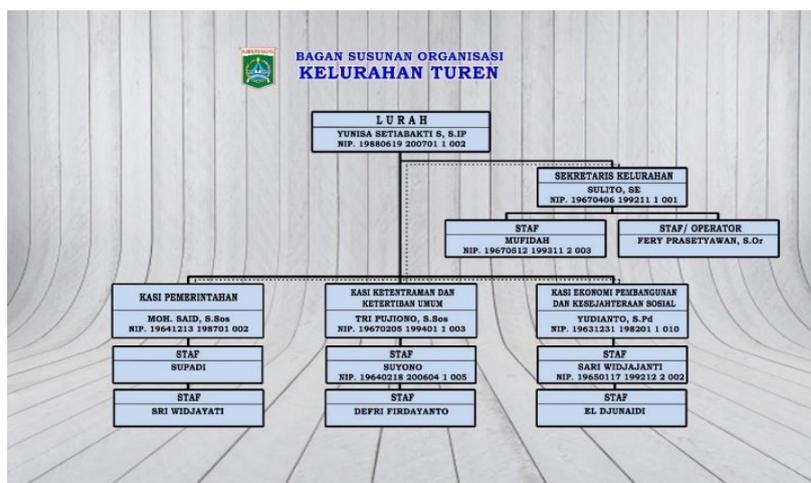


Sumber: Data Kelurahan Turen, 2019

Kecamatan Turen memiliki potensi wisata yang bisa dikunjungi. Selama berada di Kecamatan Turen, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata alam hingga makanan khas kecamatan ini. Namun demikian kekayaan alam yang dimiliki kecamatan Turen hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Turen memiliki peluang untuk ditingkatkan, jika mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya. Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Turen adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Wajak, Bululawang; Sebelah Timur, Kabupaten Dampit; Sebelah Selatan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing; dan Sebelah Barat, Kecamatan Gondanglegi (Harmoko, 2018).

Lokasi penelitian ini difokuskan pada komunitas di Rukun Warga (RW) 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kelurahan Turen terdiri dari 1 Dusun, 21 Rukun Warga (RW), dan 97 Rukun Tetangga (RT). Rukun Warga (RW) 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang memiliki 5 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk RW 18, Kelurahan Turen sebanyak 450 jiwa yang terdiri dari 250 Kepala Keluarga (KK).

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Turen, Kecamatan Turen dapat dilihat dalam bagan 1 sebagai berikut:

**Bagan 1: Struktur Organisasi Kelurahan Turen**

Sumber: Data Kelurahan Turen, 2019

Lingkungan RW 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dikembangkan dan dikelola sebagai Kampung Wisata dan Edukasi. Pengelola RW 18 dipimpin oleh seorang Ketua RW, yakni ibu Hj. Tasminah, S.Pd., M.Pd., yang dibantu oleh 2 orang sekretaris, yakni Tutik Setyorini dan M. Arif Rahman Hakim, sedangkan bendahara dijabat oleh Sri Rahayuningtyastuti dan Endang Sri Hartiningsih, S.Pd. Selain itu Ketua RW juga dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua I Bidang Lingkungan yang dijabat oleh bapak H. Hariono dan Wakil Ketua II Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dijabat oleh bapak Sukriyanto.

### 3.2. Literasi Aktor tentang Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Wolulus, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Pertama**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa lingkungan sebagai modal sosial. Menurut informan penelitian, yakni tokoh masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat Kampung Wolulus, RW 18, Kelurahan Turen yang menjadi subjek penelitian ini, menyatakan bahwa hal yang penting untuk disadari oleh masyarakat adalah bahwa lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial merupakan modal sosial bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setiap masyarakat atau komunitas memiliki sumber dan potensi lingkungan sebagai modal sosial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu tokoh masyarakat berikut:

“...masyarakat harus sadar bahwa lingkungan baik itu namanya berupa lingkungan fisik maupun sosial memiliki potensi sebagai modal, baik itu modal secara fisik maupun sosial yang dapat dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas...” (AS, 18/05/2019).

Secara konsepsi, modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas yang berkaitan dengan proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada umumnya, modal sosial mengacu kepada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of sosial trust*), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Berbagai masalah social yang ada di masyarakat, tidak mungkin akan mampu diatasi secara sendiri-sendiri oleh individu, oleh karena itu diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi

masalah sosial tersebut. Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain.

**Kedua**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa lingkungan harus dikelola dengan baik. Salah satu informan penelitian menyatakan bahwa sebagai modal sosial yang potensial maka lingkungan harus dikelola dan ditata dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...menurut saya lingkungan itu harus dimanfaatkan dan dikelola bagi kepentingan masyarakat, karena potensi dalam lingkungan itu merupakan modal yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat...ya lingkungan itu kan ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosialnya. Pokoknya manusia jangan merusak lingkungan tetapi menjaganya...” (NH, 18/05/2019).

Menurut NH, lingkungan sebagai modal sosial mengandung makna bahwa lingkungan harus dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika lingkungan dijaga dan dikelola dengan baik, maka kehidupan manusia juga akan dijaga oleh lingkungan. Pada dasarnya lingkungan sosial merupakan bagian dari lingkungan hidup, dimana lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, dan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan (buatan). Pengelolaan Lingkungan Sosial diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan), dan evaluasi yang bersifat komunikatif, dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumberdaya sosial (potensi dan keterbatasan), dan kesesuaian dengan asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Fokus dari proses pengelolaan lingkungan diarahkan untuk: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, serta keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (2) terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup; (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana; dan (6) terlindunginya lingkungan sari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Ketiga**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa terdapatnya korelasi yang saling timbal balik antara manusia dan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Menurut informan penelitian, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, dimana manusia mencari makan, minum dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena didalamnya lingkungan itu terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling bergantung. Tokoh masyarakat menuturkan:

“...seperti yang sudah saya katakana tadi bahwa lingkungan itu harus dikelola dengan baik, yak karena terdapat hubungan yang erat dan saling timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Manusia kan membutuhkan lingkungan, kita butuh udara, air, dan sebagainya. Demikian pula kita butuh bantuan orang lain, karena manusia tidak bias hidup sendirian, dia harus bermasyarakat...” (NH, 18/05/2019).

Apabila kondisi lingkungan hidup tidak dijaga dan dipelihara maka akan mengakibatkan munculnya berbagai bencana bagi penghuninya, khususnya bagi manusia. Sebagai contoh, misalnya bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya, terjadi sebagai akibat lingkungan hidup yang tidak terpelihara. Selain bencana alam, berbagai wabah penyakit juga sering timbul melanda lingkungan hidup yang tidak terpelihara. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengatasi batas hambatan yang ditimbulkan alam, tetapi kenyataannya masalah dan kerusakan lingkungan sulit dihindari sehingga mengganggu dan mengancam keberadaan manusia dan habitat penghuninya. Hal itu dikemukakan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...ya akibatnya kalau manusia tidak ada kepedulian atau perilakunya merusak lingkungan akan terjadi bencana apa itu longsor, banjir, dan sebagainya. Fungsi dan manfaat lingkungan itu kan banyak contohnya untuk tempat hidup, sumber mencari kekayaan, kalau lingkungan sosialnya ya tempat kita bersosial, berbudaya, dan seterusnya...” (AS, 18/05/2019).

Pemahaman subyek penelitian tentang lingkungan hidup yakni bahwa lingkungan hidup merupakan tempat atau pusat kehidupan manusia, dimana keberadaan lingkungan hidup telah banyak memberikan banyak manfaat dan fungsi bagi kehidupan manusia, seperti: (1) Sebagai tempat untuk bertahan hidup; (2) Sebagai tempat untuk bersosialisasi; (3) Sebagai tempat untuk mencari kekayaan; (4) Tempat untuk mendapatkan hiburan; (5) Sebagai sarana edukasi; dan (6) Sebagai sumber kebudayaan.

Dalam konteks lingkungan social, maka kondisi lingkungan social yang baik dan positif dimana relasi sosial antar orang-orang anggotanya berjalan secara harmonis maka akan mendukung terbentuknya perilaku social yang baik dan positif di antara warganya. Demikian pula sebaliknya, perilaku positif dari orang-orang warga suatu komunitas akan berkontribusi positif bagi penciptaan lingkungan social yang baik.

**Keempat**, konteks lingkungan dapat dilihat dari dua aspek, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Aktor pemberdaya memahami bahwa lingkungan itu meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kekeragaman antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya lingkungan itu terdiri dari tiga unsur, yakni: (1) Unsur Hayati (Biotik), yaitu unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya; (2) Unsur fisik (abiotik), yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya; dan (3) Unsur Sosial Budaya, yaitu unsur lingkungan yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Ketiga unsur tersebut diatas keberadaannya saling memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya saja keberadaan unsur fisik seperti air dan udara merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup.

**Kelima**, aktor pemberdaya berpandangan bahwa lingkungan fisik dan social lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurut para tokoh masyarakat RW 18, bahwa lingkungan Kampung Wolulas, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi” karena: (1) Memiliki aliran sungai yang bisa dikembangkan menjadi wisata sungai; (2) Potensi sebagai kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang; (3) Potensi sebagai kampung wisata kuliner (pengembangan produk makanan olahan); dan (4) berada pada lokasi strategis di jalur wisata pantai Malang Selatan dan wisata “Masjid Jin” yang ada di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen. Terkait hal itu disampaikan oleh ketua RW 18 berikut:

“...Alhamdulillah, lingkungan kami ini memiliki beberapa potensi yang bisa kami kembangkan dan kelola untuk kemanfaatan masyarakat. Ya potensi-potensi itu seperti disini ada saluran irigasi dari sungai, kemudian bisa dikembangkan menjadi kampung wisata kuliner karena wilayah RW 18 ini kan dilalui jalur menuju lokasi wisata Malang Selatan...” (TM, 18/05/2019).

Sejalan penjelasan tersebut Kepala Kampung Wolulas menuturkan:

“...iya seperti yang disampaikan ibu RW, disini juga bias dikembangkan menjadi kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang seperti yang sudah dikembangkan di daeran Pare, Kediri...” (ST, 18/05/2019).

Data hasil penelitian tersebut jika dianalisis dari perpektif literasi lingkungan sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan, dapat dikatakan bahwa literasi aktor tentang lingkungan

sudah memenuhi tiga dimensi, yakni: dimensi pengetahuan tentang lingkungan, dimensi sikap terhadap lingkungan, dan dimensi sikap terhadap lingkungan.

**Tabel 2:** Ringkasan literasi aktor tentang lingkungan sosial

No.	Dimensi	Literasi Aktor
1.	Pengetahuan ( <i>knowledge</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya korelasi yang saling timbal lingkungan.</li> <li>• Konteks lingkungan dapat dilihat lingkungan fisik dan lingkungan sosial.</li> </ul>
2.	Sikap ( <i>attitude</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan sosial sebagai modal sosial.</li> </ul>
3.	Perhatian ( <i>concern</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan harus dikelola dengan baik.</li> <li>• Potensi Lingkungan fisik dan social lingkungan Kampung Wolulas.</li> </ul>

### 3.3. Peran Aktor dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Peran-peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen dapat dideskripsikan sebagai berikut: **Pertama**, Peran sebagai inisiator. Aktor pemberdaya berperan sebagai inisiator yang melakukan prakarsa dan inisiatif awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Inisiator pemberdayaan masyarakat berupaya untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat (komunitas) guna melakukan tindakan perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut terlihat dari penuturan Kepala Kampung Wolulas: *"...awalnya saya dan ibu RW serta beberapa tokoh masyarakat berdiskusi bagaimana agar lingkungan Kampung Wolulas ini dijadikan sebagai kampus wisata edukasi, akhirnya kami menginiasi suatu program yakni kampung wsiata edukasi..."* (ST, 27/05/2019).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, inisiator pemberdayaan masyarakat bias berupa: pihak pemerintah, dimana sebagai inisiator pemerintah akan memberikan stimulant kepada masyarakat melalui berbagai program yang diselenggarakan; pihak swasta/LSM, sebagai inisiator pelaksana pemberdayaa masyarakat untuk memajukan kepentingan masyarakat umum; dan pihak masyarakat, dimana upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kades, lurah, ketua RT, ketua RW dan sebagainya.

**Kedua**, peran sebagai motivator. Menurut informan salah satu peran yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Hal itu seperti dikemukakan Ketua RW 18 berikut:

*"...saya sebagai ketua RW berusaha mengajak masyarakat untuk bangkit, memiliki semangat dan motivasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui program bersama yakni pengembangan kampung Wolulas sebagai kampung wisata edukasi, mengajak masyarakat untuk terlibat berpartisipasi..."* (TM, 18/05/2019).

Motivator adalah orang yang mendorong tumbuhnya motivasi kepada pihak lain. Pengertian motivator meliputi dua arti, yakni orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak; dan petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon akseptor keluarga berencana.

**Ketiga**, peran sebagai koordinator. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, aktor pemberdaya harus melakukan kegiatan koordinasi baik internal dengan masyarakat maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah, dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

*"...dalam pelaksanaan program di masyarakat saya harus melakukan koordinasi dengan semua lapisan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan pihak laiinya agar program ini*

bias berjalan dan mendapat dukungan semua pihak. Memang tidak mudah dalam melaksanakan koordinasi ini karena seringkali ditemukan respons yang kurang mendukung..." (AS, 18/05/2019).

Makna koordinator adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk suatu *scope* permasalahan dan mengkoordinasi orang, seperti koordinator tim. Koordinator (coordination) artinya menghubungkan (penghubung), jadi peran koordinator itu adalah orang yang menghubungkan yang dalam artian organisasi koordinator itu berperan dalam mengatur suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Keempat**, Peran sebagai perencana (*planner*). Aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan juga berperan sebagai perencana, dimana mereka harus membuat rencana dan merancang program-program pemberdayaan yang akan dilakukan. Kegiatan perencanaan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menyusun program dan menentukan target yang akan dicapai, serta menentukan berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Tokoh masyarakat menjelaskan berikut:

"...ya selain peran-peran seperti yang sudah saya katakan tadi, kami juga kadang harus menyusun rencana program pemberdayaan yang akan dirapatkan dan diputuskan dengan pengurus RW dan warga masyarakat...ya kami ini melakukan kegiatan secara keseluruhan, mulai dari merencanakan hingga melaksanakan..." (AS, 18/05/2019).

**Kelima**, peran sebagai fasilitator. Actor pemberdaya juga melaksanakan fungsi dan peran sebagai fasilitator. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

"...memang seperti yang sudah dijelaskan oleh pak Asyari itu betul seperti itu adanya, cuman saya menambahkan saja bahwa kami ini bertindak juga dalam memfasilitasi masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat kita tampung, jadi istilahnya kami ini fasilitator begitu. Selain itu kami juga harus menjalin komunikasi dan relasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah agar program kami bisa berjalan sesuai yang diharapkan ..." (NH, 18/05/2019).

Fasilitator pemberdayaan mengacu kepada pengertian orang yang memudahkan masyarakat untuk membangun proses diskusi dan dialog diantara mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Fasilitator bisa juga orang yang mendampingi atau memfasilitasi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, merubah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Sebagai agen pemberdayaan, seorang fasilitator melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi, pelatihan (*training*), melaksanakan kegiatan-kegiatan umum pemberdayaan masyarakat, memperkenalkan berbagai inovasi sederhana.

**Keenam**, peran sebagai komunikator. Dari pernyataan hasil wawancara dengan informan, sebagaimana dikemukakan, dapat disebutkan bahwa salah satu peran aktor adalah sebagai komunikator. Dalam proses pemberdayaan, seorang agen pemberdaya adalah merupakan komunikator, yang bertugas memelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan program-program pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Tabel 3:** Bentuk peran aktor dalam pemberdayaan masyarakat

No.	Bentuk peran	Deskripsi peran
1.	Inisiator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai pemrakarsa dan inisiator proses pemberdayaan.</li> </ul>
2.	Motivator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai motivator yang mendorong motivasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya.</li> </ul>
3.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan dalam mengkoordinir seluruh aktivitas proses pemberdayaan.</li> </ul>
4.	Perencana ( <i>Planner</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai perencana dalam merancang program pemberdayaan.</li> </ul>

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 5. | Fasilitator | • Aktor berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam proses pemberdayaan.             |
| 6. | Komunikator | • Aktor berperan sebagai komunikator, yang mengomunikasikan program pemberdayaan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder. |
- 

#### 4. Pembahasan

Dari hasil penelitian, ada dua bahasan utama, yaitu: bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan; dan, bentuk peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan berbasis komunitas. **Pertama**, bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada diri aktor pemberdaya sudah terbentuk literasi lingkungan. Mengacu kepada rumusan Hesham dan NEP (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017), aspek dari literasi lingkungan pada aktor pemberdaya ditandai dengan dimilikinya dimensi pengetahuan lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan perhatian atas lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, aka dapat ditambahkan terkait literasi lingkungan yang meliputi dimensi perilaku terhadap lingkungan, yakni bagaimana bentuk perilaku aktor atas lingkungannya. Dengan demikian, literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan selain melibatkan aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan perhatian, juga berkaitan dengan respon berupa perilaku atas lingkungan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa literasi lingkungan adalah merupakan keterampilan dasar, pemahaman dan perasaan tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Keterampilan dan pemahaman dasar tentang lingkungan pada aktor pemberdaya merupakan aspek penting untuk memunculkan perilaku ramah lingkungan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya jika mengacu kepada perspektif *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa perilaku manusia itu terbentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai, sementara aspek tujuan itu dibentuk oleh tiga hal, yakni: sikap terhadap lingkungan, norma subjektif, dan pemahaman kontrol tingkahlaku.

**Kedua**, bentuk peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pada hakekatnya adalah proses pemberdayaan yang melibatkan dan memanfaatkan potensi lingkungan komunitas baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Peran aktor pemberdaya sangat menentukan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas karena mereka secara proaktif melakukan kegiatan inisiasi, membangkitkan motivasi, malakukan koordinasi, menyusun perencanaan, melaksanakan fasilitasi, dan membangun komuniasi dan relasi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor dalam pemberdayaan masyarakat, cukup signifikan. Peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulus, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen meliputi peran sebagai: inisiator, motivator, koordinator, perencana (*planner*), fasilitator, dan komunikator. Mengacu kepada peran-peran pekerja sosial dalam pratik makro sebagaimana dikemukakan oleh Kirst-Ashman & Hull (2006), maka bentuk peran aktor pemberdaya sebagai agen perubahan (aktor pemberdaya) dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, memiliki kesamaan dengan peran pekerja sosial dalam proses intervensi makro yakni sebagai: *enabler* (pemungkin), *mediator*, *coordinator*, *general manager*, *educator*, *evaluator*, *broker*, *facilitator*, *initiator*, *negotiator*, *mobilizer*, dan *advocate*.

Peran aktor pemberdaya sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Beberapa kasus kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya dikarenakan tidak optimalnya peran aktor atau fasilitator. Misalnya, hasil studi Muslim (2017) menyebutkan bahwa kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin diakibatkan oleh tidak optimalnya peran, tugas, dan fungsi fasilitator sebagai aktor pemberdaya.

## 5. Kesimpulan

Bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat di kampung Wolulas yang meliputi: (1) Lingkungan sosial sebagai modal sosial; (2) Lingkungan harus dikelola dengan baik untuk kemanfaatan warga; (3) Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan; (4) Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial; dan (5) Lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi” karena: (a) Memiliki aliran sungai yang bisa dikembangkan menjadi wisata sungai; (b) Potensi sebagai kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang; (c) Potensi sebagai kampung wisata kuliner (pengembangan produk makanan olahan); dan (d) berada pada lokasi strategis di jalur wisata pantai Malang Selatan dan wisata “Masjid Jin” di Turen.

Sedangkan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi peran sebagai: (1) Melakukan inisiasi (inisiator), (2) Memberikan motivasi (motivator), (3) Melakukan koordinasi (coordinator), (4) Membuat perencanaan (planner), (5) Melaksanakan fasilitasi (Fasilitator), dan (6) Melakukan komunikasi dan relasi (komunikator).

## 6. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terdapat beberapa saran: **Pertama**, mengingat peran aktor (agen) pemberdaya sangat urgen dalam proses pemberdayaan masyarakat maka peran aktor (agen) untuk terus ditingkatkan dan berkesinambungan terutama peran sebagai inisiator dan motivator masyarakat; **Kedua**, pihak pemerintah perlu melakukan program pelatihan peningkatan kapasitas bagi para aktor (agen) pemberdaya baik di tingkat desa, kelurahan, maupun komunitas, agar peran mereka bisa optimal sebagai mitra pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat; **Ketiga** bagi masyarakat, untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) aktif dengan aktor (agen) pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat serta memberikan respon yang positif kepada aktor (agen) pemberdaya masyarakat.

**Ucapan terimakasih:** Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah membiayai program penelitian ini melalui dana Blokgrant Fakultas tahun 2019.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Tehory of Planned Behavior. Organizational Bevaior and Human Decision Processes*. University of Massachusetts at Amherst : Academic Press, Inc.
- Amalia, A.D.; & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015. Pp 175-188*.
- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Denzin, N.K.; & Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Netting, F.E.; Kettner, P. M.; McMurtry, S.L.; & Thomas, M.L. (2017). *Social Work Macro Practice*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Ghozali, D. A. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indpnesia.
- Gumperz, J. C. (ed.). (2006). *The Social Construction of Literacy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harmoko. (2018). *Kecamatan Turen Dalam Angka 2018*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Helaluddin; & Wiaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives- Vision, Analysis and Practice*.

- Jayaputra, A. (ed.). (2015). *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial bagi Peserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Pusltbangkesos Kemensos RI.
- Kalof, L.; Dan, A.; & Dietz, T. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kirst-Ashman, K.K. (2010). *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. Belmont: Brooks/Cole.
- Kirst-Ashman, K.; & Hull, G.H. (2006). *Generalist Practice With Organizations and Communities*. Belmont, USA: Thomson Higher Education.
- Lunenburgm, F. C. (2010), *Managing Change: The Role Of The Change Agent*, *International Journal of Management, Business, and Administration*, Volume 13, Number 1, 2010.
- Marvasti, A.B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Melani, S. (2016). Literasi informasi dalam praktek sosial. *Jurnal Iqra'* Volume 10 No.02, Oktober 2016 (pp. 67-82).
- Meilinda, H.; Prayitno, B.A.; & Karyanto, P. (2017). *Student's Environmental Literacy Profile of Adiwiyata Green School in Surakarta, Indonesia*. *Journal of Education and Learning*. Vol. 11 (3) pp. 299-306.
- Muslim, A.(2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, Vol 13, No. 1, Maret 2017.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Pilgrim, J; & Martinez, E.E. (2017). *Defining Literacy in the 21<sup>st</sup> Century: A Guide to Terminology and Skills*. *Texas journal of literacy education*. volume 1 issue 1.
- Pranarka dan Vidhyandika. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Sosio Informa* Vol. 3, No. 03, September - Desember, Tahun 2017. pp 216-235.
- Salim, A. (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarwono, S.W. (1995). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sukmana, O. (2003). *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: Bayu Media.
- Suradi. (2019). *Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang*. *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2019.
- Theresia, A. dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akedemisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Zimmerman, M.A. (2000). *Handbook of Community Psychology*, edited by Julian Rappaport and Edward Seidman. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York



## Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar

Muhammad Alwi<sup>1\*</sup>  Marwati Sulni<sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Dosen Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Jl. Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan

<sup>2</sup> Pendamping Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Jl. H. Andi Depu, Sulawesi Barat

\* Korespondensi: [muhammad\\_alwi@iainpalopo.ac.id](mailto:muhammad_alwi@iainpalopo.ac.id); Tel: +6285210956398

Diterima: 07 Januari 2021; Disetujui: 25 Oktober 2021 ; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Artikel ini mengupas upaya pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan bulan September sampai November 2020 di enam desa, tiga wilayah kecamatan Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menghantam sektor perekonomian yang berimplikasi pada pendapatan dan daya beli masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah melalui Program Keluarga Harapan memberikan bantuan sosial agar masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang terimplementasi dengan baik di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam implementasi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dimasa pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar mengalami banyak skema perubahan penyesuaian bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, harapan besar pemerintah melalui bantuan sosial, masyarakat kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi Covid-19, tidak hanya kemudian bersifat konsumtif dan bergantung pada bantuan pemerintah.

**Kata kunci:** Covid-19, Pemenuhan Kebutuhan, PKH

*Abstrak: This article is peeling efforts to meet the needs of the family beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in the pandemic Covid-19 in Polewali Mandar. This study uses a type a qualitative descriptive approach. The research was conducted in September to November 2020 in the six villages, the three districts in Polewali Mandar. The research location is determined by purposive then the techniques of data collection are done by interview, observation and documentation. The Data were analysed qualitatively, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the impact of the pandemic Covid-19 hit sectors of the economy that have implications on the income and purchasing power of the poor, so that the government through the Family Hope Program provides social assistance to people less able to get social protection in an effort to meet the needs of the family are implemented properly in Polewali Mandar. In the implementation of social assistance through the Family Hope Program in the pandemic Covid-19, especially in Polewali Mandar experienced a lot of schemas changes adjustments of social assistance as an effort to fulfil people are less able. Thus, the great hope of the government through the help of social, community less able to meet the needs of the family in the pandemic Covid-19, not only then are consumptive and rely on government assistance.*

**Keywords:** Covid-19, Fulfillment of Needs, PKH

## 1. Pendahuluan

Dalam situasi Pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Sejatinya, krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia bukanlah yang pertama kali. Pada tahun 1997/1998, inflasi yang melanda Indonesia menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, khususnya masyarakat yang memiliki upah penghasilan rendah. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah yang tidak stabil berimbas pada krisis keuangan dan perbankan. Selain itu, persoalan tersebut juga menyebabkan krisis sosial dan politik yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia (Silpa Hanoatubun, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 berimplikasi negatif terhadap sektor perekonomian domestik yang ada di Indonesia, terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mempunyai penghasilan dan banyak kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian, dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19 (Silpa Hanoatubun, 2020).

Penurunan daya beli masyarakat berdampak juga terhadap kinerja perusahaan yang semakin menurun, ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan serta mengancam eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat sangat berpengaruh akibat kurangnya pendapatan atau penghasilan terutama masyarakat yang pekerja informal dan harian. Sehingga sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati dalam mengatur keuangannya yang berakibat kepada berkurangnya permintaan barang konsumsi dan memberikan tekanan pada produsen dan penjual (Julio Ronaldo Togas Lengkong, 2020).

Dengan terus bertambahnya jumlah penderita Covid-19 dalam dua bulan terakhir, data akumulasi sejak 2 Maret-4 Mei 2020 sebanyak 11.192 kasus positif dan 8.452 meninggal, sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Sehingga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* yang memaksa sebagian besar masyarakat bekerja dirumah (Haryanto, 2020). Sehingga, pada aspek perusahaan khususnya yang bergerak pada sektor perdagangan, transportasi dan pariwisata, mengalami penurunan yang signifikan karena para karyawan tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk dengan banyaknya masalah pembayaran hutang dan kredit macet. Banyak kreditur yang meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit yang akan berakibat pada eksistensi dunia perbankan dalam memutar uang nasabah. Selain itu banyak proyek-proyek strategis pemerintah yang terancam karena para investor asing yang tidak mau berinvestasi dan bahkan menarik investasinya di Indonesia.

Di antara dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 adalah meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga 31 Juli 2020, lebih dari 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19, di mana 1.132.117 orang pekerja formal yang dirumahkan, 383.645 orang di- PHK, dan sebanyak 630.905 pekerja informal terdampak (Mohammad Teja, 2020).

Dengan banyaknya perkerja yang dirumahkan, baik pekerja informal maupun pekerja yang di PHK, hal ini akan berpotensi masuk ke dalam garis kemiskinan. Tidak adanya lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi Covid-19 membuat dependensi tinggi terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan donasi. Kebutuhan ini berskala besar, menimbang banyaknya jumlah pekerja informal dan korban PHK di Indonesia, ditambah rumah tangga yang sudah tergolong miskin dari sebelum pandemi. Otomatis, besaran nominal dan jumlah bantuan sosial yang dibutuhkan pun semakin tinggi, karena menurunnya pendapatan mereka secara drastis. Bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 tidak berfokus pada satu program. Melalui kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ekonomi makro selama pandemi Covid-19 terbagi dalam 2 jaring pengaman yaitu, Jaring Pengaman Sosial dengan cara penambahan dan dukungan dari pembiayaan APBN yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah (Lestary J. Barany, Asisten Peneliti, Dewa Ayu Widia, Asisten Peneliti, 2020) dan Jaring Pengaman Ekonomi dengan cara pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Selain itu untuk

meningkatkan perekonomian juga dilakukan berbagai stimulus yaitu Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan Ketiga, dikeluarkan Kebijakan di Sektor Keuangan (A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy, 2020).

Kementerian sosial RI juga meluncurkan berbagai program dan stimulus sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Winarno, 2020). Namun masyarakat belum banyak mengetahui dan memanfaatkan secara maksimal berbagai program dan bantuan dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan sosial (Habibullah, 2017).

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, program ini sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Sufianto di Jawa Tengah. Ditemukan bahwa sasaran program yang masih kurang tepat, di mana masih ditemukan orang yang tidak miskin mendapatkan bantuan dan sebaliknya yang miskin belum mendapat bantuan. Hal ini disebabkan oleh data yang masih belum valid dan penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan juga belum optimal sesuai ketentuan (Sufianto, 2020). Sehingga dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, atau yang disebut sebagai perilaku ekonomi subsisten (Habibullah, Sugiyanto, Anwar Sitepu, Irmayani, Badrun Susantyo, B. Mujiyadi, 2017).

Perencanaan data yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menjadi alternatif untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan kehidupan ekonominya. Sinkronisasi data terus dilakukan sebagai upaya untuk mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini dapat tepat sasaran (Nuniek Dewi Pramanik, 2020).

Dalam kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas bansos PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menurunkan angka kemiskinan apabila dibandingkan dengan program lain seperti subsidi energi program PKH mampu menurunkan angka kemiskinan di range 5 hingga 7 persen per 100 Triliun Rupiah anggaran yang dikeluarkan (Martha Carolina, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH efektif dalam memenuhi kebutuhan karena kondisi ekonomi yang lemah dan akses pendidikan yang tidak memadai bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH, karena Desa tersebut merupakan daerah terpencil (Rina Angraini, 2021). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan atau prioritas dari bantuan sosial PKH, sehingga tujuan dari bantuan sosial tersebut tidak tercapai. Adanya Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah terbiasa menerima bantuan dan susah untuk merubah pola pikirnya yang bersifat konsumtif, sehingga tidak ada keinginan untuk mandiri sejahtera. Hal ini menjadi tantangan bagi pendampingan sosial PKH (Rahmah Muin, 2020).

Dampak dari pandemi Covid-19 cukup dirasakan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Ahmad G, 2020). Bantuan sosial baik dari pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 401.057 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 68.180 orang dengan persentase sebesar 15,26 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,74 persen dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,79 persen. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 442.576 jiwa dan 98.677 rumah tangga. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a). berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 sebanyak 28.348 keluarga atau sebanyak 28,7 persen keluarga di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini fokus pada realisasi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kondisi ekonomi dan realisasi upaya pemerintah memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi Covid-19.

## 2. Metode

Secara metodologis, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di enam desa dari 167 desa/kelurahan, tiga wilayah kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan letak geografis yang berbeda, terpilih enam desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian yaitu Kelurahan Darma dan Kelurahan Takatidung berada di Kecamatan Polewali, Desa Lampoko dan Desa Katumbangan berada di Kecamatan Campalagian, serta Desa Mombi dan Desa Pao-pao berada di Kecamatan Alu.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan tehnik *snowball sampling* (sampel bola salju) dimulai dari orang yang dikenal kemudian berkembang berdasarkan informasi yang didapatkan. Ada sekitar 45 peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang di wawancarai dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda untuk diambil informasi terkait dengan data ingin didapatkan. Data dan informasi juga di dapatkan dari beberapa pendamping PKH dan pemangku kepentingan yang terkait. Tehnik wawancara yang digunakan bersifat semi stuktur kualitatif agar memberikan kesempatan kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk mengespresikan pandangan dan interpretasi mereka terkait dengan bantuan sosial PKH. Pendekatan ini bisa memberikan interpretasi yang rinci, kontekstual dan mendalam terkait dengan masalah yang diteliti (J. Mason, 2002).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dilapangan. Data yang didapatkan diseleksi secara ketat dengan uraian yang singkat. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah analisis secara mendalam.

## 3. Hasil

### 3.1. Gambaran umum Kabupaten Polewali Mandar

Sejarah singkat Kabupaten Polewali Mandar, di mana sebelumnya bernama Kabupaten Mamasa yang secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali

Mandar secara resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa (Wikipedia, 2008).

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40'00" -3°32'00" LU dan 118°40'27" -119°32'27" BT. Batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi, di sebelah Selatan berbatasan dengan laut dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km<sup>2</sup> (Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, 2020). Dari sisi topografi, sebagian besar atau di atas 41 persen dari luas Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, di atas 39 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-40 persen (di atas 70% dari luas kabupaten). Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebanyak 442.576 jiwa dan 98.677 rumah tangga. Penduduk tersebut tersebar di 16 Kecamatan terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 217.597 jiwa dan perempuan 224.979 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 persen. Dengan luas wilayah sekitar 2.022,30 km<sup>2</sup>, berarti setiap km<sup>2</sup> ditempati oleh penduduk sebanyak 219 jiwa. Sebaran penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 65,55 persen atau 290.110 jiwa; penduduk usia muda 0-14 tahun sebanyak 128.728 jiwa atau 28,98 persen dan sisanya penduduk usia di atas 65 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a).

Kecamatan Polewali merupakan ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dengan populasi penduduk terbesar, hingga 61.914 jiwa. Populasi terbesar kedua yaitu Campalagian mencapai 57.271 jiwa. Populasi dua kecamatan ini mencapai 27 persen populasi penduduk Kabupaten Polewali Mandar. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2012-2018

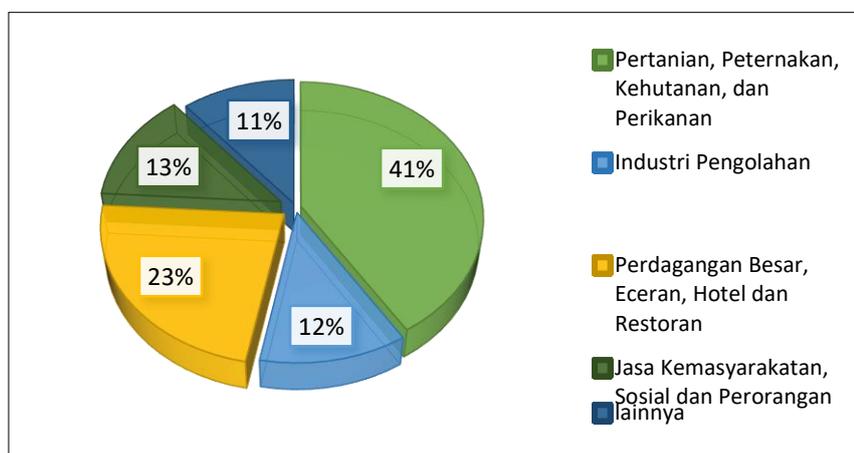
Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alu	12.331	12.388	12.502	12.672	12.824	12.993	13.160
Anre Api	9.622	9.768	9.889	10.014	10.127	10.253	10.376
Bulo	9.067	9.151	9.304	9.418	9.517	9.630	9.746
Balanipa	24.583	24.654	24.809	25.139	25.430	25.763	25.912
Binuang	31.450	31.500	32.104	32.366	32.575	32.823	33.065
Campalagian	53.926	54.125	54.626	55.320	55.935	56.605	57.271
Iimboro	17.272	17.341	17.416	17.604	17.765	17.949	18.133
Luyo	27.795	28.139	28.549	28.960	29.325	29.732	30.133
Mapilli	27.767	27.830	28.199	28.543	28.840	29.175	29.504
Matakali	22.141	22.247	22.533	22.818	23.071	23.354	23.628
Matangnga	5.232	5.303	5.383	5.446	5.498	5.559	5.619
Polewali	57.095	57.569	58.561	59.434	60.222	61.072	61.914
Tapango	22.421	22.586	22.904	23.217	23.495	23.804	24.107
Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tinambung	23.153	23.314	23.597	23.867	24.099	24.362	24.622
Tubbi Taramanu	19.067	19.231	19.465	19.747	19.997	20.270	20.543
Wonomulyo	46.726	46.976	47.631	48.228	48.764	49.348	49.929
Total	409.648	412.122	417.472	422.793	427.484	432.692	437.662

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2019.

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional 2019, sebagian besar penduduk Kabupaten Polewali Mandar bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41 persen (84,8 ribu orang). Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja besar yakni sektor perdagangan besar dan sektor jasa. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 23 persen (48,3 ribu orang), sedangkan sektor jasa hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13 persen (26,3 ribu orang). Pada sektor perdagangan besar, eceran, hotel dan restoran didominasi oleh pekerja perempuan yakni 33,5 persen, sedangkan laki-laki persentase terbesar bekerja di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (49,5 persen). Pada jenis kelamin perempuan sektor tertinggi kedua setelah perdagangan besar, eceran, hotel, restoran yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan laki-laki, di mana sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menjadi sektor dominan yang diminati oleh pekerja laki-laki. Untuk sektor lainnya terdapat perbedaan jumlah persentase laki-laki dengan perempuan. Di sektor industri pengolahan, laki-laki yang bekerja sebesar 7,6 persen sedangkan perempuan lebih besar yakni 19,5 persen. Demikian pula di sektor jasa kemasyarakatan, persentase peran perempuan (16,8 persen) lebih besar dibandingkan dengan laki-laki (9,9 persen). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020b)



**Gambar 1.** Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2019 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2020)

Penduduk Kabupaten Polewali Mandar umumnya beragama Islam, hal ini berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020, bahwa sebanyak 98 persen menganut agama Islam, selebihnya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Suku dan budaya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar juga beragam yakni suku Mandar, Mamasa, Pattae, Bugis, Makassar dan Toraja. Namun sebagian besar penduduk Kabupaten Polewali mandar bersuku mandar karena merupakan suku asli pribumi.

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Polewali Mandar, 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	lainnya
Alu	13.160	-	-	-	-	-
Anre Api	10.349	135	318	-	-	-
Bulo	9.901	-	-	-	-	-
Balanipa	26.624	3	7	-	-	-
Binuang	34.166	811	102	-	-	-
Campalagian	60.413	-	-	-	-	-
Limboro	18.074	-	-	-	-	-

Luyo	32.709	1	-	-	-	-
Mapilli	28.799	-	-	-	6	2
Matakali	23.107	745	-	-	-	-
Matangnga	3.901	-	-	-	-	-
Polewali	83.893	3.779	417	80	11	-
Tapango	25.243	245	249	48	-	-
Tinambung	22.672	3	-	-	-	-
Tubbi Taramanu	22.467	-	-	-	-	-
Wonomulyo	45.193	415	71	-	-	-
<b>Total</b>	<b>460.671</b>	<b>6.137</b>	<b>1.164</b>	<b>128</b>	<b>17</b>	<b>2</b>

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 401.057 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 68,18 ribu orang dengan persentase sebesar 15,26 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,74 persen dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,79 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Tabel 3.** Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Polewali Mandar 2014-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	293.073	75,68	17,79
2015	305.462	77,90	18,22
2016	337.138	73,04	17,06
2017	351.856	69,25	16,05
2018	366.355	69,68	15,97
2019	376.827	68,86	15,60
2020	401.057	68,18	15,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2020

### 3.2. Kondisi Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang terdapat di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 sebanyak 28.348 keluarga atau sebanyak 28,7 persen keluarga di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI. Jumlah tersebut tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten. Berikut adalah jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di setiap wilayah kecamatan.

**Tabel 4.** Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Alu	1.235
Anre Api	680
Bulo	992
Balanipa	2.265

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

Binuang	2.165
Campalagian	4.004
limboro	1.535
Luyo	2.804
Mapilli	1.798
Matakali	1.299
Matangnga	550
Polewali	1.931
Tapango	1.531
Tinambung	1.537
Tubbi Taramanu	2.816
Wonomulyo	1.206

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini dilakukan di enam desa/kelurahan tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Alu. Hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diperoleh informasi, keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Mombi Kecamatan Alu sebagai berikut:

Iya saya merasakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan keluarga, secara ekonomi saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena suami saya yang bekerja sebagai tukang ojek mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19 (BHR, 12 Okto. 2020).

Keterangan serupa serupa disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, sebagai berikut:

Suami saya bekerja sebagai petani, di mana hasil pertaniannya saya sendiri yang menjualnya ke pasar, tetapi dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan harga mengalami penurunan karena permintaan di pasar menurun, sehingga pendapatan keluarga menurun (STA, 15 Okto. 2020).

Informasi yang sama juga disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, sebagai berikut:

Perekonomian keluarga saya di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini disebabkan saya sebagai tulang punggung dalam keluarga bekerja sebagai pedagang di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali, dimana omset penjualan turun drastis di masa pandemi Covid-19, sehingga keuntungan juga mengalami penurunan (KSM, 20 Okto. 2020).

Informasi dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan menggambarkan bahwa kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena sebagian besar keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar pekerjaan utamanya adalah pekerja harian dan petani yang penghasilannya tidak menentu. Sehingga sangat perlu perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan sosial sebagai stimulus dalam memenuhi kebutuhan mereka.

### ***3.3. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi covid-19***

Penelitian ini memotret kontribusi Program Keluarga Harapan dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi

Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan sejak periode September hingga November 2020.

Di masa pandemi Covid-19, Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan merubah skema tahapan penyaluran bantuan sosial beras yang sebelumnya dilaksanakan per triwulan menjadi setiap bulan. Inisiatif ini dilakukan untuk menopang perekonomian dan kebutuhan asupan gizi keluarga pra sejahtera di tengah dampak Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga mengalami kesulitan untuk bekerja diluar rumah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Di Kabupaten Polewali Mandar, bantuan khusus untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan mengurangi beban pengeluaran diwujudkan dalam bentuk bantuan kebutuhan dapur, seperti beras, telur, daging ayam, abon-abon, dan mie instan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Polewali Mandar juga mendapatkan Bantuan Sosial Beras (BSB). Terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober 2020, program Program Keluarga Harapan telah menyalurkan bantuan sosial beras sebanyak 15 kg per keluarga penerima manfaat. Kontribusi Program Keluarga Harapan sangat berperan dalam menopang pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat, terlebih di masa pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan oleh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali sebagai berikut:

Saya sangat merasakan eksistensi Program Keluarga Harapan sebagai instrument dalam upaya pemenuhan kebutuhan khususnya di masa pandemi Covid-19. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga merupakan salah satu program bantuan yang disalurkan setiap bulan kepada anggota keluarga penerima manfaat. Program tersebut dapat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga dan memungkinkan saya untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanan dan penghasilan lainnya untuk ditabung sebagai persiapan masa depan dan juga bisa dijadikan sebagai modal usaha (LST, 28 Okto. 2020).

Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan sebagai instrumen pemerintah melalui Kementerian Sosial menemukan relevansinya dalam mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, instrument tersebut juga menjadi salah satu penanda kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, khususnya kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pemerintah memberikan bantuan khusus penanganan Covid-19 untuk memenuhi kebutuhannya. Di kabupaten Polewali Mandar penyaluran bantuan khusus penanganan Covid-19 sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Harapan kami dengan bantuan sosial Covid-19 dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak kemudian menyebabkan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi komsuftif dan tergantung kepada bantuan pemerintah (YSD, 11 Nov. 2020).

Bayaknya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial khususnya kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga bantuan sosial dampak covid-19 bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dapat menopang kehidupan di masa pandemi Covid-19. Salah satu keterangan dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, menuturkan sebagai berikut:

*Muhammad Alwi dan Marwati Sulni*

*Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar*

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan sangat membantu perekonomian keluarga miskin, terlebih dimasa krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Bantuan Sosial berupa BPNT khusus covid-19, penyaluran bantuan yang disalurkan tiap bulan dan Bantuan Sosial Beras (BSB) yang diterima Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sangat dirasakan manfaatnya, karena pemenuhan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi (MRL, 16 Nov. 2020).

Implementasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar sudah terealisasi dengan baik. Keluarga penerima Program Keluarga Harapan setiap bulan melakukan penyaluran bantuan di ATM (*Automated Teller Machine*) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga penerima manfaat yang mengalami masalah seperti Kartu ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir dan tidak terbaca di mesin ATM langsung ditangani oleh Pendamping untuk dikoordinasikan dengan pihak bank penyalur. Begitu juga dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersalurkan setiap bulan, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menerima Bantuan Pangan Non Tunai berupa beras, daging ayam, sayuran dan telur selama masa covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah 28.348 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 16 Kecamatan. Bantuan sosial beras sebayak 15 kg setiap bulan selama periode Agustus-Oktober 2020 sudah tersalurkan dengan baik di beberapa Kecamatan, hanya ada beberapa Kecamatan yang belum tersalur karena masuk dalam kategori *remote area* atau masuk dalam kategori daerah sulit terjangkau tetapi sementara diusahakan untuk disalurkan. Penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar tersalurkan dengan baik karena kerja sama atau koordinasi yang baik dari semua pihak. Harapannya dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan khusus Covid-19 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan bisa membantu memenuhi kebutuhannya. (RHT, 19 Nov. 2020).



**Gambar 2.** Realisasi penyaluran bantuan sosial beras (a) di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali (Sumber : dok Peneliti); (b) Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Beras di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian (Sumber : dok Peneliti)

Dengan terealisasinya bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar dapat membantu masyarakat kurang mampu khususnya Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat di masa pandemi covid-19. Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

#### 4. Pembahasan

Eksistensi Program Keluarga Harapan sebagai instrumen untuk merealisasikan program Kementerian Sosial terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan memberikan efek kesejahteraan sosial kepada masyarakat pra sejahtera. Program Keluarga Harapan merupakan program Kementerian Sosial yang mendapatkan anggaran yang cukup besar. Dalam hal ini, anggaran tersebut diarahkan kepada keluarga pra sejahtera sebagai program bantuan sosial bersyarat, dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan pertama kali direalisasikan di Indonesia pada tahun 2007. Dalam perkembangannya, efektifitas program tersebut berhasil menekan angka kemiskinan dan menopang kemandirian keluarga penerima manfaat agar dapat meraih kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks dunia internasional, program perlindungan sosial ini dikenal dengan istilah *conditional cash transfers* (CCT). (Sosial, 2020).

Di antara komponen bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat kurang mampu mencakup kesehatan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan juga memberi stimulus untuk merubah perilaku masyarakat terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Kendati penurunan angka kemiskinan tidak terlalu signifikan, tetapi member *impact* terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam perkembangannya, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang memberikan jaminan dan perlindungan sosial sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan khususnya di masa pandemi Covid-19.

Terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 sangat rentan dan dirasakan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga diperlukan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial agar masyarakat miskin dapat mempertahankan kehidupannya. Melalui Program Keluarga Harapan bantuan sosial khusus penanganan Covid-19 di salurkan untuk meminimalisir dampak buruk ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, implementasi program perlindungan sosial yang di canangkan oleh pemerintah harus secara efisien dan efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak.

Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi barat yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan terbanyak apabila di bandingkan dengan daerah lain jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 28.348 Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2020. Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar merasakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Khususnya bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang bekerja harian dan petani. Sehingga bantuan sosial dari pemerintah dalam hal ini Kementerian sosial sangat dirasakan manfaatnya.

Dalam hal ini, pemerintah (Kementerian Sosial RI) konsen dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan merubah skema bantuan sosial dan memberikan bantuan stimulan kepada keluarga kurang mampu khususnya keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam perlindungan dan jaminan sosial. Penyaluran bantuan sosial khusus penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar terealisasi dengan baik. Dengan tersalurnya bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diharapkan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pemerintah menyesuaikan kebijakan bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Bantuan sosial khusus penanganan Covid-19 yang di salurkan melalui Program Keluarga Harapan diimplementasikan dengan merubah skema bantuan

sosial dan menambah batuan sosial sembako berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Agar kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19. Realisasi dari penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar berjalan dengan efektif sampai ke pelosok daerah.

## 5 Saran

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19, perlu sinkronisasi data dan kerja sama stakeholder yang terkait agar bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Diharapkan dari realisasi bantuan sosial tersebut tidak hanya bantuan yang sifatnya konsumtif, akan tetapi bisa memberikan efek yang jauh untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kurang mampu untuk bisa memperbaiki kondisi ekonominya dikemudian hari. Sehingga perlu peran dan upaya pemerintah dan pendamping Program Keluarga Harapan untuk terus memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

**Ucapan terimakasih:** Kepada Koordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator Kabupaten Polewali Mandar, dan Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Polewali Mandar atas segala bantuan dan dukungan selama proses penelitian ini. Secara khusus, kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16, 206–213.
- Ahmad G. (2020). *Dampak Ekonomi Corona, Kakek Penjual Sapu di Polman Utang Beras Tetangga*. Sulbar Kita.  
[https://sulbarkita.com/dampak\\_ekonomi\\_corona\\_kakek\\_penjual\\_sapu\\_di\\_polman\\_utang\\_beras\\_tetangga\\_berita905.html](https://sulbarkita.com/dampak_ekonomi_corona_kakek_penjual_sapu_di_polman_utang_beras_tetangga_berita905.html)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2020a). *Statistik Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2020*. Auliyah Polewali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2020b). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar.
- Dinas Kominfo SP Polewali Mandar. (2020). *Kondisi Geografis*.  
<https://Polmankab.Go.Id/Polman/Kondisigeografis>.
- Habibullah, Sugiyanto, Anwar Sitepu, Irmayani, Badrun Susantyo, B.Mujiyadi, T. N. (2017). *Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI - Jakarta.
- Habibullah. (2017). Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6.  
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/713>
- Haryanto. (2020). 151 The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020 Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4, 151–165.
- J. Mason. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage.
- Julio Ronaldo Togas Lengkong, T. M. T. dan D. D. S. M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UKM Beebeebkess Collection di Airmaddi Kabupaten Minahasa. *Unstrat*, 42–47.
- Lestary J. Barany, Asisten Peneliti, Dewa Ayu Widia, Asisten Peneliti, Y. R. D. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? *CSIS Commentaries*.

- Martha Carolina, M. S. A. (2020). Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian Extraordinary Policy Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI*.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mohammad Teja. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat*, 12.
- Nuniek Dewi Pramanik. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01, 113–120.
- Rahmah Muin, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 5, 14–32.
- Rina Angraini, A. K. M. dan B. I. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 2.
- Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2, 146–153.
- Sosial, K. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020*. Kemensos RI.
- Sufianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(PKH, Kemiskinan, Jawa Tengah). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Wikipedia. (2008). *Kabupaten Polewali Mandar*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Polewali\\_Mandar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar)
- Winarno, I. H. dan E. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9.



## Strategi Adaptasi Ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada Masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kalimantan Barat

Dahniar Th. Musa<sup>1\*</sup> , Efriani<sup>1</sup> , Donatianus BSE. Praptantya<sup>1</sup> , Jagad Aditya Dewantara<sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [dahniar@fisip.untan.ac.id](mailto:dahniar@fisip.untan.ac.id); Tel : +62 8115719586

Diterima: 3 Januari 2021; Disetujui 18 Januari 2022; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Kebijakan penutupan perlintasan antarnegara menjadi satu kebijakan dalam pencegahan dampak pandemi Covid-19. Namun kebijakan ini, telah memberikan dampak, terutama pada aspek ekonomi. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap perlintasan perbatasan, adalah yang pertama menerima dampak dari kebijakan penutupan perbatasan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan mendeskripsikan dua kelompok masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Jagoi, perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia. Penelitian ini bertujuan menemukan praktik baik yakni strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan oleh pengrajin dan tukang ojek di perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 5 pengrajin dan 3 tukang ojek dan pengamatan langsung, ditemukan empat strategi adaptasi ekonomi yakni (1) Beralih ke Produk dalam Negeri (2) Menciptakan Alternatif Hidup Hemat, dan (3) Beralih Pekerjaan Lain. Strategi ini tampak dalam dua bentuk yakni adaptasi material dan adaptasi nonmaterial. Adaptasi material yakni perubahan konsumsi produk, yang kini telah beralih pada produk-produk dalam negeri, sementara adaptasi nonmaterial yakni pengetahuan ekonomi, keterampilan dan jaringan sosio-kultural. Kajian ini relevan pada pengembangan ekonomi berbasis komunitas untuk ketahanan ekonomi masyarakat pada masa penutupan perbatasan.

**Kata kunci:** Strategi Adaptasi, Adaptasi Ekonomi, Masyarakat Perbatasan, Penutupan Perbatasan, Covid-19

**Abstract:** *The border closure policy has become a policy in preventing the impact of the Covid-19 pandemic. However, this policy has had an impact, especially on the economic aspect. People who depend on border crossings are the first to receive the impact of the border closure policy. Therefore, this study aims to describe two groups of people who have received the impact of the border closure policy. This research was conducted in Jagoi Village, Indonesia-Malaysia crossing. This study aims to find good practices, namely economic adaptation strategies carried out by craftsmen and motorcycle taxi drivers at the Indonesia-Malaysia crossing. By using qualitative methods with in-depth interviews and direct observations, four economic adaptation strategies have been found, namely (1) switching to domestic products, (2) creating alternative economic life, (3) switching to other jobs, and (4) asking for help. to relatives. This strategy appears in 2 forms, namely material adaptation and non-material adaptation. Material adaptation is a change in product consumption which has now shifted to domestic products, while non-material adaptation is economic knowledge, skills and socio-cultural networks. Material adaptation is a change in product consumption, which has now shifted to domestic products, while non-material adaptation is economic knowledge, skills and socio-cultural networks. This study has been relevant to the development of a community-based economy for the economic resilience of the community during the border closure period.*

**Keywords:** *Adaptation Strategy, Economic Adaptation, Border Community, Border Closure, Covid-19*

## 1. Pendahuluan

*Indonesia Border Closing Policy* yang diberlakukan pada 2 April 2020, merupakan satu dari sekian kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia menghentikan orang asing bepergian dan transit ke Indonesia (Kemhumham, 2020; Dirjen Imigrasi, 2020). Kebijakan ini juga memberlakukan penutupan pintu masuk negara seperti Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Mobilitas antar negara Indonesia dan negara tetangga menjadi terhenti, lalu lintas barang dan jasa bahkan mobilitas manusia dalam kontrol dan pengawasan yang sangat ketat. Penutupan perlintasan perbatasan bukan hanya dilakukan oleh negara Indonesia, namun oleh hampir sebagian besar negara di Dunia. Fenomena penutupan ini dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari kebijakan *border closures* untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 (Medeiros, Guillermo Ramírez, Ocskay, & Peyrony, 2020; Niranjana, 2020; Radil, Castan Pinos, & Ptak, 2020)

Perlintasan Antar Negara khususnya perbatasan darat, menerima dampak dari kebijakan pencegahan penularan dan resiko pandemi Covid-19. Penutupan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memberikan pengaruh yang memperburuk kesejahteraan kelompok sosial tertentu di daerah perbatasan. Perlu diakui, pada tulisan ini, masih terlalu dini untuk menilai dampak pandemi covid-19 secara menyeluruh, namun kehidupan sosial telah menjadi fenomena yang memperlihatkan anggota kelompok masyarakat tertentu, dan penduduk di banyak daerah perkotaan hingga pedesaan di Indonesia menerima dampak dari intervensi kebijakan dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Dengan demikian, bukan hal yang muluk bila disebutkan bahwa wabah Pandemi Covid-19 mempengaruhi kestabilan pada aspek kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia (Hadiwardoyo, 200AD; Hanoatubun, 2020; Yamali & Putri, 2020)

Fenomena ini terlihat pada hilangnya sebagian pekerjaan, ditutupnya sebagian pusat bisnis dan bahkan pasar keuangan yang mulai goyah (Muhyiddin, 2020; Wuryandani, 2020; Yamali & Putri, 2020). Intervensi kebijakan ini memberikan berbagai dampak, termasuk diantaranya kesehatan fisik dan psikologis, sosial dan ekonomi (Glover et al., 2020; El Zowalaty, Young, & Järhult, 2020). Aspek ekonomi disebut, sebagai aspek yang besar dan berat dalam menerima dampak dari berbagai pandemi yang pernah terjadi (Azimah et al., 2020; Michie, 2020; Sakri, 2020; Sharma, Luthra, Joshi, & Kumar, 2020; Wuryandani, 2020). Diantaranya, kerugian yang diakibatkan pandemi bukan hanya terjadinya kondisi kesehatan yang buruk, namun juga telah menghambat akumulasi modal manusia dan pertumbuhan ekonomi (Lopez, et al., 2006). Misalnya wabah influenza Spanyol pada tahun 1918 mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari \$3 triliun (60%) dan menyumbang sekitar 4,8% pada produk domestik bruto (PDB) global pada waktu itu. Sejak awal abad ke-21, berbagai wabah seperti SARS, H1N1, Ebola, Zika dan epidemi baru lainnya dapat mencapai \$570 miliar hingga \$3,5 triliun atau sekitar 0,7% dari total pendapatan global (Gong, Zhang, Yuan, & Chen, 2020).

Sementara itu, implikasi dari penurunan ekonomi saat pandemi juga dirasakan oleh masyarakat diperbatasan antarnegara (Herlan et al., 2020; Medeiros et al., 2020; Radil et al., 2020). Seperti penurunan drastis interaksi dan konektivitas perdagangan antarnegara serta terjadinya perubahan dalam struktur jaringan perdagangan (Vidya & Prabheesh, 2020). Daerah pedesaan terutama desa-desa di perbatasan antarnegara, menjadi daerah rawan mendapat resiko terburuk dari dampak Covid-19 (Henning-Smith, 2020).

Pada 18 Maret 2020, pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) mengeluarkan Surat Nomor BWN/86.03/734/III/2020 dan memberikan mandat kepada panglima TNI untuk melakukan pengawasan titik perlintasan antarnegara. Penutupan jalur perlintasan ini juga berlaku di perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang yakni satu

*Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya, Jagad Aditya Dewantara*  
*Strategi Adaptasi Ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi*

dari 5 perlintasan antar negara Indonesia-Malaysia yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Namun, sebelum Pemerintah Indonesia melakukan penutupan perlintasan perbatasan antarnegara secara resmi pada 2 April 2020, pemerintah Malaysia telah lebih dahulu melakukan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) pada 17 Maret 2020, oleh karenanya Perlintasan Serikin-Jagoi ditutup.

Dari 5 perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia, Jagoi adalah 1 dari 2 perlintasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat yang belum memiliki Pos Lintas Batas Antar Negara (Tirtosudarmo, 2014). Oleh karena itu, kelompok masyarakat seperti tukang ojek, penjual sayur, dan pengrajin, umumnya melakukan jaringan perekonomian secara tradisional dengan negara tetangga (Efriani, et al., 2020; Mufizar, et al., 2012; Soewarsono, 2005), dan kebijakan penutupan perlintas perbatasan antarnegara Indonesia-Malaysia, berdampak terhadap stabilitas perekonomian masyarakat di daerah perbatasan tersebut. Kehilangan lapangan pekerja terutama sektor informal yang berada di perbatasan negara mulai muncul, sektor perdagangan dan penurunan konsumen hingga matinya produktivitas industri kecil dan menengah (Muhyiddin, 2020; Sudiman, Fahrudin, Taufik, Subarman, & Taufik, 2020). Kelompok masyarakat, seperti tukang ojek, penjual sayur dan pengrajin, menjadi kehilangan lahan pekerjaan sehingga mengalami sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menghadapi keadaan yang demikian, setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan kehidupannya. Pada tahun 2018 terdapat kajian tentang strategi adaptasi tukang Ojek dalam mempertahankan kehidupan yakni dengan cara mencari pekerjaan sampingan guna mempertahankan kelangsungan hidup di tengah hipitan kehidupan perkotaan (Yulastin, 2018). Pada tahun 2020, terdapat kajian tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga miskin penerima bantuan sosial, yakni dengan cara menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan (Samputra, 2020).

Strategi bertahan hidup, juga sangat dibutuhkan pada masa pandemi yang menuntut perjuangan untuk bertahan hidup selama situasi ini terus berlangsung. Kajian strategi bertahan hidup pada masa pandemi telah beberapa kali dilakukan. Diantaranya Heribertus Hanta telah mendeskripsikan strategi bertahan hidup karyawan PHK PT.Hair Star Indonesia. Karyawan yang diPHK tersebut harus tetap melanjutkan hidupnya dengan cara mencari pekerjaan lain, melakukan penghematan, dan meminta bantuan kepada jaringan sosial yang mereka miliki (Hanta, 2020). Muhammad Natsir Kholis dkk. juga menyarankan adanya strategi bertahan hidup pada Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu dalam menghadapi pendapat para nelayan yang kian menurun karena pademi Covid-19 ini (Kholis, Fratnesi, & Wahidin, 2020). Wan Laura Hardilawati menyebutkan perlunya strategi bertahan hidup pada UMKM dalam merespon perubahan ekonomi global sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 (Hardilawati, 2020).

James C. Scott, dalam teori *survival mechanism*, menyebutkan strategi yang dilakukan oleh para petani agar bertahan hidup dalam melalui masa-masa sulit, terutama terkait dengan penghasil mereka yang menurun atau tidak mencukupi kebutuhan pokok. Scot menyebutkan terdapat tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk bertahanhidup yaitu (1) mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan cara makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah; (2) menggunakan alternatif subsisten yaitu swadaya yang mencakup usaha kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang atau buruh, dan melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan; dan (3) meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (*patron*). Penelitian Scott tersebut menjelaskan bagaimana individu mampu bertahan hidup (*survive*) pada kondisi yang sulit (Scott, 1983).

Mengacu pada strategi survive yang dikemukakan Scot, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi survive masyarakat perbatasan antarnegara Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Perbatasan antarnegara dalam bertahan hidup pada masa pandemi. Pada umumnya,

masyarakat lokal pun telah berkembang berbagai modal sosial (Manzilati, 2018) yang dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Strategi adaptasi yang kami maksudkan dalam tulisan ini ialah suatu mekanisme bertahan hidup atau *survival mechanis* terutama pada aspek ekonomi. Secara khusus, strategi adaptasi yang dimaksudkan adalah cara mengadaptasikan ketahanan ekonomi pada masyarakat perbatasan diperlintasi antarnegara Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi, yang menerima dampak dari kebijakan *border closure* sebagai bagian dari pencegahan penularan Covid-19. Adaptasi ekonomi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang praktik baik pola-pola ketahanan ekonomi komunitas pada masyarakat di perlintasan antarnegara.

## 1. Metode

Fenomena adaptasi ekonomi masyarakat di perlintasan perbatasan antarnegara di Desa Jagoi diteliti dengan metode kualitatif dengan prosedur etnografis. Wawancara mendalam dan observasi merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan kepada 5 orang pengrajin dan 3 orang tukang ojek. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan 2 orang TNI yang bertugas di portal PLB Jagoi, serta terhadap 3 orang pedagang di perlintasan Jagoi-Serikin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang mampu mengungkapkan kondisi ekonomi keluarga dan juga cara-cara masyarakat dalam bertahan secara ekonomi pada situasi pandemi. Informasi kemudian dituliskan secara emik, untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menekankan penggunaan teknik emik, yang dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada informan dalam memberikan informasi dan keterangan sebagaimana yang mereka alami dan yang terjadi di lokasi penelitian. Guna mentriangulasi hasil wawancara, juga dilakukan pengamatan langsung, pendokumentasian beberapa benda dan lokasi serta rekaman suara untuk mendukung data dan proses analisis.

Model analisis yang dikembangkan pada penelitian ini ialah analisis interaktif yang dimulai sejak mengumpulkan informasi di lapangan, menyotir informasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kategori atau yang mengacu pada teori *survival mechanism*. Data disajikan dalam bentuk teks naratif dan eksplanatori, tabel, dan gambar serta menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi tersebut, untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini berfokus pada 2 kelompok sosial-ekonomi yakni pengrajin bidai/takin yang terhimpun dalam Koperasi Produsen Bung Topui Labak Luag (selanjutnya ditulis KP. BTLL) dan tukang ojek perlintasan perbatasan yang terhimpun dalam organisasi Ojek Desa Jagoi. Kedua kelompok masyarakat ini, menjadi kelompok yang dengan nyata dan jelas menerima dampak dari kebijakan penutupan perlintasan perbatasan.

## 2. Hasil

### 2.1. Potret ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada masa pandemi Covid-19

Jagoi adalah satu desa di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Bagian Timur hingga Utara dari Desa Jagoi berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Bagian Utara berbatasan dengan Lundu, dan di Timur berbatasan dengan Serikin, sehingga desa ini menjadi satu pusat dari perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia di tanah Borneo. Dari 5 perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia, Desa Jagoi adalah 1 dari 2 perlintasan yang belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN), saat ini Desa Jagoi masih berstatus sebagai Pos Lintas Batas (PLB), sehingga masyarakat melakukan transportasi dan importasi secara konvensional (Tirtosudarmo, 2014).

Meskipun, Desa Jagoi menjadi perlintas antarnegara Indonesia-Malaysia, namun pada masa pandemi Covid-19, Desa Jagoi dikategorikan pada zona hijau. Kategori ini didasarkan pada tidak terdapatnya risiko penyebaran virus serta tidak terdapat kasus positif pada desa ini. Namun, kontrol lalu lintas perbatasan, adalah yang wajib dilakukan, sehingga dilakukan penutupan perlintasan. Dalam wawancara dengan anggota TNI yang bertugas di perbatasan, diungkapkan bahwa pertama kali penutupan perlintasan dilakukan ketika pemerintah Malaysia memberlakukan *lockdown* untuk negaranya, sejak saat itu pula perlintasan Jagoi menjadi sepi.

Malaysia melakukan tutup total sejak 17 Maret, sehingga orang-orang dari kita (Indonesia) tidak bisa lagi pergi ke Serikin. Biasanya, di sini sangat ramai, terutama pada akhir pekan, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Orang-orang kita (Indonesia) mereka berjualan sayur dan buah-buahan ke Bau-Bau pada Jumat sore dan kembali pada Minggu sore. Selain itu, banyak juga orang-orang kita yang pergi ke Serikin untuk berbelanja, berobat ataupun hanya sekedar kunjungan keluarga. Tapi sejak penutup karena pencegahan Covid-19, daerah ini menjadi sepi. Warung-warung di tutup, para tukang ojek pun tidak lagi punya tarikan (Petugas TNI (L), Jagoi Babang, 2 Juli 2020).

Pada masa sebelum pandemi, Desa Jagoi menjadi pusat bertemunya dan berinteraksinya masyarakat di daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia. Orang-orang yang hendak berbelanja ke Serikin, akan melewati perlintasan tersebut, sehingga perlintasan perbatasan ini menjadi sangat ramai. Selain berbelanja ke Serikin, umumnya masyarakat sekitar Desa Jagoi, berjualan sayur-mayur, buah-buahan dan hasil kerajinan, ataupun hanya pergi untuk kunjungan keluarga, bahkan berobat atau cek kesehatan ke rumah sakit di daerah Serikin Malaysia. Serikin menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat Desa Jagoi, dapat dikatakan hampir seluruh bahan untuk kehidupan sehari-hari mereka dapatkan dari Serikin. Berbelanja keperluan sehari-hari, bahkan beras dan elpigi (gas) mereka peroleh dari Serikin. Namun selama masa pandemi, proses tersebut terhenti, sehingga pasokan kebutuhanpun menjadi langka.

Pada masa pandemi, perlintasan menjadi sepi, bahkan pasokan kebutuhan pokokpun menjadi terhenti sehingga hampir seluruh kebutuhan sehari-hari menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Tampak hanya 1 atau 2 orang yang melintasi perbatasan per hari selama masa pandemi. Padahal sebelumnya, masyarakat di Desa Jagoi sebagai besar menggantungkan hidupnya pada perlintasan tersebut. Berikut ini kami paparkan potret kehidupan pengrajin dan tukang ojek di Desa Jagoi selama masa pandemi Covid-19.

## **2.2. Potret Ekonomi Pengrajin di Perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi pada Masa Pandemi Covid-19**

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) telah mencatat dampak *lockdown* di berbagai negara, diantaranya pemutusan hubungan kerja atau PHK, penurunan jam kerja atau bekerja paruh waktu (Sharma et al., 2020), berhentinya sebagian besar sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi (Muhyiddin, 2020). Hal serupa juga terjadi pada satu koperasi kerajinan tangan di Desa Jagoi, yakni Koperasi Produsen Bung Topui Labak Luag (KP. BTLL) yang menghentikan produksinya dan merumahkan seluruh anggotanya.

KP. BTLL merupakan usaha koperasi yang usahanya terdiri dari usaha utama, usaha penunjang dan usaha tambahan. Usaha utama KP. BTLL adalah kerajinan tangan anyaman bidai dan takin, usaha penunjangnya ialah simpan pinjam dan usaha tambahannya adalah pemasaran barang tradisional. KP. BTLL memiliki Badan Hukum dengan Nomor: 1137/BH/KWK.14/XI/2000 pada 22 November 2000 dengan PAD Nomor: 518/20/PAD/BH/IDKI/III/2000 pada 18 maret 2018. Dalam sejarahnya, KP. BTLL telah mengalami perubahan anggaran dasar koperasi yang disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Usaha Menengah dengan nomor:001092/PAD/M.KUKM.2/VI/2019 pada 10 Juni 2019. Sejak tahun 2018, KP. BTLL menjadi masyur dengan produksi utamanya, yakni bidai dan takin, anyaman berbahan baku rotan yang diproduksi secara manual oleh 40 orang anggota koperasi. Kelangkaan bahan baku, terutama rotan, menyebabkan sebagian besar bahan baku, dipesan atau didatangkan dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.



Gambar 1. Bidai dan Takin

KP.BTLL yang beralamatkan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, mendapat dampak dari pandemi COVID-19. Pada tanggal 17 Maret 2020, telah dilakukan penutupan pos lintas batas antarnegara Indonesia-Malaysia, yang berdampak pada proses distribusi bahan baku bidai dan takin dan juga proses penjualan hasil produksi. Dalam wawancara dengan ketua KP.BTLL, diungkapkan bahwa, 1 Minggu setelah penutupan pos lintas batas antarnegara Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi, KP. BTLL juga “merumahkan” 40 orang anggota koperasinya. Sementara gedung koperasi atau rumah produksi bidai dan takin pun telah ditutup.

Iya kita tidak bisa lagi bekerja, karena bahan baku kita tidak ada lagi. Pengiriman bahan baku menjadi terhenti karena penutupan transportasi oleh pemerintah. Jadi kami terpaksa merumahkan semua anggota kami. Untuk saat ini sebagian besar dari anggota, melanjutkan memproduksi anyaman di rumah mereka masing-masing, dari bahan baku yang tersedia di kebun atau di hutan sekitar kami. Kami sangat kawatir oleh pandemi ini (Aha (L/pengrajin). Jagoi, 29 Juni 2020).

Pasokan bahan baku merupakan faktor yang mendorong dirumahkannya anggota koperasi dan ditutupnya KP.BTLL. Bahan baku utama berupa rotan, merupakan barang langka di Desa Jagoi, dan tidak mencukupi untuk bahan produksi, sehingga dipesan langsung dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kebijakan penutupan transportasi oleh pemerintah Indonesia, juga telah berdampak dengan berhentinya pengiriman bahan baku bidai dan takin. Berikut ini bahan baku yang diperlukan untuk produksi utama KP.BTL:

**Tabel 1.** Hasil Produksi dan Bahan Baku

No	Jenis Produksi	Jenis Rotan
1.	Bidai	Rotan Belah dan Kulit Kayu
2.	Bakul sampah	Rotan Bulat
3.	Bakul Buah	Rotan Bulat
4.	Pungki	Rotan Bulat
5.	Tudung saji	Rotan Bulat dan Rotan hati
6.	Penampak kasur/bantal	Rotan Bulat
7.	Tangguk	Rotan Belah
8.	Ragak	Rotan Belah
9.	Bakul Bawang	Rotan hati
10.	Piring	Rotan hati
11.	Topi	Rotan hati
12.	Pot Bunga	Rotan hati
13.	Takin	Rotan hati
14.	Aksesoris, Gelang, Cincin	Rotan hati

Sumber: Profil KP. BTLL, 2018

Bahan-bahan tersebut diproduksi secara manual dengan peralatan sederhana dan tradisional. Proses produksi ini, memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk memproduksi 1 buah bidai diperlukan waktu 2 hingga 3 minggu. KP.BTLL mempekerjakan 40 orang anggotanya untuk memproduksi usaha utamanya. Dari hasil produksi tersebut sekurang-kurangnya terdapat 14 jenis hasil produksi, seperti yang tampak pada tabel 1 di atas. Bidai merupakan produksi unggulan dan banyak diminati. Bidai diyakini sebagai tikar warisan nenek moyang suku Jagoi, sehingga syarat dengan nilai budaya dan menjadi ikon untuk suku Jagoi.

Pemasaran hasil produksipun masih dilakukan secara konvensional, yakni dipajang di rumah produksi. Para pengrajin, termasuk ketua koperasi mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pangsa pasar yang pasti dan tidak memiliki tempat penampungan hasil produksi. Selama koperasi tersebut beroperasi, hasil produksi dijual ke pasar rakyat di Serikin, Sarawak Malaysia. Terdapat beberapa pengusaha dari negara Malaysia, yang datang langsung ke rumah produksi dan membeli dalam jumlah besar, untuk kemudian dijual kembali. Produk-produk yang beli oleh pengusaha dari Malaysia dalam jumlah besar tersebut, kemudian dikemas dan diberi label "*Made in Malaysia*".

Ketua KP.BTLL menuturkan, hingga saat ini, belum ada gerakan dari pemerintah Indonesia, khususnya dari dinas terkait untuk menampung dan memasarkan hasil produksi KP. BTLL. Bahkan belum ada program-program yang menasar penampungan hasil produksi dari Desa Jagoi. Hal ini menjadi persoalan terutama pada masa pandemi ini, para pengrajin terus memproduksi anyaman, maka hasil produksinya menumpuk dan tidak ada yang membeli, terutama karena mereka tidak lagi memiliki akses ke pasar Serikin dan para pengusaha dari Malaysia pun tidak bisa mengambil hasil produksi tersebut. Hal ini menjadikan para pengrajin produktivitas pengrajin menjadi menurun, karena hanya memproduksi manakala ada yang memesan dan bukan menghasilkan kerajinan untuk di pasarkan secara luas.

Dari data keanggotaan KP.BTLL tampak didominasi oleh profesi petani. Berdasarkan pengamatan lapangan, tampak bahwa para pengrajin belum menunjukkan sikap sebagai wirausahawan. Tampak, para anggota koperasi hanya berperan sebagai pengrajin, dan belum memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi produk. Selain itu, dalam dialog dengan ketua KP.BTLL, terungkap bahwa

*Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya, Jagad Aditya Dewantara*  
Strategi Adaptasi Ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi

koperasi tidak memiliki manajemen resiko, sehingga tidak siap menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan mereka tidak memiliki alternatif untuk tetap survive dalam kondisi yang tidak terduga. Sehingga pandemi Covid-19 ini sungguh-sungguh membawa potret baru bagi pengrajin di Desa Jagoi.

### **2.3. Potret Ekonomi Tukang Ojek di Perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi pada Masa Pandemi Covid-19**

Kondisi infrastruktur yang belum memadai, terutama akses transportasi, menjadikan Ojek motor sebagai transportasi yang populer di perlintasan Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi. Ojek Motor menjadi alat transportasi yang menghubungkan para pengunjung atau orang-orang yang hendak melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan demikian ojek bukan hanya fenomena transportasi di perlintasan Perbatasan, melainkan suatu fenomena ekonomi. Transportasi ojek motor adalah layanan jasa, yang penghasilnya sangat tergantung dengan jumlah konsumen mereka (Zuhdi, 2018). Konsumen ojek di perlintasan antarnegara di Desa Jagoi, umumnya adalah orang-orang yang melintasi perbatasan, khususnya orang-orang Indonesia yang hendak berpergian ke Serikin, dan juga kembali dari Serikin. Selain ojek orang, para tukang ojek juga melayani ojek barang, yakni pengiriman barang.

Ojek yang berlaku di perlintasan antara negara di Desa Jagoi adalah jenis kendaraan motor roda dua. Tukang ojek merupakan warga di sekitar Desa Jagoi, yang terhimpun dalam keanggotaan tukang ojek Desa Jagoi. Umumnya tukang ojek ini adalah mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Ojek yang terdapat di Jagoi Babang ialah ojek dalam versi yang konvensional (bukan ojek online bdk. Yunus, 2018), mereka terhimpun dalam kesatuan tukang ojek yang memiliki solidaritas dan kekerabatan yang tinggi. Proses ojek dijalankan secara konvensional dan diatur di dalam organisasi tukang ojek, termasuk sistem antrian penumpang, tarif dan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Tukang ojek umumnya menjalin relasi sosial dengan para anggota tukang ojek, bahkan dengan pelanggan dan lingkungan tempat mereka melakukan ojek (Lantri, Gunawan, & Yunita, 2017). Relasi sosial ini menjadi modal sosial dalam ketahanan ekonomi tukang ojek (Fathy, 2018).

Dalam wawancara dengan seorang tukang ojek, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 120 tukang ojek di perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia. Tukang ojek ini terhimpun dalam organisasi Ojek, dan para anggotanya memiliki kartu anggota. Dalam organisasi ojek ini, telah disepakati beberapa hal, diantaranya, terkait tarif atau ongkos ojek sesuai dengan lokasi atau daerah tujuan. Selain itu, telah disepakati juga, tentang pembagian "tarikan". Diungkapkan pula bahwa sebelum masa pandemi, setiap tukang ojek, sekurang-kurangnya mendapatkan Rp100.000 hingga Rp200.000 perhari. Mereka umumnya mengantar orang-orang yang hendak pergi ke Serikin ataupun orang-orang yang kembali dari Serikin. Wilayah ojek mereka ialah daerah sekitar Kecamatan Jagoi Babang, hingga ke Kecamatan Seluas, bahkan juga terdapat juga daerah-daerah yang jauh seperti ke Sambas dan Singkawang.

Dulunya saya ngojek, dan sekarang tidak ngojek lagi, sekarang hanya nunggu-nunggu saja, sehari hanya dapat 1 atau 2, bahkan terkadang tidak dapat sama sekali. Sebelum Corona, di sini sangat ramai, terutama pada akhir pekan, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Orang-orang berdatangan, ada orang Pontianak, orang Sambas, yang pergi ke Serikin, kami antar dengan motor. Sehari kami bisa dapat Rp200.000, 1 bulan bisa jutaan juga. Kami ojek hanya pakai motor, dan umumnya kami ojek orang dan barang, tapi selama musim corona penghasilan memang menurun (Toni (L/ tukang ojek). Jagoi, 1 Juli 2020).

Sejak minggu kedua bulan tiga yang lalu, daerah ini menjadi sepi seperti sekarang ini. Kalo barang sudah memang tidak ada lagi masuk dan ke luar. Hanya sesekali, orang yang menitip barang atau mengambil barang. Sejak Malaysia *lockdown*, kita tidak boleh lagi masuk ke daerah Malaysia, tapi

kalo orang kita yang di Malaysia mau pulang ke Indonesia, itu masih boleh karena sekarang sudah mulai ada pelonggaran (Johari (L/tukang ojek). Jagoi, 1 Juli 2020).

Sejak penutup perlintasan perbatasan bersamaan dengan dilakukannya *lockdown* oleh pemerintah Malaysia, para tukang ojek pun kehilangan sumber penghasilan dari perlintasan perbatasan. Pada 3 Juli 2020, saat kami datang ke pintu perlintasan, suasana sungguh sepi, hanya tampak 3 orang tukang ojek yang sedang duduk-duduk, sementara motor mereka diparkir. Dari penuturan ketiganya, bahwa mereka memang menunggung-nunggu saja, dan biasanya itu dilakukan hanya setengah hari, selebihnya mereka memilih untuk diam di rumah. Sementara sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja sawit dan menjadi tukang bangunan, pergi ke kebun atau berladang.

### 3. Pembahasan

#### Strategi Adaptasi Ekonomi Pengrajin dan Tukang Ojek pada Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan *border closures* yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia, berdampak pada kehidupan masyarakat di perbatasan antarnegara, seperti yang tampak pada masyarakat di Desa Jagoi yang berada di perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia. Penutupan ini, menimbulkan beberapa dampak, terutama pada bidang ekonomi. Kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Jagoi sangat tergantung dari pasokan barang dari Serikin Malaysia, hal ini karena secara geografis mereka lebih dekat jika berbelanja ke Serikin. Tidak mengherankan jika bisnis ritel yang terdapat di Desa Jagoi, menjual produk-produk Malaysia, termasuk kebutuhan pokok sehari-hari. Akibat penutupan perlintasan, dan tidak adanya lagi akses ke Serikin selama masa Pandemi Covid-19, maka kelangkaan sembako pun menjadi masalah bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Jagoi. Selain barang-barang kebutuhan menjadi langka, dampak lainnya ialah harga menjadi melambungkan tinggi.

Selain itu, penutupan perlintasan juga telah menyeret sebagai besar masyarakat Jagoi Babang pada hilangnya sebagai besar sumber penghasilan mereka. Sekurang-kurangnya dalam penelitian ini, terdapat 40 anggota KP.BTLL dan 120 anggota Ojek perlintasan Perbatasan yang menerima dampak dari kebijakan *border closures*. Kelangkaan bahan pokok, dan tingginya harga, serta kehilangan pemasokan, membuat masyarakat Jagoi untuk mengadaptasikan diri dengan situasi pandemi ini. Mengacu ada teori *survival mechanism* James C. Scott, berikut ini beberapa cara strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan masyarakat di Desa Jagoi.

#### 3.1. Beralih ke Produk dalam Negeri

Guna mengatasi kelangkaan sembako, penduduk Desa Jagoi telah beralih menggunakan dan mengkonsumsi produk dalam Negeri. Dalam wawancara dengan salah satu pemilik Toko di Desa Jagoi diungkapkan bahwa 90% dari isi tokonya adalah produk-produk Malaysia. Namun selama pandemi ini, tokonya menjadi kosong, dan akhirnya beralih menjual produk-produk dalam Negeri. Produk dalam negeri memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk dari Malaysia, namun karena kelangkaan produk Malaysia, mereka pun akhirnya menggunakan produk dalam Negeri.

Biasanya saya berbelanja ke Serikin, untuk dijual kembali di sini, tapi sekarang sudah tidak bisa, makanya warung saya sekarang kosong seperti ini. Produk Malaysia lebih murah, dan lebih dekat juga, dari pada saya harus berbelanja ke Bengkayang. Sekarang ini hanya ada elpiji yang 3 Kg ini produk Indonesia, karena sekarang kita tidak bisa lagi ambil gas ke Serikin. Di sini juga orang berbelanja pakai Ringgit, kita jual barang juga dengan harga Ringgit (Ida (P/pedagang) Jagoi, 3 Juli 2020).

Beralih menggunakan Produk dalam Negeri merupakan strategi untuk bertahan hidup masyarakat Jagoi yang baru kali ini dilakukan. Selama ini mereka menggunakan produk-produk dari

negara Malaysia, sementara produk dalam negeri hampir tidak mereka gunakan. Dalam wawancara dengan seorang warga, diungkapkan bahwa, baru kali ini yang bersangkutan merasakan makan beras dan gula produk Indonesia. Pemilihan menggunakan produk negara Malaysia, dipicu oleh jarak mereka ke Serikin yang lebih dekat dibandingkan harus berbelanja ke Ibu Kota Kabupaten. Selain itu, harga produk Malaysia lebih terjangkau secara harga dari pada produk Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh biaya distribusi karena jarak tempuh tersebut. Namun masa pandemi, produk Indonesia telah menjadi pilihan utama.

Hal serupa juga dilakukan oleh para pengrajin bidai dan takin yang mengalami kelangkaan bahan baku yakni rotan akibat penutupan perbatasan. Guna melanjutkan produksi kerajinan, para pengrajin ini, memilih memanfaatkan, bahan baku yang tersedia di kebun ataupun di hutan di Desa Jagoi. Selain memanfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar hutan Desa Jagoi, hasil produksi juga dipasarkan di sekitar Desa Jagoi. Sebelumnya hasil kerajinan tangan ini di pasarkan ke Serikin Malaysia, sehingga dikemas menjadi *made in Malaysia*. Namun karena penutupan perlintas ini, akhirnya hasil produksi kerajinan tangan ini dipasarkan di Desa Jagoi hingga ke daerah ibu kota provinsi.



**Gambar 2.** Pengrajin yang Tetap Produktif pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelumnya, proses pemasaran dilakukan secara konvensional, yakni dengan diantar langsung ke pasar Serikin ataupun diambil langsung oleh pengusaha dari Malaysia, namun sekarang telah mulai dikembangkan pemasaran secara *online* menggunakan aplikasi *whatsapp*. Meskipun proses pemasaran ini hanya dilakukan melalui postingan di *story whatsapp* dan juga di group, namun hal ini menjadi satu strategi dalam mengadaptasikan diri pada masa pandemi.

Sekarang sangat susah, masyarakat di sini tetap membuat Takin dan Bidai, namun sudah tidak ada yang beli, karena Toke dari Malaysia sudah tidak bisa lagi datang. Sekarang kami pun hanya membuat sedikit saja. Rotan juga di ambil dari kebun, tapi tidak banyak, hanya sedikit saja. Kalo tidak membuat takinpun tidak ada kerjaan juga di rumah, jadi tetap membuat. Kalo ada yang sudah jadi, ya kami simpan saja, kalo ada yang datang ke rumah, kami tawarkan, barang kali berminat untuk membeli. Sekarang saya posting di WA, jadi ada juga yang pesan, pernah saya kirim sampai ke Pontianak (Emi (P/pengrajin) Jagoi, 2 Juli 2020).

Demi kelangsungan hidup, masyarakat Jagoi telah melakukan adaptasi dalam mempertahankan kehidupan di masa pandemi. Strategi beralih ke produk dalam negeri nampaknya menjadi strategi yang cukup memadai pada masa pandemi ini. Beralih ke produk dalam negeri bukan hanya pada proses berbelanja atau membeli namun juga dalam proses penjualan, seperti tampak dalam penjualan hasil kerajinan tangan berupa takin dan bidai.

### 3.2. *Menciptakan Alternatif Hidup Hemat*

Kelangkaan bahan kebutuhan pokok, menjadikan masyarakat Jagoi beradaptasi dengan kondisi yang mereka hadapi pada masa pandemi Covid-19 ini. Berhemat menjadi satu strategi adaptasi yang mereka kembangkan. Tidak hanya kelangkaan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, namun juga melambungnya harga menjadikan mereka untuk mencari alternatif dalam melangsungkan kehidupan mereka. Dalam wawancara terungkap, sebuah keluarga telah melakukan adaptasi dengan kelangkaan bahan bakar gas sebagai produk yang mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diungkapkan bahwa gas adalah barang yang sangat langka, sehingga mereka beralih dengan menggunakan kayu api. Ketika kami melakukan pengamatan, kami sungguh menemukan satu ruang yang baru saja dibangun sekitar 1 bulanan, ruangan itu digunakan untuk memasak dengan menggunakan kayu api. Ruangan ini tampak baru, karena kami masih dengan jelas melihat, beberapa bagian dalam ruangan ini masih tampak baru dan bersih karena belum ternoda oleh karbon dari asap pembakaran.

Sejak penutupan perlintasan, yang paling dirasakan ialah kelangkaan beras, gula dan gas, yang selama ini kami peroleh dari Serikin. Jadi sekarang saya buat dapur kayu api, kami masak di dapur dengan menggunakan kayu api. Kompor gas masih juga kami gunakan tapi itu hanya sesekali saja, kalo ada keperluan memasak yang harus segera atau buru-buru (Ahao (L/pengrajin) Jagoi Babang, 29 Juni 2020).



**Gambar 3.** Dapur Kayu Api pada Masa Pandemi Covid-19

Selain sebagai strategi mengatasi kelangkaan, tentu hal ini sebagai bentuk penghematan. Berkurangnya penghasilan pada sebagian besar masyarakat perbatasan membuat mereka harus beradaptasi dengan keadaan baru yang mereka jalani. Dalam wawancara dengan seorang tukang ojek juga, terungkap bahwa berkurangnya penghasilan telah membuat keluarga untuk mengambil sebagai dari tabungan mereka. Selain itu, juga telah dilakukan pengurangan konsumsi makanan dan minuman yang disesuaikan dengan penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil ojek setiap harinya.

*Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya, Jagad Aditya Dewantara*

*Strategi Adaptasi Ekonomi Pengerajin dan Tukang Ojek pada masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi*

### 3.3. *Beralih Pekerjaan Lain*

Kehilangan pekerjaan bukanlah hal yang mudah dijalani, oleh karena itu diperlukan pekerjaan alternatif sebagai strategi untuk bertahan hidup di saat pandemi ataupun disaat-saat sulit lainnya. Masyarakat di Desa Jagoi yang menerima dampak dari kebijakan *border closer* telah melakukan alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Diantara mereka ada yang memilih menjadi buruh bangunan, buruh kebun sawit dan juga ada yang berkebun dan berladang.

Kami dulu ngojek di sini, sekitar 100-an orang yang punya motor dan jadi anggota, punya kartu anggota juga. Kalo tidak punya kartu anggota, tidak boleh ngojek di sini. Sejak pemerintah Malaysia menutup perbatasan, kami jadi seperti ini. Dudu-duduk saja, sambil menunggu-nunggu. Kadang hanya 2 jam saja di sini karena tidak ada orang, terus pulang, ikut ke kebun sawit berkuli. Kalo teman-teman yang lain, pandai-pandailah cari-cari kerjaan yang penting bisa makanlah. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang bekerja di kebun sawit orang, ada yang ke ladang (Amat (L/tukang ojek). Jagoi, 1 Juli 2020).

Beralih menjadi buruh bangunan nampaknya satu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dewasa. Dalam wawancara dengan tiga orang tukang ojek yang kami temui, mereka mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih untuk menjadi buruh bangunan di sekitar Desa Jagoi. Menjadi buruh bangunan memang menjadi alternatif yang dapat mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga. Sementara kaum wanita lebih banyak beralih menjadi buruh sawit dan juga ke kebun atau berladang. Saat kami berada di lokasi penelitian, kami melihat ibu-ibu yang sedang pulang dari kebun sawit. Dalam penuturan warga yang kami jumpai, diungkapkan bahwa ibu-ibu tersebut, telah bekerja pada satu pemilik kebun sawit. Pekerjaan mereka umumnya membersihkan kebun dan juga memupuk pokok sawit.

### 3.4. *Meminta Bantuan Kerabat*

Masyarakat perbatasan memiliki modal Sosial berupa ikatan kekerabatan yang menjadikan mereka saling terikat satu sama lain (Efriani et al., 2020). Umumnya ikatan kekerabatan di daerah perbatasan tidak hanya bersifat biologis namun juga bersifat sosial. Sistem kekerabatan ini menghasilkan interaksi sosial yang bersifat asosiatif karena dibangun atas dasar *trust* (kepercayaan) di antara mereka. Hal yang serupa dapat kita amati pada orang Jagoi di Desa Jagoi dan orang Jagoi di Distrik Bau-Bau di Sarawak Malaysia.

Orang Jagoi yang tersebar di Desa Jagoi dan sekitarnya, memiliki ikatan kekerabatan dengan orang Jagoi yang menempati bagian distrik Bau-Bau di Malaysia. Batas negara tidak pernah menghapus fakta kultural ini. Oleh karena itu, mereka hidup dalam satu ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang tampak pada ikatan emosi yang mereka miliki. Jika ada anggota kerabat yang sakit atau tertimpa kemalangan, mereka akan saling mengunjungi tanpa mempedulikan kewarga-negaraannya (Suwartiningsih, et al., 2018).

Orang Jagoi ini asalnya dari Bukit Jagoi, di Malaysia sana. Jadi kita 1 nenek moyang dengan orang Jagoi Malaysia. Makanya saya punya saudara di sana. Kita sekarang tidak bisa pergi ke Serikin, jadi kita pesan saja dengan saudara yang di Bau-Bau, mereka yang belanja untuk kita, nanti kita pergi ke batas untuk ambil pesanan kita. Kalo saya biasanya nitip beli obat, juga belanja untuk popok anak-anak ini. (Nogen (L/pengrajin). Jagoi, 1 Juli 2020).

Pada masa pandemi Covid-19, hal ini menjadi satu alternatif dalam menghadapi kebijakan *border closeres*. Masyarakat Jagoi Babang memang sudah tidak bisa lagi pergi ke Serikin walaupun hanya untuk kunjungan keluarga apalagi berbelanja dan berobat. Namun ikatan kekeluargaan menjadi alternatif bagi mereka untuk dapat saling menolong dimasa pandemi. Hal yang mereka lakukan ialah,

dengan menitip barang belanjaan dengan keluarga mereka yang di Bau-Bau, untuk kemudian dikirim kembali Jagoi Babang. Umumnya yang mereka pesan atau titip terutama perlengkapan bayi, seperti popok dan juga obat-obatan. Selain itu, mereka juga bisa menitip belanja kebutuhan harian namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam penutupan TNI yang bertugas di perbatasan, bahwa selama dilakukan penutupan, belum pernah terjadi pelanggaran. Terdapat beberapa orang Jagoi yang menitipkan belanja kepada kerabat di Malaysia, dan mereka bertemu di perbatasan. Oleh karena itu, biasanya mereka mengirim uangan atau barang, untuk kemudian memesan beberapa kebutuhan dan mereka bertemu langsung di perlintasan perbatasan.

#### 4. Kesimpulan

Pandemi yang masih berlanjut, memaksa orang untuk mengubah kebiasaan sosial dan ekonomi serta menyesuaikan dengan keadaan baru yang sedang terjadi. Mempertahankan kesejahteraan ekonomi menuntut masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mengubah pola-pola yang biasanya mereka lakoni, menjadi pola-pola yang baru. Adaptasi ekonomi telah menjadi satu strategi bertahan hidup (*survival mechanis*) serta menjadi solusi dalam mengatasi kerumitan ekonomi keluarga pada masa pandemi.

Studi ini telah menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perbatasan antar negara Indonesia-Malaysia, memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat dengan kondisi ekonomi yang mereka terima sebagai bagian dari kebijakan penutupan perlintasan perbatasan. Kemampuan orang Jagoi untuk beradaptasi dengannya telah menjelaskan karakter kritis dari masyarakat yang adaptif. Hal ini terwujud dalam 4 strategi survive yang tampak pada orang Jagoi, yakni beralih ke produk dalam negeri, menciptakan alternatif hidup hemat, beralih pekerjaan lain, dan meminta bantuan kerabat di Malaysia.

Dari 4 stategi survive tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 bentuk adaptasi ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat perbatasan, yakni adaptasi material dan adaptasi nonmaterial. Adaptasi materi yakni perubahan konsumsi produk, yang kini telah beralih pada produk-produk dalam negeri, sementara adaptasi nonmaterial ialah pengetahuan ekonomi, keterampilan dan jaringan sosio-kultural. Dengan demikian, nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat, telah memungkinkan masyarakat perbatasan bertahan dan beradaptasi terhadap kebijakan penutupan perbatasan (*border closures*).

#### 5. Saran

Studi ini telah menunjukkan proses dan bentuk adaptasi sosial-ekonomi yang dapat pula diadopsi oleh berbagai kalangan masyarakat guna mengatasi kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Mengetahui berbagai bentuk adaptasi dan strategi yang dikembangkan oleh masyarakat memungkinkan untuk memperbaiki kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah terkait dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang ekonomi dan ketahanan pangan menjadi bagian yang perlu segera diberikan kepada masyarakat di daerah perbatasan. Pemerintah atau instansi terkait, dapat pula mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pada pengetahuan ekonomi, keterampilan dan jaringan sosio-kultural yang menjadi modal sosial-budaya pada masyarakat. Peningkatan ekonomi berbasis komunitas juga baik dikembangkan guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat (*community resilience*).

**Ucapan terimakasih:** . Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami juga sampaikan kepada Ibu Camat Jagoi Babang beserta jajaran, Kapolsek Jagoi Babang beserta jajaran, kepala Desa Jagoi beserta

jajaran. Terima kasih kepada pimpinan Puskesmas Jagoi Babang beserta seluruh petugas kesehatan. Terima kasih kami sampaikan kepada Satgas Covid-19 di Desa Jagoi yang telah memberikan izin dan memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih kepada Ketua Koperasi Produsen Bung Topui Labak Luag, beserta seluruh informan, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Azimah, R. N., Khasanah, I. N., Pratama, R., Azizah, Z., Ferbriantoro, W., Rifda, S., & Purnomo, S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri. *Empati: Jurna Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59–68. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
- Efriani, E., Hasanah, H., & Bayuardi, G. (2020). Kinship of Bidayuh Dayak Ethnic at the Border of Entikong-Indonesia and Tebedu-Malaysia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(1), 136. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i1.8300>
- El Zowalaty, M. E., Young, S. G., & Järhult, J. D. (2020). Environmental impact of the COVID-19 pandemic—a lesson for the future. *Infection Ecology and Epidemiology*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/20008686.2020.1768023>
- Fathy, R. (2018). Modal Sosial Ojek Pangkalan : Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi Publik1 Social. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(2), 191–210.
- Glover, R. E., van Schalkwyk, M. C., Akl, E. A., Kristjansson, E., Lotfi, T., Petkovic, J., ... Welch, V. (2020). A framework for identifying and mitigating the equity harms of COVID-19 policy interventions. *Journal of Clinical Epidemiology*. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.06.004>
- Gong, B., Zhang, S., Yuan, L., & Chen, K. Z. (2020). A balance act: minimizing economic loss while controlling novel coronavirus pneumonia. *Journal of Chinese Governance*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1741940>
- Hadiwardoyo, W. (200AD). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Edupsycouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Hanta, H. (2020). *Strategi Bertahan Hidup Karyawan Korban PHK PT Hair Star Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di tangan pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 89–98.
- Henning-Smith, C. (2020). The Unique Impact of COVID-19 on Older Adults in Rural Areas. *Journal of Aging & Social Policy*, 00(00), 1–7. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1770036>
- Herlan, Efriani, Sikwan, A., Hasanah, Bayuardi, G., Listiani, E. I., & Yulianti. (2020). Keterlibatan Akademisi Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Melalui Aksi Berbagai Sembako. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(2), 267–277.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi. *Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.*, (2020).
- Kholis, M. N., Fraternali, & Wahidin, L. O. (2020). Prediksi Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu. *Albacore*, 4(1), 1–11.
- Lantri, D., Gunawan, W., & Yunita, D. (2017). Fenomena Ojek Didalam Kampus Universitas Padjadjaran dan Relasi Sosial yang Terbangun di Dalamnya. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13308>

*Dahniar Th. Musa, Efriani, Donatianus BSE. Praptantya, Jagad Aditya Dewantara  
Strategi Adaptasi Ekonomi Pengerajin dan Tukang Ojek pada masa Kebijakan Penutupan Perbatasan di Desa Jagoi*

- Lopez, A. D., Mathers, C. D., Ezzati, M., Jamison, D. T., & Murray, C. J. (2006). Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. *Lancet*, 367(9524), 1747–1757. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68770-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68770-9)
- Manzilati, S. P. M. A. (2018). Identifikasi modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten semarang. *Sosio Konsepsia*, 8(01), 14–29.
- Medeiros, E., Guillermo Ramírez, M., Ocskay, G., & Peyrony, J. (2020). Covidfencing effects on cross-border deterritorialism: the case of Europe. *European Planning Studies*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1818185>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.*, (2020).
- Michie, J. (2020). The Covid-19 Crisis-and the Future of the Economy and Economics. *International Review of Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/02692170210136091>
- Mufizar, Arkanudin, & Achyar, M. S. (2012). Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sanjingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal PMIS*, 1–22.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 240–252.
- Niranjana, T. (2020). Pandemic musings in inter-Asia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 21(3), 476–481. <https://doi.org/10.1080/14649373.2020.1802144>
- Radil, S. M., Castan Pinos, J., & Ptak, T. (2020). Borders resurgent: towards a post-Covid-19 global border regime? *Space and Polity*, 0(0), 1–9. <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1773254>
- Sakri, D. (2020). *Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah*. 1–10.
- Samputra, L. A. P. L. (2020). Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 113–131.
- Scott, J. C. (1983). *Moral Ekonomi Petani: pergolakan dan subsistensi di AsiaTenggar*. Jakarta: LP3ES.
- Sharma, M., Luthra, S., Joshi, S., & Kumar, A. (2020). Developing a framework for enhancing survivability of sustainable supply chains during and post-COVID-19 pandemic. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1810213>
- Soewarsono. (2005). Karakteristik Historis Daerah Perbatasan Kalimantan Barat. In Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (Ed.), *Dari Entikong sampai Nunukan : Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah)* (1st ed., pp. 1–16). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudiman, Fahrudin, W. A., Taufik, Subarman, K., & Taufik, A. (2020). Sosialisasi Strategi Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Produktivitas Pasca Pandemi Virus Covid19. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 435–438.
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. In *Jurnal Hubungan Internasional* (Vol. 7). <https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Tirtosudarmo, R. (2014). Kalimantan Barat sebagai ‘Daerah Perbatasan’: Sebuah Tinjauan Demografi-Politik. *Antropologi Indonesia*, 0(67), 30–45. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3427>
- Vidya, C. T., & Prabheesh, K. P. (2020). Implications of COVID-19 Pandemic on the Global Trade Networks. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2408–2421. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785426>
- Wuryandani, D. (2020). Dampak Pandemi Civid-19 terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII(15), 19–24.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. 4(September), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

- Yulastin, T. (2018). Strategi Adaptasi Tukang Ojek dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup di Kecamatan Tampan. *JOM Fisip*, 5(1), 1–15.
- Yunus, M. (2018). Go-Jek Sebagai Simbol Perubahan Sosial Dan Ekonomi Di Kota Tegal. *EQUILIBRIA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 59. <https://doi.org/10.26877/ep.v2i2.2133>
- Zuhdi, A. (2018). *Eksistensi Pangkalan Ojek di Tengah Adanya Ojek Onlone Pespektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pada Ojek Pangkalan di Purwokerto)* (Institu Agama Islam Negeri Purwokerto).



## Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

Arin Wahyuni<sup>1\*</sup> , Rima Vien Permata Hartanto<sup>1</sup> , Muhammad Hendri Nuryadi<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia

\* Korespondensi: [arin25@student.uns.ac.id](mailto:arin25@student.uns.ac.id); Tel: +62-8572-905-7271

Diterima: 28 januari 2021; Disetujui: 18 Januari 2022; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telantar melalui Program Griya Peduli PMI Kota Surakarta. Kajian disusun dengan pendekatan kualitatif; Lokasi di Kota Surakarta; Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen; Informan dipilih secara *purposive sampling*; Informan terdiri dari 13 orang yakni pimpinan PMI Kota Surakarta, kepala seksi, dokter, perawat, bagaian instalasi gizi, bagian umum, bagian sanitasi, relawan dan ODGJ yang kooperatif; Observasi melihat kondisi shelter perawatan ODGJ; Telaah dokumen data pelaksanaan kegiatan keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui lima tahap yakni pendekatan awal melalui upaya turun ke jalan mencari ODGJ, asesmen melalui identifikasi gejala objektif, persiapan intervensi melalui pemisahan ODGJ yang kooperatif dengan yang nonkooperatif, intervensi melalui pemenuhan kebutuhan dasar; sandang; shelter; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik; bimbingan mental spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan sehari-hari; fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta resosialisasi melalui pemulangan ODGJ yang sudah ditemukan atau mengingat keluarganya. Hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial berupa terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan bagi ODGJ telantar yang baru saja bergabung ke program. Selain itu kondisi *shelter* ODGJ perempuan kurang memadai karena akses cahaya matahari yang kurang. Kesimpulan, rehabilitasi sosial yang dilaksanakan merupakan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI & Dinas Sosial Kota Surakarta untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses kesehatan melalui KIS kepada ODGJ telantar yang direhabilitasi di LKS Griya PMI Kota Surakarta.

**Kata Kunci:** orang dengan gangguan jiwa telantar, program griya peduli, rehabilitasi sosial

*Abstract: This study aims to describe the implementation of social rehabilitation for homeless people with mental illness through the Griya Peduli Program in Surakarta. The study is structured with a qualitative approach; Location in Surakarta; Data is collected through interviews, observations and document studies; Informants were selected by purposive sampling; The informants consisted of 13 people, namely PMI Surakarta leaders, section heads, doctors, nurses, the nutrition installation section, the general section, the sanitation section, volunteers and cooperative ODGJ; Observation to see the condition of the ODGJ care shelter; Review the data document on the implementation of skills activities. The results showed that social rehabilitation was carried out in five stages, namely the initial approach through efforts to find ODGJ, assessment through identification of objective symptoms, preparation for intervention through separation of cooperative and non-cooperative ODGJ, intervention through fulfillment of basic needs; clothing; shelters; device; medical supplies; physical guidance; mental spiritual and social guidance; daily skills guidance; facilities for making resident identification numbers; access to basic education and health services, and resocialization through the repatriation of ODGJ who have been found or remember their families. Barriers to the implementation of social rehabilitation in the form of limited access to health facilities for abandoned ODGJ who have just joined the program. In addition, the condition of the shelter for women with ODGJ is inadequate due to lack of access to sunlight. In conclusion, the social rehabilitation carried out is basic social rehabilitation in the orphanage. Recommendations to the Indonesian Ministry of Social Affairs & the Surakarta City Social Service to provide support and ease of access to health through KIS for abandoned ODGJ being rehabilitated at LKS Griya PMI Surakarta.*

*Keywords: homeless people with mental illness, griya peduli program, social rehabilitation*

## 1. Pendahuluan

Gangguan jiwa merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Perpektif bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah “orang gila” harus dihilangkan ditambah pelanggaran, isolasi dan perilaku kasar lainnya seperti pemasangan dan penelantaran turut memperburuk kondisi ODGJ (Ulya, 2019). Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan terdapat kenaikan penderita gangguan jiwa di Indonesia tahun 2013-2018 dimana prevalensi rumah tangga yang memiliki penderita skizofrenia di rumah yaitu 7 permil yang berarti 1.000 rumah tangga terdapat 7 ODGJ sehingga diperkirakan ada sekitar 450 ribu ODGJ berat (Kemenkes RI, 2018). Sementara itu prevelensi gangguan jiwa berat di Jawa Tengah berada pada angka 8,7 permil. Data ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah termasuk provinsi yang memiliki ODGJ cukup banyak secara nasional.

Data tersebut selaras dengan prevalensi anggota rumah tangga gangguan jiwa psikosis/skizofrenia di Kota Surakarta yang mencapai angka 1,30 permil (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018). Banyaknya ODGJ secara lokal maupun nasional tersebut belum tentu mendapatkan penanganan secara komperhensif karena latar belakang yang bervariasi. ODGJ dengan segala kondisi disabilitasnya tentu sangat rentan dengan perlakuan diskriminasi apalagi jika ODGJ berada pada kondisi telantar.

Persentase ODGJ yang tidak telantar di Indonesia sebesar 36,48 persen. Jumlah tersebut relatif sedikit karena masih terdapat sisa 63,52 persen ODGJ telantar yang tersebar di seluruh Indonesia (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019). Pada tahun 2019, besaran penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan di Kota Surakarta berkisar 55,65 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019). Meskipun angka ini tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah namun hal ini masih perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat masih terdapat sisa 44,05 persen ODGJ yang tidak mendapatkan pengobatan dan telantar. ODGJ telantar tersebut dipastikan fungsi berpikirnya terganggu sehingga tidak mampu menjalani kehidupan dengan produktif yang berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan sosial. Pada dasarnya kesejahteraan sosial bagi ODGJ telantar dapat diupayakan melalui rehabilitasi sosial.

Sejauh ini studi yang membahas tentang rehabilitasi sosial antara lain, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental atas inisiasi Dinas Sosial (Murni & Astuti, 2015), pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa (Ismawati & Hartanto, 2018), rehabilitasi sosial gelandangan psikotik berbasis masyarakat (Karnadi & Kundarto, 2014), rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di panti sosial (Naibaho et al., 2015), hasil klinis dan rehabilitasi pasien disabilitas mental telantar melalui program *Know the Unknown* di India (Gowda et al., 2017). Adapun studi tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) antara lain tulisan tentang stigmatisasi dan kekerasan terhadap ODGJ (Subu' et al., 2016), kondisi ODGJ pasung beserta keluarga dan masyarakat lingkungannya (Astuti, 2017), pengalaman penderita skizofrenia tentang halusinasi (S, 2013), bimbingan konseling untuk menangani pasien skizofrenia (Uzlifah, 2019), pengembangan kualitas hidup pasien skizofrenia melalui rehabilitasi berbasis masyarakat (Puspitosari et al., 2019).

Sejauh ini banyak studi membahas rehabilitasi sosial yang menangani penyandang disabilitas daksa maupun mental di lingkungan rumah sakit maupun panti khusus milik pemerintah. Namun secara spesifik belum dibahas rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas mental atau ODGJ telantar yang diselenggarakan oleh lembaga swasta seperti Palang Merah Indonesia (PMI). Padahal sejak 2012, PMI Kota Surakarta secara mandiri telah melaksanakan program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk ODGJ telantar. ODGJ telantar ini penting untuk diteliti karena mereka adalah warga negara kelompok rentan yang kondisinya perlu diakomodasi oleh negara. Kajian ini berupaya untuk melengkapi studi tentang rehabilitasi sosial yang selama ini sudah dilaksanakan. Dengan demikian maka akan diperoleh informasi yang komperhensif tentang pelaksanaan program rehabilitasi sosial baik yang ditujukan bagi ODGJ dengan pendampingan keluarga maupun ODGJ telantar. Selain itu,

*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

kajian ini penting untuk dilakukan agar upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga swasta terhadap ODGJ telantar dapat memberikan informasi kepada pihak terkait sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial ke depan lebih baik.

Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Kota Surakarta. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telantar melalui Program Griya Peduli PMI Kota Surakarta.

### **1.1. Konsep Rehabilitasi Sosial**

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat 1 dinyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat.

Rehabilitasi sosial terdiri atas rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut (Pasal 9 Permensos No. 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial). Lebih lanjut rehabilitasi sosial dasar diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar maupun gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi sosial dasar tersebut dapat dilaksanakan di dalam panti sosial oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). LKS adalah perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Salah satu LKS yang ikut serta melaksanakan rehabilitasi sosial dasar adalah LKS Griya Peduli yang diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta untuk menangani penyandang disabilitas mental telantar di wilayah Kota Surakarta.

Penyandang disabilitas telantar yang mengikuti rehabilitasi sosial dasar harus mendapatkan kebutuhan dasar yang layak seperti permukiman, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual dan sosial, bimbingan keterampilan sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga dan atau pelayanan reunifikasi keluarga (Pasal 22 Permensos No. 16 Tahun 2019). Tahapan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan langkah pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut (Pasal 7 Permensos No. 16 Tahun 2019).

Sedangkan bentuk rehabilitasi sosial dapat berupa kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan (Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa). Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial maupun penyuluh sosial (Pasal 42 Permensos No. 16 Tahun 2019). Sumber daya manusia yang melaksanakan rehabilitasi sosial perlu menerapkan etika dalam pekerjaan sosial. Menurut NASW (*National Association of Social Worker*) antara lain pelayanan, keadilan sosial, harkat dan martabat manusia, mementingkan hubungan kemanusiaan, integritas, kompetensi, serta kerahasiaan.

Tulisan ini akan menguraikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas telantar khususnya disabilitas mental (skizofrenia) yang diinisiasi oleh lembaga swasta yakni PMI Kota Surakarta melalui pembentukan LKS Griya Peduli. Hal ini menjadi unik karena penggagas program merupakan lembaga swasta namun upaya konkrit untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar diwujudkan dengan penyelenggaraan LKS yang pada dasarnya berdiri atas izin Dinas Sosial Kota Surakarta selaku lembaga pemerintah.

### **1.2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Telantar**

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki gangguan jiwa. Menurut Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, ODGJ

*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. ODGJ juga identik dengan istilah penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental terbagi menjadi dua yakni psikososial dan disabilitas perkembangan (UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Psikososial di antaranya adalah skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas perkembangan yang dimaksud adalah autisme maupun hiperaktif.

Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kompleks ketika seseorang kesulitan dalam proses berpikir sehingga menimbulkan halusinasi, delusi dan gangguan berpikir (Andari, 2017). Dengan demikian maka penderita skizofrenia akan menarik diri dari orang lain dan masuk ke dalam dunia fantasi. Halusinasi dimulai dengan aktivitas memikirkan suatu masalah yang dialami oleh penderita, masalah tersebut dapat memunculkan halusinasi, proses halusinasi terjadi secara bertahap, dan proses dari pencetus sampai munculnya halusinasi terjadi dalam waktu yang singkat (S, 2013). Halusinasi dapat dicegah dengan pendekatan spiritual, penggunaan koping yang konstruktif, dan menghindari kesendirian. Penderita skizofrenia dengan halusinasi yang masih kuat dapat berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ODGJ akan tampil dalam kondisi gaduh, gelisah, sehingga beresiko melakukan kekerasan (Yazfinedi, 2018). Penanganan skizofrenia membutuhkan dukungan dari keluarga maupun wali pendamping untuk membantu mengembalikan keberfungsian sosial. Kurangnya dukungan dari keluarga akan berdampak pada penundaan dan keterlambatan mencari bantuan ke pelayanan kesehatan (Nasriati, 2017).

Depresi adalah salah satu jenis disabilitas mental yang sering tidak disadari baik oleh penderitanya maupun orang-orang di sekitar penderitanya. Banyak orang yang menganggap gangguan depresi adalah masalah yang berkaitan dengan keimanan dan tidak memerlukan bantuan profesional untuk mengatasinya. Depresi dapat diartikan sebagai gangguan emosional yang ditandai perasaan tertekan, bersalah, kesedihan, kehilangan minat, serta menarik diri dari lingkungan sehingga memengaruhi hubungan interpersonal (Sulistiyorini & Sabarisman, 2017). Tanda seseorang mengalami depresi antara lain murung, gelisah, mudah marah, hilang konsentrasi bahkan bisa memengaruhi daya tahan seseorang. Depresi merupakan reaksi normal jika berlangsung sebentar dan ditangani profesional namun apabila dibiarkan maka akan menjadi gangguan jiwa bahkan dapat memicu percobaan bunuh diri.

Gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang kaku yang menyebabkan disfungsi yang bermakna dan penderitaan subjektif (Sari & Ramadhian, 2016). Orang dengan gangguan kepribadian memiliki respon yang sangat kaku terhadap keadaan pribadi, hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya sehingga menghalangi penderitanya untuk menyesuaikan diri dan berakhir dengan sifat *self defeating*.

Gangguan kejiwaan yang diderita oleh seseorang dapat menyebabkan kondisinya telantar. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma negatif dan dukungan yang rendah terhadap ODGJ (Nasriati, 2017). Konsep telantar menurut Permensos No. 16 Tahun 2019 adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat serta tidak terurus. Adapun ODGJ telantar adalah seseorang yang tidak terurus kondisinya dan biasanya tinggal di jalan atau tempat lain yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia (Llerena et al., 2018). ODGJ sebagai penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan jaminan sosial khususnya layanan kesehatan yang mudah diakses (Hidayatullah & Pranowo, 2018).

Keberadaan ODGJ telantar pada dasarnya dijamin oleh negara salah satunya melalui Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2014 bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ telantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum". Namun karena banyaknya permasalahan ODGJ maka peran serta masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu artikel ini bermaksud mendeskripsikan penanganan ODGJ telantar khususnya penderita skizofrenia di Kota Surakarta melalui Program Griya Peduli yang tidak lain adalah program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PMI Kota Surakarta.

Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada tahun 2020 di PMI Kota Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan terdiri dari 13 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan PMI Kota Surakarta, 1 orang dokter penanggungjawab, 1 orang kepala seksi, 2 orang perawat, 2 orang bagian instalasi gizi, 1 orang bagian sanitasi, 1 orang bagian umum, 2 orang relawan, dan 2 orang ODGJ yang kooperatif. Untuk memperkuat validitas data, diadakan triangulasi sumber dan teknik. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## 3. Hasil

### 3.1. Deskripsi Umum

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta adalah organisasi kepalangmerahan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Secara struktur PMI Kota Surakarta terdiri dari pengurus yang membawahi dua eksekutif yakni Unit Donor Darah (UDD) dan markas. UDD menangani masalah khusus darah sedangkan markas membawahi beberapa bagian yakni bagian pelayanan kesehatan, bagian pengembangan sumber daya, bagian pelayanan sosial dan bagian penanggulangan bencana. Pada bagian pelayanan sosial inilah program rehabilitasi sosial bagi ODGJ telantar yang bernama Program Griya Peduli diselenggarakan. Pada awal pelaksanaannya lembaga yang menaungi Program Griya Peduli dinamakan sebagai Griya PMI Peduli. Pada tahun 2019 nama Griya PMI Peduli secara resmi berubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Griya Peduli melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Nomor: 460/4979/ORSOS/2019. Pendanaan Program Griya Peduli ini berasal dari donatur dan dana internal PMI. Selain itu pemerintah provinsi ikut serta mendukung dengan memberikan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan ODGJ yang dirawat meskipun dukungan ini belum bersifat rutin.

### 3.2. Sumber Daya Manusia yang Terlibat

Program Griya Peduli dilaksanakan oleh 19 sumber daya manusia yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang kepala seksi, 4 orang asisten paramedis, 5 orang perawat, 3 orang bagian instalasi gizi, 3 orang bagian umum serta 2 orang bagian sanitasi. Petugas yang merawat ODGJ telantar memiliki kualifikasi sebagai lulusan kesehatan, administrasi dan umum dimana perawat harus memiliki sertifikat *Basic Training Cardiac Live Support* (BTCLS) dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan. Pelaksanaan program ini juga menggandeng mitra yakni Griya Schizofren, Ustadz Peruqiyah dari Pondok Ngruki, SIBAT dan YPAC. Griya Skizofren merupakan mitra yang membantu adanya terapi seperti terapi mendongeng dan terapi menggambar. Sedangkan Ustadz Peruqiyah dari Pondok Ngruki adalah mitra yang membantu pelaksanaan terapi ruqiyah. Sedangkan SIBAT dan YPAC merupakan mitra yang membantu pelaksanaan pengembangan keterampilan.

### 3.3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat

Sejak tahun 2012 sampai dengan Juni 2020, total ODGJ yang dibina mencapai 820 orang yang meliputi ODGJ yang pulang, lari, meninggal, dan masih ada. Selain itu ada ODGJ yang pada akhirnya dibina oleh panti khusus ODGJ di luar Kota Surakarta.

**Tabel 1.** Jumlah ODGJ yang dirawat di LKS Griya Peduli Berdasarkan Kondisi Tahun 2012-2020

Kondisi ODGJ	Jumlah
ODGJ Pulang	471
ODGJ Lari	73
ODGJ Meninggal	166
ODGJ Ada	103
ODGJ di Wanita Utama	3
ODGJ di RSJD	1
ODGJ di Panti Jombang	3
Total	820

(Sumber: Dokumentasi, diolah, 2020)

ODGJ telantar yang dibina kemudian sembuh kemudian dipulangkan atau dijemput oleh keluarga. Perlu diketahui bahwa ODGJ telantar yang dibina di LKS Griya Peduli kebanyakan tidak ingat dari mana mereka berasal sehingga mereka akan tetap tinggal di LKS Griya Peduli sampai ODGJ tersebut ingat atau dijemput keluarganya.

Data terakhir pada bulan September 2020 jumlah ODGJ yang dibina di LKS Griya Peduli mencapai 100 orang dengan rincian 63 laki-laki dan 37 perempuan. ODGJ yang dirawat terdiri dari ODGJ lama dan baru. ODGJ lama dan baru memiliki perbedaan. ODGJ lama sudah tinggal lebih dari satu tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) sedangkan ODGJ baru belum memiliki karena keberadaannya di LKS Griya Peduli belum ada satu tahun.

LKS Griya Peduli sebagai rumah yang membina ODGJ tidak serta merta merawat semua ODGJ di Kota Surakarta. Ada beberapa syarat yang menjadi indikasi ODGJ dapat dibina di LKS Griya Peduli:

1. ODGJ telantar
2. ODGJ yang tidak ingat siapa keluarganya
3. ODGJ yang ditemukan di wilayah Surakarta
4. Jika ada ODGJ yang akan dititipkan ke LKS Griya Peduli maka akan disurvei terlebih dahulu, jika keadaan keluarga ODGJ mampu maka akan dikenakan donasi untuk subsidi silang namun jika tidak mampu maka keluarga ODGJ tidak dipungut biaya. Meskipun menerima ODGJ titipan dari keluarga namun pihak PMI Kota Surakarta berupaya mengedukasi agar masyarakat mau merawat ODGJ secara mandiri
5. Pada masa pandemi Covid-19 ini jika ada ODGJ baru maka wajib memiliki hasil *rapid test* nonreaktif

#### **3.4. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Program Griya Peduli**

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PMI Kota Surakarta terdiri dari lima tahap yakni pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, dan resosialisasi.

##### **34.1. Pendekatan awal**

Pada tahap ini dilaksanakan upaya untuk “mendapatkan” ODGJ karena pada dasarnya sasaran Program Griya Peduli adalah ODGJ telantar sehingga pada tahap ini ODGJ yang akan didatangi oleh petugas melalui kerja sama dengan Satpol PP Kota Surakarta dan rumah sakit mitra.

##### **34.2. Asesmen**

Pada tahap asesmen petugas mengidentifikasi kondisi ODGJ. Asesmen dilaksanakan dengan identifikasi terhadap ODGJ seperti data diri dan rekam medis yang berasal dari rumah sakit mitra. ODGJ telantar jika ditemukan dalam kondisi yang memerlukan penanganan medis segera maka akan dibawa ke rumah sakit mitra baru setelah kondisi stabil akan dirawat di LKS Griya Peduli.

*Kalau pas dateng itu kita sebisa mungkin posisi pasien ini sudah bagus entah dalam segi emosionalnya juga sudah stabil, dari segi fisiknya juga kita usahakan jangan sampai ada perawatan yang intensif gitu di kita. Jadi memang dari Satpol PP memang kita minta kalau si pasien betul-betul membutuhkan pertolongan pertama ya silahkan dibawa ke rumah sakit dulu. Lha paling nanti kalau ada perawatan biasanya perawatan luka sih yang sering. Jadi misal dari rumah sakit, itu sudah dapet pertolongan pertama dari sana pulang jadi sudah medikasi cuma perawatan luka. Dari rumah sakit kan tahu diagnosa nya seperti apa, oh dia punya penyakit semisal hepatitis. Jadi pasien datang kesini kita sudah tahu rekam medisnya seperti apa gitu, sebisa mungkin seperti itu sih yang telantar lho ya (Wawancara dengan Y tanggal 22 Juni 2020).*

Asesmen yang dilakukan cukup terbatas karena kondisi ODGJ telantar yang seringkali tidak mengingat rekam medis atau keluhan-keluhan yang dialami sebelumnya dan tidak ada wali yang dapat dimintai keterangan sehingga gejala subjektif tidak dapat diketahui. Dengan demikian maka asesmen hanya dilaksanakan berdasarkan gejala objektif, yakni perilaku yang nampak sebagai ciri khas seseorang yang memiliki gangguan jiwa.

##### **34.3. Penyusunan rencana intervensi**

Penyusunan rencana intervensi dilakukan setelah memastikan bahwa ODGJ telantar dalam kondisi stabil, tidak sedang membutuhkan perawatan medis darurat dan siap dirawat di LKS Griya Peduli. Rencana intervensi dilaksanakan dengan melihat kondisi ODGJ telantar, jika

*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

kooperatif akan ditempatkan pada *shelter* umum namun jika kondisi kurang kooperatif akan ditempatkan di *shelter* isolasi.

#### 34.4. Intervensi

Tahap selanjutnya adalah intervensi yang berisi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi ODGJ telantar. Pertama adalah permakanaan, ODGJ telantar mendapatkan pemenuhan nutrisi dari makanan dan minuman yang disediakan. Pada observasi tanggal 21 Februari nampak dilaksanakan kegiatan makan bubur kacang hijau dan buah. Informasi dikuatkan dengan pernyataan oleh dokter penanggung jawab LKS Griya Peduli.

*Gini lho kalau kita makan itu yang baik seperti ini. Karbohidrat, serat, proteinnya, kemudian vitamin mineralnya. Jadi memang dari awal kita sudah menerapkan itu, kemudian kalau untuk bagi susu, kacang hijau itu seminggu sekali. Misal susu hari minggu, kacang hijau hari jumat (Wawancara dengan F tanggal 25 Juni 2020).*

Kedua adalah sandang, pemenuhan kebutuhan sandang bagi ODGJ yang dirawat berasal dari para donatur yang menyumbangkan pakaian bekas layak pakai dan relawan yang berinisiatif membuat seragam khusus.

Ketiga adalah asrama yang mudah diakses, berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Februari nampak bahwa kondisi asrama/*shelter* yang digunakan untuk ODGJ laki-laki dan perempuan berbeda namun memiliki akses yang mudah. *Shelter* untuk ODGJ perempuan berada di tempat lebih rendah dan tidak mendapatkan akses cahaya matahari yang cukup sehingga terasa lembab dan agak berbau. Sedangkan *shelter* yang diperuntukkan untuk ODGJ laki-laki berada pada tempat yang lebih tinggi sehingga akses cahaya matahari lebih optimal dan kawasan *shelter* tidak lembab. Selain itu untuk fasilitas mandi, cuci, dan kakus sudah tersedia di setiap *shelter*.

Keempat adalah alat bantu, pemenuhan alat bantu untuk ODGJ secara khusus belum ada, sejauh ini terdapat mekanisme pengambilan air minum yang bisa langsung diakses dari *shelter* sehingga memudahkan ODGJ jika merasa haus.

Kelima adalah perbekalan kesehatan. Perbekalan kesehatan dilaksanakan dengan pemberian nasihat tentang kesehatan saat dokter penanggung jawab melaksanakan kegiatan kunjungan ke *shelter* untuk menanyakan kondisi yang dirasakan oleh ODGJ. Selain itu perbekalan kesehatan juga diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan *check up* rutin dengan dokter spesialis jiwa di rumah sakit.

Keenam adalah bimbingan fisik, bimbingan fisik dilaksanakan dengan bentuk aktivitas senam sehat dan jalan sehat. Kegiatan senam sehat dilaksanakan seminggu dua kali dengan mekanisme satu kali senam untuk ODGJ perempuan dan satu kali senam untuk ODGJ laki-laki. Senam sehat dilaksanakan di halaman depan LKS Griya Peduli. Senam sehat yang dilakukan untuk ODGJ ini tidak berbeda jauh dengan senam pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen pencatatan kegiatan senam di LKS Griya Peduli pada bulan Januari 2019-Juni 2020. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa setiap kegiatan senam memiliki gerakan yang berbeda-beda. Misalnya pada kegiatan senam tanggal 26 Mei 2020, dimana sebanyak 15 ODGJ perempuan mengikuti senam sehat yang dimulai dari pukul 8.30. Gerakan yang dilakukan yakni ODGJ perempuan mengikuti senam pagi dengan mengikuti gerakan instruktur senam selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan memegang bola ke atas tekuk badan ke kanan dan ke kiri lalu jalan memantulkan bola ke tanah sesuai jarak. Sedangkan aktivitas jalan sehat biasanya dilaksanakan pada akhir pekan.

*Selain makan, perawatan, bersih-bersih, nyuci, itu rutin ya. Kalau yang lain ya diagendakan. Kalau Sabtu minggu itu jalan sehat. Jam 05.30, jam 05.00 kadang habis subuh itu kita jalan sehat keliling kampung (Wawancara dengan Y, kepala seksi LKS Griya Peduli tanggal 21 Februari 2020).*

Ketujuh adalah bimbingan mental spiritual dan sosial, bimbingan mental spiritual dan sosial dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain ruqiyah, pengajian bagi ODGJ muslim, layanan ibadah hari Minggu bagi ODGJ nonmuslim serta mendongeng dan menggambar. Kegiatan ruqiyah dilaksanakan setiap hari Jum'at minggu ketiga setiap bulan selama kurang lebih satu jam dengan bantuan relawan dari Pondok Ngruki. Namun kegiatan ruqiyah hanya diikuti

Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

oleh ODGJ yang kooperatif, jika ODGJ sedang tidak stabil misalnya mengamuk atau mengganggu ODGJ yang lain maka tidak akan diikutkan.

*Untuk kegiatan ruqiyah belum tentu semua ikut. Yang tidak ikut ruqiyah itu ditentukan sama yang meruqiyah. Oh ini diruqiyah ini tidak. Kalau tidak bisa ya tidak diruqiyah (Wawancara dengan A, pimpinan PMI Kota Surakarta tanggal 20 Juni 2020).*

Kegiatan pengajianpun juga diikuti oleh ODGJ yang kooperatif. Pengajian yang diadakan di LKS Griya Peduli ini diisi oleh salah satu pemuka agama yang berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pengajian ini biasanya dilakukan pada hari Jum'at yang diikuti ODGJ perempuan maupun laki-laki-laki. Sedangkan untuk ODGJ yang nonmuslim maka diberikan pula layanan ibadah setiap hari minggu oleh salah satu petugas LKS Griya Peduli yakni Ibu T.

*Saya sebelum corona ini kan saya juga tergerak untuk melayani mereka mereka yang nasrani. Karena saya kan nasrani ya jadi mereka yang nasrani dulu juga istilahnya saya ijin dulu dengan pimpinan gimana kalau pas hari minggu secara jasmani mereka telantar nggih ya secara rohani jangan sampai mereka telantar nggih. Ya jangan sampai ya. Alangkah baiknya kalau boleh saya kumpulkan di aula nanti sebisa saya semampu saya, saya ajak bernyanyi saya ajak berdoa mereka senang (Wawancara dengan T, bagian instalasi gizi tanggal 22 Juni 2020).*

Kegiatan mendongeng dan menggambar yang dilaksanakan di LKS Griya Peduli merupakan hasil kerja sama dengan organisasi relawan yang bernama Griya Skizofren. Kegiatan mendongeng ini ODGJ dilatih untuk mengembangkan fungsi sosialnya seperti mendengarkan orang bercerita maupun menceritakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan kegiatan menggambar merupakan sarana ekspresi diri untuk menyalurkan imajinasi ODGJ secara visual sehingga mengurangi potensi ODGJ menjadi anti sosial.

Kedelapan adalah bimbingan keterampilan sehari-hari, bimbingan keterampilan sehari-hari dilaksanakan dengan pengadaan kelas keterampilan dan pembiasaan untuk melatih keterampilan hidup dasar. Pengadaan kelas keterampilan dilaksanakan dengan dibantu oleh relawan SIBAT dan YPAC. Kelas keterampilan ini dilaksanakan 3 kali dalam satu minggu. Pada kelas keterampilan ini ODGJ diajari untuk membuat berbagai kerajinan seperti pin, boneka jari, anting-anting, piring rotan, keset kaki, tas, gantungan kunci, gelang, dan kalung manik-manik. Hasil karya keterampilan dari ODGJ diletakkan disebuah etalase di depan pintu masuk LKS Griya Peduli. Berikut ini merupakan kompilasi ODGJ kooperatif yang mengikuti kelas keterampilan.

**Tabel 2.** Pengembangan Keterampilan ODGJ

No	Nama ODGJ (Inisial)	Jenis Keterampilan
1	N	Keset, tas, gantungan kunci
2	K	Keset, tas, gantungan kunci
3	I	Keset, tas, gantungan kunci
4	W	Keset, tas, gantungan kunci
5	Ng	Keset, tas, gantungan kunci
6	G	Keset, tas, gantungan kunci
7	S	Keset, tas, gantungan kunci
8	TP	Gelang dan kalung dari manik
9	M	Gelang dan kalung dari manik
10	P	Kerajinan piring rotan
11	M	Kerajinan piring rotan

(Sumber: Dokumentasi, diolah, 2020)

Sedangkan pembiasaan untuk melatih keterampilan hidup dasar dilaksanakan dengan kegiatan rumahan seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu halaman, mandi dan menjaga kerapian secara mandiri maupun berkomunikasi. Kegiatan seperti mencuci piring, mencuci baju dan menyapu halaman memang hanya dilakukan oleh ODGJ yang kooperatif karena ODGJ yang

*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

kurang kooperatif cenderung malas. Sedangkan untuk mandi dan menjaga kerapian serta berkomunikasi dibiasakan kepada semua ODGJ.

Kesembilan adalah pembuatan nomor induk kependudukan. Pembuatan nomor induk kependudukan bagi ODGJ telantar yang dirawat di LKS Griya Peduli dilaksanakan jika ODGJ minimal sudah dirawat selama satu tahun. Hal tersebut merupakan peraturan dari Dinas Sosial karena untuk mengurus nomor induk kependudukan bagi ODGJ telantar memerlukan surat pengantar dari Dinas Sosial.

*Kalau mereka baru dan belum menjadi warga griya maka bisa. Kalau dia menjadi warga griya tetap maka dia punya KTP dan KIS. Tapi kalau tidak ya itu pasien baru gitu. Belum ada satu tahun (Wawancara dengan S, perawat LKS Griya Peduli tanggal 21 Februari 2020).*

Kesepuluh adalah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Akses ke layanan pendidikan dasar saat ini belum ada di LKS Griya Peduli karena rata-rata warga sudah berumur dewasa. Sedangkan akses pelayanan kesehatan dasar didapatkan dengan akses *check up* rutin bagi ODGJ yang sudah memiliki KTP dan KIS. ODGJ yang baru hanya akan diperiksakan ketika darurat karena setiap *check up* rutin memerlukan rekomendasi Dinas Sosial. Padahal terdapat ODGJ baru yang berjumlah lebih dari satu sehingga anggaran pendanaan tidak mencukupi karena *check up* dengan rekomendasi Dinas Sosial menggunakan pendanaan dari rumah sakit. Hal ini berimplikasi kepada ODGJ yang belum mempunyai KIS karena dipastikan tidak dapat mengonsumsi obat secara rutin.

*Kalau memang dia berkebutuhan khusus dia ngamuk-ngamuk teriak teriak ya kita ambilin punya temannya. Pinjam sementara tapi tidak setiap hari cuma itu saja pas darurat aja. Sambil kita carikan itu tadi KIS (Wawancara dengan M, perawat LKS Griya Peduli tanggal 25 Juni 2020).*

Selain *check up* rutin, terkadang juga ada dokter residen dari salah satu rumah sakit mitra yang melakukan kunjungan dan pemeriksaan kepada ODGJ yang dirawat. Kunjungan ini dapat mengakomodasi kebutuhan ODGJ baru yang belum bisa *check up* rutin sehingga kondisinya tetap bisa terpantau. Selain itu di masa pandemi ini layanan *check up* dilakukan dengan skema diwakilkan oleh petugas untuk mengambil obat sedangkan untuk pemeriksaannya terdapat dokter residen yang berkunjung ke LKS Griya Peduli.

Kesebelas adalah pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan penelusuran keluarga dilakukan secara daring dengan cara mengunggah aktivitas yang dilakukan di LKS Griya Peduli di laman media sosial resmi PMI Kota Surakarta.

#### 34.5. Resosialisasi

Pada tahap resosialisasi lebih ditekankan pada pemulangan ODGJ yang memang sudah ditemukan atau mengingat keluarganya. Ada yang kemudian kondisinya semakin membaik namun masih tetap melakukan *check up* rutin. Namun ada pula ODGJ yang sudah membaik tapi tidak mau pulang walaupun sudah bertemu dengan keluarganya, setelah ditelusuri ternyata sumber stres ODGJ tersebut adalah keluarganya sehingga ODGJ tersebut tetap tinggal di LKS Griya Peduli.

## 4. Pembahasan

Program Griya Peduli merupakan program rehabilitasi sosial untuk menangani ODGJ telantar yang dilaksanakan PMI Kota Surakarta dengan inisiasi melalui pembentukan LKS Griya Peduli. Jenis rehabilitasi yang dilaksanakan di LKS Griya Peduli adalah jenis rehabilitasi sosial dasar di dalam panti karena sasaran merupakan ODGJ yang berasal dari jalanan atau telantar yang dirawat di LKS. ODGJ telantar menjalankan rehabilitasi sosial dasar karena sangat tidak mungkin jika diberikan pelatihan dan pelayanan yang kompleks seperti pelatihan reparasi sepeda motor, percetakan, dll yang lebih cocok diberikan kepada sasaran yang melaksanakan rehabilitasi sosial lengkap (Ismawati & Hartanto, 2018). Jenis pelatihan yang diberikan di LKS Griya Peduli lebih berorientasi untuk mengenalkan kembali ODGJ telantar dengan keterampilan hidup dasar seperti perawatan dan upaya menjaga

kebersihan diri, kemandirian dalam melaksanakan sesuatu, serta peningkatan keterampilan komunikasi yang sempat stagnan akibat pengaruh dari gangguan jiwa.

Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh ODGJ yang dirawat berupa aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang diatur dalam Pasal 22 Permensos No.16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari pemenuhan nilai gizi melalui makanan dan minuman yang diperhatikan, adanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian termasuk peralatan kebersihan badan, asrama yang mudah di akses dengan skema pemisahan *shelter* antara perempuan dan laki-laki, adanya perbekalan kesehatan dari dokter yang berkunjung maupun dari layanan *check up* rutin, adanya bimbingan fisik berupa kegiatan senam pagi dan jalan sehat, bimbingan mental spiritual dan sosial yang berupa kegiatan ruqiyah, pengajian maupun ibadah minggu untuk warga nonmuslim, adanya bimbingan keterampilan sehari-hari seperti pembuatan produk kerajinan sederhana dan pembiasaan keterampilan hidup dasar, adanya layanan untuk membuat nomor induk kependudukan meskipun terdapat syarat tinggal minimal satu tahun, adanya akses layanan kesehatan dasar *check up* rutin dan kunjungan dokter secara berkala, serta adanya fasilitas penelusuran keluarga.

Pemenuhan kebutuhan nutrisi, sandang dan asrama merupakan hal yang cukup penting karena ini adalah tiga kebutuhan pokok manusia yang tidak mungkin ditinggalkan. Jika nutrisi tidak terpenuhi maka kesehatan secara fisik akan mengalami penurunan dan ini dapat memperburuk kondisi ODGJ. Adanya perbekalan kesehatan maupun akses layanan kesehatan dasar juga menjadi hal yang tidak kalah penting. ODGJ merupakan seseorang yang fungsi pikir dan sosialnya sudah terganggu sehingga bantuan profesional termasuk konsumsi obat-obatan sangat diperlukan. Sayangnya akses *check up* rutin dan konsumsi obat belum didapatkan oleh keseluruhan ODGJ yang dirawat karena nomor induk kependudukan belum bisa diurus sehingga tidak dapat mengajukan KTP dan KIS. Padahal ODGJ selaku penyandang disabilitas berhak mendapatkan jaminan sosial termasuk layanan kesehatan dan obat-obatan (Hidayatullah & Pranowo, 2018). Seharusnya pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan memberikan jaminan dan kemudahan bagi ODGJ telantar untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menunggu masa perawatan selama satu tahun sehingga hak-hak ODGJ selaku warga negara terpenuhi layaknya warga negara nondisabilitas yang lain.

Sedangkan kegiatan bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual dan sosial serta bimbingan keterampilan sehari-hari dimaksudkan dapat membantu ODGJ untuk meningkatkan kembali fungsi sosialnya. Perlu diketahui bahwa ODGJ dengan disabilitas seperti skizofrenia terkadang suka menyendiri, melamun, serta halusinasi yang jika dibiarkan maka akan memperparah kondisi disabilitas dan membahayakan orang lain karena tanpa sadar ODGJ dapat melakukan kekerasan (Yazfinedi, 2018). Kegiatan bimbingan fisik mampu mengalihkan situasi diam ODGJ menjadi situasi yang menyenangkan karena ODGJ diajak untuk melakukan aktivitas secara fokus. Konsep yang sama juga berlaku untuk bimbingan mental spiritual dan sosial serta bimbingan keterampilan sehari-hari. Kegiatan ruqiyah, pengajian dan ibadah hari Minggu dapat memberikan ketenangan kepada ODGJ. Hal tersebut diperkuat bahwa penerapan terapi sufistik yang mengarah pada pencerahan batin pada pelayanan sosial panti berbasis agama dapat meredakan tingkah laku labil penderita skizofrenia (Andari, 2017). Sedangkan pada bimbingan keterampilan sehari-hari, dengan mengajak ODGJ untuk membuat produk kerajinan tangan sederhana, menggambar dan mendongeng mampu menyalurkan imajinasi ODGJ kepada hal-hal yang lebih aman sehingga proses kambuhnya halusinasi dapat dicegah.

Sedangkan fasilitas penelusuran keluarga yang diperuntukkan bagi ODGJ telantar dilakukan melalui sistem daring dengan menggunggah informasi seputar ODGJ dan perawatannya di laman media sosial resmi PMI Kota Surakarta. Hal ini menjadi penting karena jika ODGJ ditemukan keluarganya maka proses rehabilitasi sosial dasar yang pada dasarnya berisi perawatan dasar dapat diserahkan kepada keluarga selaku wali resmi dari ODGJ sehingga proses pengakhiran layanan rehabilitasi sosial dasar dapat dilakukan. Meskipun mayoritas ODGJ masih tetap tinggal di LKS Griya Peduli karena keluarga belum ditemukan atau ODGJ yang belum berhasil mengingat asalnya.

*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

Tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial di LKS Griya Peduli dilakukan dengan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi dan resosialisasi. Proses rehabilitasi ini tidak menyertakan tahap terminasi dan bimbingan lanjut karena proses terminasi di LKS Griya Peduli tidak menentu dalam arti ketika ODGJ telantar ditemukan atau ingat tentang keluarganya maka proses perawatan akan dilimpahkan kepada keluarga. Namun jika ODGJ belum mampu mengingat dan keluarganya belum ditemukan maka proses terminasi atau pengakhiran masa layanan tidak dilakukan. Sangat tidak mungkin jika kemudian ODGJ disuruh kembali menggelandang ke jalanan dengan dalih tempat rehabilitasi tidak cukup. Tahapan pelaksanaan ini berbeda dengan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita yang mana dilaksanakan tahapan proses persiapan layanan sosial dan proses pelaksanaan layanan sosial yang juga mencakup terminasi dan layanan lanjutan (Murni & Astuti, 2015).

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di LKS Griya Peduli nantinya bisa dipadukan dengan konsep rehabilitasi sosial berbasis masyarakat seperti yang diujicobakan di Yogyakarta yang mana berhasil meningkatnya kualitas hidup pasien skizofrenia (Puspitosari et al., 2019). Selain itu pemerintah selaku pihak utama yang wajib menjamin ODGJ telantar dapat menginisiasi dan mengembangkan suatu program pembinaan ODGJ telantar seperti *Program Know the Unknown* di India Selatan yang mengumpulkan ODGJ telantar secara terpusat untuk kemudian diberikan penanganan sampai ODGJ mampu kembali ke masyarakat dan jika tidak ada keluarga yang menemukan maka pemerintah sudah menyiapkan tempat khusus yang merawat pasca selesai dari *Program Know the Unknown* (Gowda et al., 2017).

Keberhasilan rehabilitasi sosial dasar bagi ODGJ membutuhkan dukungan yang solid baik dari pihak keluarga, pemerintah, maupun lembaga swasta seperti PMI Kota Surakarta. Sebab jika dukungan yang diberikan tidak solid maka akan berpengaruh pada layanan rehabilitasi yang tidak optimal seperti keterlambatan dalam memberikan akses layanan kesehatan karena kurang adanya kemudahan mengurus administrasi di birokrasi. Kurangnya edukasi di lingkungan keluarga juga menyebabkan dukungan bagi ODGJ tidak ada sehingga ditemukan ODGJ telantar di jalanan yang sudah pasti tidak mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan (Nasriati, 2017).

Walaupun pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di LKS Griya Peduli sebagian besar pendanaan berasal dari donatur dan dana internal PMI Kota Surakarta namun rehabilitasi sosial ini memberikan dampak yang baik bagi ODGJ telantar. Perubahan yang dihasilkan dari rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di LKS Griya Peduli pun nampak seperti meningkatnya gaya hidup yang lebih sehat serta meningkatnya keterampilan hidup dasar meskipun masih ada ODGJ yang kurang kooperatif. Perubahan tersebut tentu dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang berupa terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya sebagai manusia (Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009). Walaupun masih ada ODGJ yang kurang kooperatif namun setidaknya ODGJ tersebut lebih terkendali jika dibandingkan dengan ODGJ yang masih telantar di jalanan serta telah mendapatkan beberapa kesejahteraan sosial meskipun belum sepenuhnya. Hal ini dikarenakan ODGJ yang kurang kooperatif masih belum mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan stabil.

Pelaksanaan program rehabilitasi tentu mengalami hambatan seperti akses layanan kesehatan yang belum merata serta kondisi sarana prasarana terutama *shelter* ODGJ perempuan yang masih lembab dan tidak terakses oleh sinar matahari. Seharusnya pemerintah memberikan kemudahan birokrasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ telantar karena disabilitas yang dimilikinya memerlukan upaya penanganan khusus. Belum optimalnya kondisi *shelter* juga seharusnya menjadi perhatian bagi LKS Griya Peduli. Ruang *shelter* dapat direnovasi dengan memberikan material bangunan yang tembus cahaya maupun pembuatan saluran sirkulasi sehingga lingkungan *shelter* tidak lembab.

Di samping hambatan yang ada, rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan oleh PMI Kota Surakarta melalui Program Griya Peduli perlu diapresiasi karena berusaha berperan serta menjadi masyarakat yang peduli terhadap penatalaksanaan ODGJ telantar dengan dasar kemanusiaan yang juga menjadi inti gerakan PMI. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita tidak memandang ODGJ sebagai “aib atau orang gila” yang perlu dihilangkan sehingga ODGJ mendapatkan dukungan dari keluarga dan permasalahan ODGJ telantar tidak akan muncul.

## 5. Kesimpulan

Rehabilitasi sosial bagi ODGJ telantar yang dilakukan di LKS Griya Peduli melalui lima tahap yakni pendekatan awal, asesmen, persiapan intervensi, intervensi dan resosialisasi. Inti pelaksanaan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi sosial dari ODGJ dilaksanakan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari akses sandang, pangan dan papan, layanan kesehatan termasuk layanan mendapatkan nomor induk kependudukan untuk mengakses fasilitas kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial serta bimbingan keterampilan sehari-hari, serta fasilitas penelusuran keluarga. Hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar berupa terbatasnya akses layanan kesehatan bagi ODGJ ke fasilitas kesehatan serta kondisi *shelter* yang kurang memadai. Upaya rehabilitasi sosial ini telah menjadi wahana untuk mencapai kesejahteraan bagi ODGJ telantar yang dirawat.

## 6. Saran

Berbagai hambatan dan potensi dapat dikembangkan di LKS Griya Peduli maka penulis menyarankan: *pertama*, melakukan komunikasi dan sinergi secara masif dengan Dinas Sosial maupun pemerintah agar akomodasi *check up* rutin dan konsumsi obat melalui KIS dapat diupayakan dengan segera. *Kedua*, memperbaiki fasilitas *shelter* bagi ODGJ perempuan agar mendapatkan akses cahaya matahari yang cukup. Penulis juga merekomendasikan kepada pihak terkait yakni Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Surakarta untuk dapat membantu PMI Kota Surakarta dalam mengembangkan Program Griya Peduli sehingga dengan perkembangannya dapat menjadi pusat rehabilitasi bagi ODGJ telantar atau penyandang disabilitas mental pada umumnya di wilayah Kota Surakarta.

**Ucapan terimakasih:** Penulis menyampaikan terimakasih kepada PMI Kota Surakarta dan semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, dosen pembimbing, pengelola jurnal Sosio Konsepsia hingga tulisan ini terbit.

## Daftar Pustaka

- Andari, S. (2017). Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia Religious Based Social Services on Rehabilitation of Schizophrenic Patients. *Jurnal PKS*, 16(2), 195–208.
- Astuti, M. (2017). Kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasung, Keluarga Dan Masyarakat Lingkungannya Di Kabupaten 50 Kota. *Sosio Konsepsia*, 6(3), 256–268. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.1000>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). Laporan Provinsi Jawa Tengah Riskesdas 2018. In *Kementerian Kesehatan RI*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Buku Saku: Progres Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. 3511351(24). <https://dinkes.jatengprov.go.id/v2018/bukusakupispk2019/mobile/index.html>

Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

- Gowda, G. S., Gopika, G., Kumar, C. N., Manjunatha, N., Yadav, R., Srinivas, D., Dawn, B. R., & Math, S. B. (2017). Clinical outcome and rehabilitation of homeless mentally ill patients admitted in mental health institute of South India: "Know the Unknown" project. *Asian Journal of Psychiatry*, 30(April 2017), 49–53. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.07.001>
- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206.
- Ismawati, & Hartanto, R. V. P. (2018). the Implementation of Social Rehabilitation for People With Physical Dissabilities in Order To Increase the Access for Work. *Sosio Informa*, 4(03).
- Karnadi, & Kundarto, S. Al. (2014). Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Ponpes/Panti REHSOS Nurusslam Sayung Demak). *Jurnal At-Taqaddum*, 6, 1689–1699.
- Kemendes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Llerena, K., Gabrielian, S., & Green, M. F. (2018). Clinical and cognitive correlates of unsheltered status in homeless persons with psychotic disorders. *Schizophrenia Research*, 197, 421–427. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2018.02.023>
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Pusat Kajian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 1(03), 278–292.
- Naibaho, M., Krisnani, H., & H., E. N. (2015). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331–340. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13580>
- Nasriati, R. (2017). Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu - Ilmu Kesehatan*, 15(1), 56–65. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/view/1628>
- Puspitosari, W. A., Wardaningsih, S., & Nanwani, S. (2019). Improving the quality of life of people with schizophrenia through community based rehabilitation in Yogyakarta Province, Indonesia: A quasi experimental study. *Asian Journal of Psychiatry*, 42(March), 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.03.022>
- S, S. (2013). Pengalaman Penderita Skizofrenia tentang Proses Terjadinya Halusinasi Suryani. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, v1(n1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jkp.v1n1.1>
- Sari, M. N., & Ramadhian, M. R. (2016). Gangguan Kepribadian dan Perilaku Akibat Penyakit , Kerusakan , dan Personality and Behavioural Disorders due to Disease , Damage , and Brain Dysfunction in A 45 Years Old Men. *Jurnal Medula*, 6, 83–87.
- Subu', M. A., Holmes, D., & Elliot, J. (2016). Stigmatisasi dan Perilaku Kekerasan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(3), 191–199. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i3.481>
- Sulistyorini, W., & Sabarisman, M. (2017). Depresi : Suatu Tinjauan Psikologis. *Sosio Informa*, 3(2), 153–164. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.939>
- Ulya, Z. (2019). Coercion (pasung) and people with a mental disorder in Indonesia: Bioethics and health law. *International Journal of Law and Psychiatry*, 66(October), 101477. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.101477>

**Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi**

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta

Yazfinedi. (2018). Konsep, permasalahan, dan solusi penyandang disabilitas mental di Indonesia.  
*Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, XIV(26)*, 101–110.



*Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi*

Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota  
Surakarta

## Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

Yessilia Osira<sup>1</sup> , Bayu Risdiyanto<sup>2</sup> 

<sup>1</sup>Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi FIS Universitas Dehasen Bengkulu

Korespondensi: yosira@unib.ac.id, Telp. +62 8156234811

Diterima: 28 Januari 2021; Disetujui: 27 Januari 2022; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Perawatan lanjut usia (lansia) merupakan kebutuhan mendesak dalam masyarakat yang usia harapan hidupnya semakin tinggi, mengingat kerentanan yang dialami oleh orang lansia. Oleh karena itu dibutuhkan model-model perawatan lansia yang mampu mereduksi kerentanan sekaligus memberdayakan potensi dan kemampuannya sehingga dapat berfungsi sosial dalam kehidupan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berupaya mengkaji perbandingan model perawatan lansia yang dilakukan oleh institusi dengan perawatan lansia di rumah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, yang hasilnya kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perawatan lansia, baik yang di dalam institusi maupun di rumah, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perawatan di dalam institusi dirasakan lebih sistematis dan komprehensif melalui berbagai aktifitas fisik, mental, sosial dan spiritual, dibandingkan dengan perawatan lansia di rumah. Meskipun demikian, perawatan lansia di rumah, ternyata lebih membuat nyaman karena kedekatannya dengan keluarga, dibandingkan bila dirawat di dalam institusi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan adanya kolaborasi aktifitas antara perawatan lansia di dalam institusi dengan perawatan di rumah, sehingga tujuan perawatan lansia dapat tercapai secara optimal. Bentuk layanan yang direkomendasikan adalah pembentukan Paguyuban Keluarga Lansia dan pelaksanaan layanan Day Care di Institusi yang bisa diakses bukan saja oleh lansia di institusi, namun juga lansia di rumah.

**Kata Kunci:** Lanjut Usia, Model Perawatan di Institusi, Model Perawatan Rumah

**Abstract:** Elderly care is an urgent need in a society where life expectancy is higher, given the vulnerability experienced by the elderly. Therefore, we need models of elderly care that are able to reduce the vulnerability of the elderly while empowering the potential and ability of the elderly so that they can function socially in their lives. This qualitative approach research seeks to examine the comparison of elderly care models conducted by institutions with elderly care at home in Bengkulu City, Bengkulu Province, Indonesia. Data collection is done through in-depth interviews, observations and documentation studies, the results of which are then analyzed with qualitative analysis. The results showed that the elderly care model, both inside the institution and at home, had their strengths and weaknesses Care within institutions is relatively more systematic and comprehensive through various physical, mental, social and spiritual activities, compared to elderly care at home. However, elderly care at home turns out to be more comfortable for the elderly because of its closeness to the family, than when treated in an institution. Based on the results of the study, it is recommended that collaboration between elderly care activities in the institution within the institution be maintained at home, so that the goal of elderly care can be optimally achieved. The recommended forms of services is the formation of the Elderly Family Association and the implementation of Day Care services in Institutions that can be accessed not only by the elderly in the institution, but also the elderly at home.

**Keywords:** Elderly, Model Of Care In Institutions, Model Of Home Care

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menyebutkan bahwa lansia (lanjut usia) merupakan penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Lanjut Usia Tahun 2018, menerangkan bahwa ada peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia, dimana pada tahun 1990 rata-rata 63,6 tahun, dan tahun 2016 angkanya meningkat menjadi 71,7 tahun. Tahun 1971-2018, persentase penduduk Lanjut Usia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat. Pada tahun 2018, persentase Lansia mencapai 9,27 persen atau sekitar 24,49 juta orang. Persentase Lansia di Indonesia didominasi Lansia muda (60-69 tahun) 63,39 %, Lansia madya (70-79 tahun) 27,92 % dan Lansia tua (kelompok umur 80+) : 8,69 %. Pada tahun 2018 setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 15 orang penduduk Lansia (BPS: 2018).

Keberhasilan pembangunan ini juga nampak pada angka harapan hidup penduduk Provinsi Bengkulu yang menunjukkan penduduk laki-laki mencapai 66,6 tahun dan perempuan mencapai 70,48 tahun (BPS Bengkulu: 2015). Bahkan data Kota Bengkulu pada tahun 2019 terdapat 8.084 lansia yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Rakyat Bengkulu, 24 Januari 2019).

Meningkatnya angka harapan hidup tersebut pada dasarnya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, namun keberhasilan tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat keseluruhan, untuk mengantisipasi permasalahan dan kerentanan yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah lansia di Indonesia. Hal tersebut disebabkan sebagian besar lansia mengalami kerentanan/permasalahan dalam aspek kesehatannya, aspek mental psikologis lansia (perasaan kesepian, perasaan tidak diperhatikan, stress, depresi dll), aspek sosial (hambatan dalam berinteraksi sosial dengan orang lain), aspek ekonomi (tidak produktif lagi dalam pekerjaan, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang memadai) (Yessilia Osira dkk: 2020).

Saat ini, ada dua pendekatan pelayanan atau perawatan lanjut usia yang dikenal, yaitu perawatan lansia di dalam panti dan perawatan lansia dalam keluarga (di luar panti) Pelayanan berbasis institusi atau pelayanan yang diselenggarakan dalam panti sosial merupakan salah satu alternatif model pelayanan bagi lansia terlantar yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Sri Sulastri dan Sahidi Humaedi: 2017). Sementara ETTY Padmiati dan Kissumi Diyanayati (2015) menyebutkan bahwa di Indonesia, upaya pelayanan sosial bagi lansia lebih dikembangkan pada program pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat (family based atau community based) dengan mendorong dan melibatkan sebanyak mungkin peran keluarga dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lansia.

Hasil penelitian Putra Ikbal Prasetya dan kawan-kawan (2014) terkait perbandingan hasil pelayanan lansia di dalam panti dan didalam keluarga menunjukkan bahwa kualitas hidup lansia yang berada di PSTW memiliki kualitas hidup tinggi lebih banyak dibandingkan lansia yang berada di keluarga. Sementara penelitian Audina Ika dkk (2018) menyatakan bahwa terdapat 44,4% lansia mengalami kualitas hidup baik di panti sosial, dan 55,6% lansia mengalami kualitas hidup baik di rumah.

Perbedaan hasil penelitian tentang perbandingan hasil pelayanan lansia di dalam panti dengan pelayanan di dalam keluarga menunjukkan bahwa di setiap panti dan keluarga, ternyata mempunyai kualitas pelayanan atau perawatan terhadap lansia yang berbeda-beda. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk membandingkan model perawatan lansia di dalam panti dengan perawatan lansia dalam keluarga, khusus di wilayah Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menyiapkan model-model pelayanan perawatan lanjut usia di Bengkulu, baik di dalam lembaga maupun perawatan di rumah, agar kesejahteraan hidup lansia tetap terjamin.

## 2. Metode

Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang model perawatan lanjut usia yang dilakukan oleh institusi, yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Kota Bengkulu, dengan perawatan lanjut usia di rumah (*Home care*) di Kota Bengkulu.

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

Pengumpulan data di PSTW dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang petugas panti terdiri dari 2 orang pimpinan panti, dan 3 orang pengasuh wisma panti. Wawancara juga dilakukan terhadap 12 orang lanjut usia yang mewakili wisma khusus perempuan, wisma khusus laki-laki dan wisma khusus pasangan suami istri. Selain itu juga dilakukan observasi terhadap pelayanan panti dan aktifitas keseharian lanjut usia di dalam panti. Sedangkan untuk model perawatan lanjut usia di rumah, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 15 orang lanjut usia dan 15 orang keluarga yang merawat lanjut usia tersebut. Sementara observasi dilakukan dengan mengamati kondisi rumah dan aktifitas lanjut usia di rumah.

Teknik wawancara mendalam dilakukan agar mendapatkan data secara detail tentang perawatan lanjut usia menurut pelaku utama perawatan tersebut, baik dari sisi petugas maupun keluarga dan data dari lansia sebagai penerima layanan perawatan baik yang berada di dalam institusi maupun di rumah. Sementara observasi dilakukan untuk memastikan kondisi faktual perawatan lansia. Observasi juga merupakan upaya peneliti untuk memvalidasi hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan. Untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen penelitian dan laporan kegiatan terkait perawatan lanjut usia di dalam panti maupun di rumah.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga menjadi gambaran yang utuh tentang model perawatan lanjut usia di dalam institusi dengan perawatan lansia di rumah yang dilakukan di Kota Bengkulu.

### 3. Hasil Penelitian

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pagar Dewa Provinsi Bengkulu merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Daerah Provinsi Bengkulu, yang berdiri sejak tahun 1979 dengan nama awal Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia Pagar Dewa Provinsi Bengkulu. Fungsi PSTW merupakan wadah/institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani, dan social serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati hidup secara wajar.

Sebagai institusi, PSTW mempunyai visi "Terwujudnya hari tua lanjut usia dalam suasana sejahtera lahir dan batin", yang diterjemahkan dalam misi: 1) Memberikan tempat penampungan yang layak serta memenuhi syarat Kesehatan, 2) Memenuhi kebutuhan pasangan yang memenuhi standar kesehatan lanjut usia, 3) Memelihara dan merawat kesehatan lanjut usia, 4) Menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, aman, dan damai rasa kekeluargaan yang baik sesama lanjut usia maupun lanjut usia dengan petugas, 5) Mempersiapkan lanjut usia untuk menghadapi akhir hidup dengan penuh rasa percaya diri dengan meningkatkan iman dengan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSTW dibentuk secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada warga lanjut usia kurang mampu atau terlantar dengan kriteria: 1) Umur 60 tahun ke atas, 2) Dalam keadaan kurang mampu, miskin/terlantar, yang diterangkan oleh kepala desa/lurah., 3) Sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit menular dan ingatan yang diterangkan surat keterangan dokter puskesmas setempat, 4) Surat pernyataan penyerahan dari keluarga bagi yang masih mempunyai keluarga, dan 5) Surat pengantar dari dinas kesejahteraan social kota/kabupaten setempat. Kriteria tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sasaran kegiatan PSTW hanyalah lansia kurang mampu / terlantar. Hal ini sudah tentu membatasi hak penduduk lansia lain yang tidak memenuhi persyaratan di atas. Bahkan hasil wawancara dengan Kepala PSTW menyebutkan bahwa:

*".....Sampai sekarang sebenarnya ada beberapa permintaan dari keluarga lansia yang secara ekonomi mampu, namun karena keterbatasan keluarga, mereka menghendaki bisa menitipkan lansia di PSTW.....namun karena kriteria sasaran PSTW hanya bagi lansia kurang mampu/terlantar, maka keinginan tersebut tidak terpenuhi..... padahal sampai sekarang baru ada satu institusi pemerintah di Bengkulu yang bisa memberikan layanan kepada lansia...."*

Sementara model perawatan lansia di rumah (*home care*) di Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitian ini tergambar sangat bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perawatan lansia di rumah tidak menggunakan kriteria sebagaimana di lembaga. Jadi semua anggota

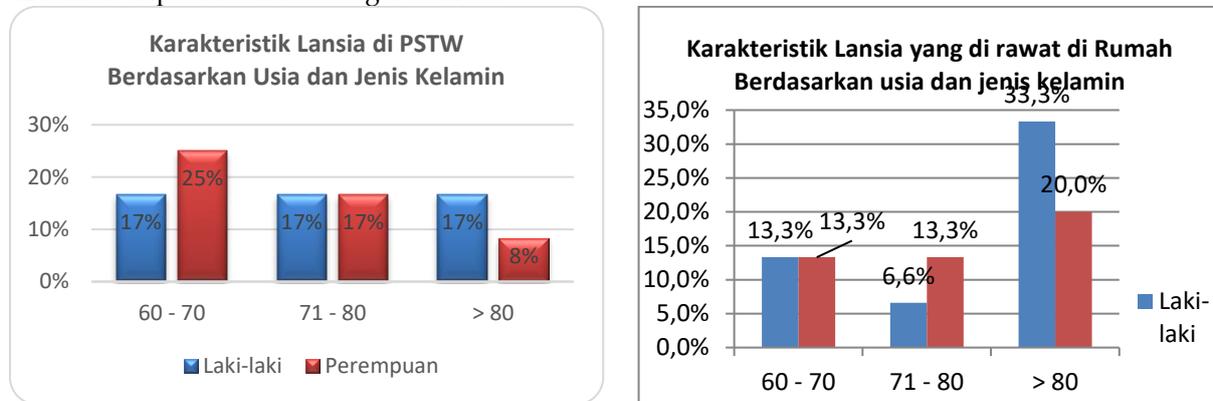
**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

keluarga yang sudah berusia 60 tahun atau lebih, maka akan dirawat di rumah apapun kondisinya. Model perawatannyapun tidak ada standar sebagaimana di lembaga. Di rumah, perawatan lansia dilakukan bagi lansia yang masih bisa melakukan aktifitas keseharian secara mandiri maupun yang tergantung orang lain dalam melakukan aktifitas keseharian. Aktifitas lansia disesuaikan dengan situasi kondisi lansia dan keluarganya yang merawat di rumah. Dapat dikatakan aktifitas lansia di rumah tergantung "mood". Sementara perawatan Lansia di Lembaga, ada jadwal kegiatan yang lebih sistematis bagi aktifitas lansia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan lansia di PSTW terjadwal sebagai berikut: Senin: keterampilan, Selasa: pengajian, Rabu: kebersihan lingkungan, Kamis: pemeriksaan Kesehatan, Jumat: Senam Lansia, sedangkan hari Sabtu dan Minggu: kegiatan bebas. Sementara kegiatan lansia di rumah tidak ada jadwal khusus yang mengatur aktifitas. Semua hari, diisi aktifitas yang sesuai dengan keinginan/kebutuhan lansia saat itu, disesuaikan dengan aktifitas keluarga lain yang mendampingi lansia.

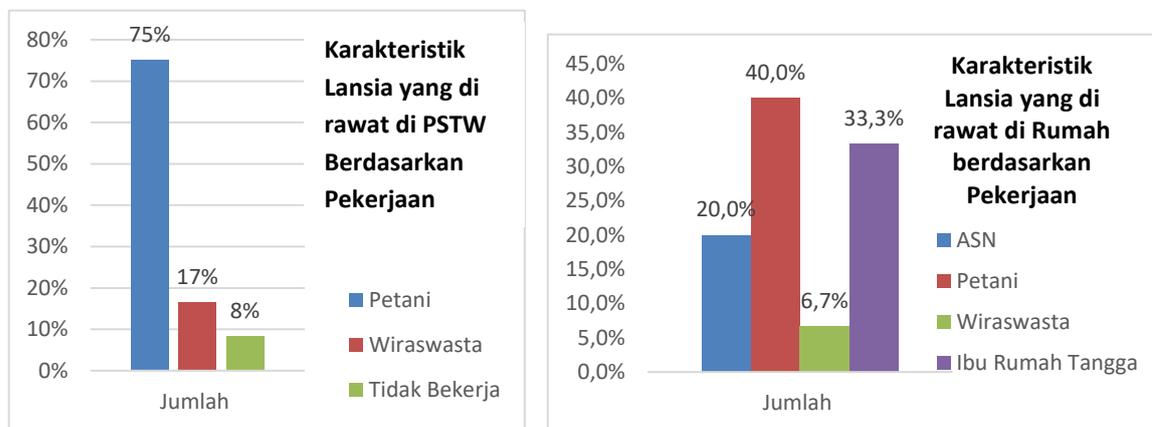
Perbedaan model pelayanan perawatan lansia di PSTW dengan di rumah juga erat kaitannya dengan karakteristik lansia yang ditangani, termasuk karakteristik lembaga serta keluarga yang merawat lansia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum kondisi lansia di PSTW dan di rumah dapat kita lihat sebagai berikut:



**Gambar 1.** Perbandingan karakteristik lansia Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa lansia yang dirawat di PSTW relatif merupakan lansia muda, sekitar 42% berusia antara 60 – 70 tahun. Sedangkan perawatan di rumah, 53,3% lansia sudah berusia lebih dari 80 tahun.

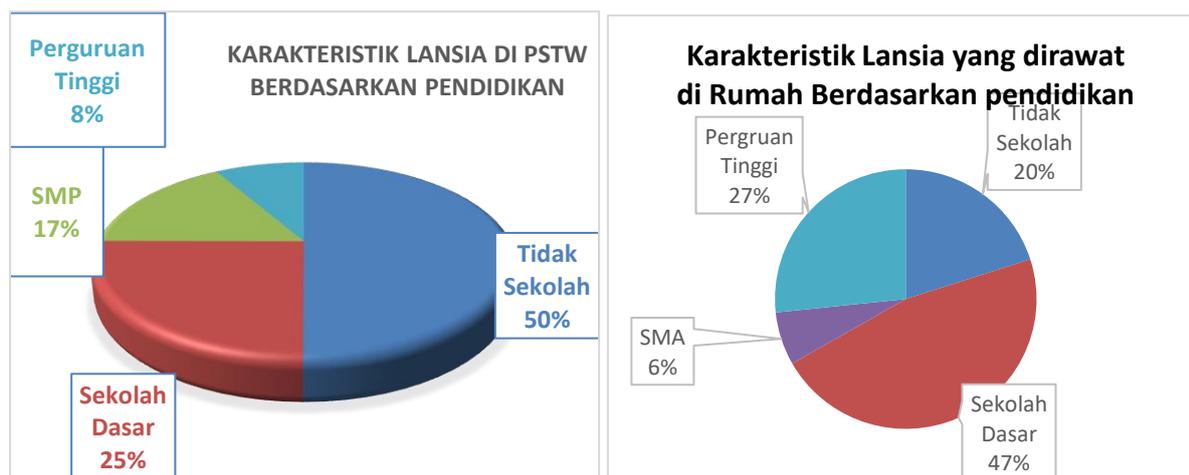
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 75% lansia yang dirawat di PSTW berlatar belakang pekerjaan sebagai petani, 17% sebagai pedagang/wiraswasta kecil, bahkan 8% merupakan pengangguran. Sedangkan lansia yang dirawat di rumah 40% bekerja sebagai petani dan 33,3% sebagai ibu rumah tangga.



**Gambar 2.** Perbandingan Karakteristik Lansia Berdasarkan Pekerjaan

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia yang dirawat di PSTW, 50% tidak pernah bersekolah, 25% hanya bersekolah dasar, sedangkan lansia yang dirawat dirumah ada 27% berpendidikan tinggi dan 47% sekolah dasar, dan 20% bahkan tidak bersekolah. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa lansia yang berpendidikan tinggi memilih tinggal di rumah bersama keluarganya, sementara yang berpendidikan rendah banyak tinggal dan dirawat di PSTW. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 80% lansia yang di rawat dirumah menempati rumah dengan status milik lansia itu sendiri, dan ini berarti lansia tersebut memiliki status ekonomi yang memadai sehingga bisa memiliki rumah sendiri.



Gambar 3. Perbandingan Karakteristik Lansia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain karakteristik lansia, karakteristik petugas yang memberikan perawatan juga mempengaruhi keberhasilan perawatan lansia baik di PSTW maupun di rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PSTW, petugas perawatan terdiri dari pengasuh asrama, lulusan pekerja sosial, dokter (tidak menetap), perawat (tidak menetap) dan tenaga vokasional. Sedangkan perawatan lansia dirumah dilakukan oleh pasangan suami/istri lansia, anak-anak lansia, atau menantu lansia.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan tentang layanan perawatan yang diberikan lembaga (PSTW) dengan perawatan lansia di rumah, sebagaimana terlihat di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Perawatan/Layanan bagi Lansia di PSTW dengan di Rumah

Perawatan Lansia di PSTW	Perawatan Lansia di Rumah
Proses Penyantunan. Para lanjut usia seluruhnya ditempatkan di wisma- wisma dengan mendapatkan Pengarahan dan Bimbingan dari petugas yang menjadi penanggung jawab wisma dalam pemberian penyantunan kepada para lanjut usia yang berada di PSTW dari mulai masuk sampai dengan meninggal dunia tidak dipungut biaya apapun semua ditanggung Negara	Lansia tinggal bersama anggota keluarga lain (kadang anak, cucu, dan saudara yang lain), dengan status kepemilikan rumah ada yang milik Lansia itu sendiri, maupun milik anak dan cucunya
Proses Bimbingan. Lansia yang berada diPanti selain ditampung juga diberikan bimbingan-bimbingan seperti yaitu :	Lansia di rumah, hanya mendapatkan bimbingan mental dan rohani dari forum-forum pengajian yang diikuti oleh lansia. Sedangkan anggota keluarga, umumnya membantu

Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

<p>Bimbingan Sosial yang berupa keterampilan yang bersifat rekratif Bimbingan Mental dan Rohani yang berupa ceramah agama/pengajian dengan tenaga pembina dari Kantor Kementerian Agama, IKMI dan IKADI Bengkulu</p>	<p>membimbing lansia dalam melaksanakan aktifitas hidup keseharian (makan, mandi, buang kotoran, memakai pakaian dan lain-lain)</p>
<p>Pelayanan kesehatan dan Perumahan. Pemeliharaan kesehatan pra lanjut usia dilakukan berupa Penyediaan klinik kesehatan dilengkapi peralatan dan obat-obatan Pemeriksa kesehatan rutin, 1 (satu) kali seminggu Perawatan kesehatan bagi lanjut usia yang sakit di puskesmas dan atau RSUD Dr.M. Yunus Bengkulu, Menyediakan akses perumahan dalam rangka perbaikan gizi lanjut usia yaitu: makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta makan ringan dan buah</p>	<p>Lansia melakukan pemeriksaan Kesehatan hanya jika lansia mengeluh tentang kondisi kesehatannya. Lansia di rumah tidak ada jadwal cek Kesehatan secara rutin, kecuali lansia yang mempunyai pendapatan tinggi atau tinggal bersama keluarga yang status sosial ekonominya tinggi.</p>
<p>Pelayanan kebugaran diantaranya: Senam lansia Penyediaan jalan santai dilingkungan Panti</p>	<p>Lansia di rumah menjalankan kebugaran tubuhnya secara mandiri disekitar rumahnya, dan ada juga yang mengikuti senam lansia di sekitar tempat tinggalnya, yang dikordinir oleh puskesmas atau organisasi sosial lokal</p>
<p>Pelayanan rekreasi, seperti Nonton televisi dan Darmawisata/piknik</p>	<p>Lansia di rumah umumnya mendapatkan layanan rekreasi dengan menonton TV, namun Sebagian Lansia dari keluarga mampu kadang mengadakan dharmawisata bersama keluarga.</p>
<p>Pelayanan keterampilan/usaha produktif. Untuk mengisi waktu luang lanjut usia sesuai dengan minat dan keahliannya melakukan: Membuat sapu lidi, Membuat kemoceng, Menganyam membuat tikar, Memelihara ayam dan Berkebun</p>	<p>Lansia di rumah pada umumnya mengisi waktu di rumah dengan bermain bersama anak/cucu, kadang mengerjakan pekerjaan ringan seperti membersihkan rumput di kebun/halaman</p>
<p>Pelayanan mental rohani/social, seperti: Bimbingan individu, Bimbingan social kelompok, Bimbingan keagamaan, Pengajian (Ceramah, Diskusi, Membaca surat yasin dan tahlilan)</p>	<p>Lansia di rumah yang masih bisa berjalan umumnya mengikuti pengajian-pengajian di masjid dekat rumahnya.</p>
<p>Pelayanan pemakaman. Lanjut usia yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum dengan menyediakan keperluan seperti ambulan, upacara pemakaman dan sebagainya.</p>	<p>Lansia yang meninggal umumnya diurus oleh anggota keluarganya, dengan dukungan masyarakat sekitar rumahnya</p>

---

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

#### 4. Pembahasan

Pendampingan lansia berbasis *home care* sebenarnya menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan keberfungsian lansia yang ada di lingkungan keluarga, namun *home care* belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh keluarga lansia dan masyarakat, sehingga diperlukan perancangan program pendampingan berbasis *home care* yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lansia. Perancangan program pendampingan lansia berbasis *home care* dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan karakteristik lansia, kemudian akan dirancang program yang dapat memenuhi kebutuhan lansia melalui berbagai bentuk pelayanan *home care* dengan melibatkan peran keluarga lansia, dan masyarakat di lingkungan sekitar (Rosita Nurfatimah dkk: 2017)

Mengacu pada International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC (2011), maka perawatan lansia di rumah di Kota Bengkulu sebenarnya ada beberapa aspek yang sudah dilakukan, namun di aspek lain masih kurang kegiatannya. Secara jelas, layanan perawatan lansia di rumah tersebut dapat kita lihat di bawah ini:

**Tabel 2.** Pelayanan Perawatan Lansia di Rumah Di Kota Bengkulu Berdasarkan Aspek Pelayanan Lansia Menurut IFRC

NO	Aspek Pelayanan Lansia di Rumah menurut IFRC	Pelayanan Perawatan Lansia di Rumah di Kota Bengkulu
1	Perawatan di Rumah (Home Nurshing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan aktifitas hidup keseharian, seperti mandi, buang kotoran, makan, mengenakan pakaian, pada beberapa lansia dibantu oleh anggota keluarganya, sementara untuk lansia yang bisa melakukan sendiri, cukup ddampingi dalam pelaksanaannya.</li> <li>• Tidak tersedia tenaga khusus terlatih (perawat/relawan/pekerja sosial) yang membantu perawatan lansia di rumah</li> </ul>
2	Bantuan Rumah (Home Help)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan memperbaiki rumah, memperbaiki saluran air dan keperluan rumah tangga, mengurus administrasi kependudukan, dan perbankan lansia pada umumnya dibantu oleh anggota keluarganya</li> <li>• Untuk aktifitas yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti pemasangan peralatan listrik. Perbaikan AC pada umumnya dikerjakan oleh tenaga terlatih.</li> </ul>
3	Layanan Kunjungan (Visiting Services)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini di Kota Bengkulu terdapat tenaga pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, yang bisa mengunjungi rumah lansia untuk memastikan lansia mendapatkan jaminan hidup dalam bentuk pemberian bantuan permakanan. Sementara pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh kader posyandu dan petugas Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.</li> <li>• Ada aktifitas senam lansia bersama yang dikordinir oleh Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ul>

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

Mengacu pada berbagai standar pelayanan lanjut usia baik dari pemerintah Republik Indonesia, maupun standar yang dikeluarkan oleh organisasi non pemerintah, maka model perawatan lanjut usia

di dalam lembaga dan di rumah, masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan, sebagaimana terlihat di bawah ini:

**Tabel 3.** Keunggulan Model Perawatan Lanjut Usia

Aktifitas Layanan/perawatan	Keunggulan Model Perawatan Lanjut Usia	
	Di PSTW	Di Rumah
<b>Layanan Fisiologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada jadwal pemenuhan makanan yang pasti, yaitu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.</li> <li>• Ada jadwal pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan seminggu sekali, sehingga kondisi kesehatan lansia relative terpantau dengan baik</li> <li>• Ada jadwal olah raga untuk menjaga kebugaran tubuh yang sistematis dan rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansia dirumah relative bisa mengatur menu makanan sesuai selera sendiri</li> <li>• Bisa memilih dokter atau layanan kesehatan sesuai dengan keinginannya</li> </ul>
<b>Layanan Mental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada aktifitas bimbingan mental yang terjadwal, serta tersedia petugas yang siap mendengarkan keluhan, menjadi tempat bercerita bagi lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansia dirumah umumnya masih mempunyai status sosial yang dipandang bisa menjadi aktualisasi diri lansia, baik karena pendapatan ekonominya maupun karena pengalaman hidupnya yang bisa memberikan nasihat kepada anggota keluarganya</li> </ul>
<b>Layanan Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansia dapat berinteraksi dengan lansia lain, saling berbagi cerita dan pengalaman sehingga hidupnya tidak kesepian. Disamping itu terlihat interaksi mereka hangat karena sama-sama sudah lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansia dirumah dapat berinteraksi dekat dengan anggota keluarganya, seperti anak dan cucu-cucunya</li> </ul>
<b>Layanan Spiritual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat dalam pengajian-pengajian yang terjadwal secara sistematis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat pengajian di masjid sekitar rumah</li> </ul>

Sumber; Hasil Penelitian Tahun 2020

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa keunggulan utama dari model pelayanan lansia di PSTW adalah sistematisnya kegiatan yang dilakukan oleh lansia warga binaan panti baik perencanaannya, metode pelaksanaannya, maupun sumber daya manusia. Di samping itu layanan yang diberikan PSTW juga lebih komprehensif dalam memandang kehidupan lansia, yaitu meliputi layanan pada aspek fisiologis, mental, sosial dan layanan spiritual. Hal ini seperti yang disampaikan oleh lansia di PSTW bahwa:

*"...dibandingkan di rumah, disini kami bisa melakukan banyak kegiatan, mulai dari bersih-bersih, senam bersama, ngobrol dengan banyak orang, periksa kesehatan, ada hiburan, bahkan belajar keterampilan tangan..."*

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

Sementara keunggulan layanan perawatan lansia di rumah adalah kebebasan untuk memilih aktifitas berdasarkan kemauan dan kemampuan sendiri. Di samping itu lansia yang dirawat di rumah memiliki kedekatan interaksi dengan keluarganya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu keunggulan perawatan lansia di PSTW di bandingkan perawatan di rumah adalah Lansia dapat berinteraksi dengan lansia lain, saling berbagi cerita dan pengalaman sehingga hidupnya tidak kesepian. Hal ini sesuai dengan penelitian Ruaida Murni (2008) yang menyebutkan "*interaksi sosial lansia di PSTW diantaranya berbentuk ngobrol bersama di ruang tamu, di ruang makan, dalam kegiatan yang dilaksanakan panti, ketika sedang istirahat maupun ketika berkunjung ke wisma lainnya*" Di samping itu, lansia di panti juga masih bisa berinteraksi dengan keluarga ketika dikunjungi keluarga, bisa melalui telepon, bahkan berkunjung ke rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan model pelayanan perawatan lansia di PSTW menurut pimpinan panti adalah ketergantungan panti terhadap alokasi anggaran dari pemerintah, sehingga aktifitas yang dijalankan dirasakan kurang optimal, seperti pemberian layanan bimbingan masih menggeneralisir seluruh lansia atau dikatakan layanan belum memperhatikan masalah dan potensi masing-masing lansia yang dirawat. Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan minimnya kegiatan yang bisa mengikutsertakan keluarga lansia, yang akibatnya interaksi sosial lansia dengan keluarganya terabaikan. Sedangkan kelemahan model pelayanan perawatan lansia di rumah lebih pada kurang sistematis dan komprehensif layanan yang bisa dinikmati oleh lansia di rumah, apalagi lansia yang tinggal bersama keluarga yang punya kesibukan pekerjaan di luar rumah.

Secara umum kelemahan model perawatan lansia di PSTW dan di Rumah dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.** Kelemahan Model Perawatan Lansia

Aktifitas Layanan/perawatan	Kelemahan Model Perawatan Lanjut Usia	
	Di PSTW	Di Rumah
Layanan Fisiologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lansia tidak bisa memilih menu makanan yang disediakan oleh PSTW.</li> <li>Lansia tidak bisa memilih dokter atau layanan kesehatan yang sesuai dengan keinginannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal makan kurang teratur, dan kurang terjamin pemenuhan gizinya, kecuali lansia yang tinggal bersama keluarga yang secara ekonomi mampu.</li> <li>Tidak ada jadwal kegiatan berolahraga yang sistematis, sehingga olah raga dilaksanakan tergantung "mood" lansia dan keluarganya</li> <li>Tidak ada jadwal pemeriksaan Kesehatan secara rutin dan berkelanjutan. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan hanya jika lansia mengeluh sakit</li> </ul>
Layanan Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pemberian layanan mental masih menggeneralisir seluruh klien (lansia) dipanti. Layanan belum disesuaikan dengan masalah atau potensi dan kemampuan masing-masing individu lansia sehingga hasil masih kurang optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada jadwal bimbingan mental yang sistematis.</li> <li>Terdapat petugas bimbingan mental yang berkompeten.</li> </ul>

- |                |  |  |
|----------------|--|--|
| Layanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansia kurang bisa berinteraksi dengan keluarganya</li> <li>• Lansia terkesan hanya merupakan objek sasaran kegiatan di panti, sehingga kurang bisa terlibat dalam proses kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila keluarga sibuk diluar rumah, interaksi sosial lansia sangat terbatas hanya ketika keluarganya pulang ke rumah. Dalam situasi ini, lansia merasakan kesendirian dan kesepian meskipun di rumahnya sendiri, padahal lansia mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan lansia lain.</li> </ul> |
|----------------|--|--|

Layanan Spiritual

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

Kelemahan model perawatan lansia baik di dalam lembaga (PSTW) maupun di rumah, khususnya dalam aspek layanan sosial menunjukkan adanya **perasaan kesepian** yang dialami lansia manakala interaksi dengan keluarganya kurang dan bahkan tidak ada dengan berbagai alasan seperti keluarga sudah meninggal dunia, maupun kesibukan keluarga sehingga tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan lansia. Indriana Y (2012) menyatakan bahwa ada dua tipe isolasi yang mungkin dapat berpengaruh dalam perasaan kesepian: pertama: *emotional isolation*, yaitu kurangnya ikatan intim yang sebenarnya dan hilangnya hubungan ini tidak bisa digantikan oleh alternatif hubungan sosial lainnya. Kedua: *isolasi sosial* akibat kurangnya jaringan keterlibatan dengan orang lain sehingga menimbulkan perasaan bosan, tanpa tujuan, dan keterbatasan.

Berdasarkan Analisa kunggulan dan kelemahan perawatan lansia di lembaga (PSTW) dengan perawatan lansia di rumah, maka diperlukan suatu model perawatan lansia yang bisa memenuhi harapan lansia baik yang dilembaga maupun di rumah. Model perawatan lansia tersebut terdiri dari dua kegiatan tambahan dari yang selama ini dilakukan, yaitu pembentukan “paguyuban keluarga lansia” baik di dalam panti maupun di rumah. Paguyuban ini bisa menjadi media atau forum mengatasi kurangnya interaksi sosial lansia dengan lansia lain maupun dengan keluarganya. Paguyuban keluarga lansia juga bisa menjadi media saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan perawatan lansia.

Sementara kegiatan lainnya adalah pelayanan *day care* bagi lansia. *Day care* di PSTW dilakukan dengan membuka kesempatan kepada semua lansia di kota Bengkulu dan sekitarnya untuk dapat melakukan aktifitas sejak pagi sampai sore, namun untuk istirahat malam tetap dilakukan di rumah masing-masing. Model pelayanan *day care* ini memungkinkan para lansia mendapatkan aktifitas yang sistematis, dengan didampingi oleh tenaga ahli, dengan fasilitas yang lebih memadai, namun mereka masih bisa bertemu dengan keluarganya setiap hari.

Secara umum, pelayanan *day care* di PSTW akan memiliki manfaat sebagai berikut: 1) Membantu lansia yang selama ini di rawat di rumah untuk mendapatkan aktifitas pagi sampai sore secara sistematis dan komprehensif, dengan pendampingan dari tenaga ahli dan sarana prasarana yang memadai, namun mereka tetap bisa istirahat dan bertemu dengan keluarganya di rumah. Pelayanan sistematis dipahami sebagai sebuah pelayanan perawatan lansia yang dijalankan melalui tahapan-tahapan sistematis sejak dari asesmen masalah/kebutuhan lansia, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan terminasi kegiatan, yang kesemua tahapan tersebut dilakukan dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur dengan focus utama pada kesejahteraan hidup lansia. Komprehensif dalam pelayanan *day care* diartikan sebagai pelayanan yang dilakukan bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis lansia saja, namun juga dirancang untuk memenuhi aspek kebutuhan lansia yang lain seperti pemenuhan kebutuhan mental, kebutuhan sosial bahkan kebutuhan spiritual lansia. 2) Membangun Kembali ikatan kekeluargaan para lansia dan keluarganya yang selama ini kurang optimal. Lansia yang selama ini di rawat di PSTW dapat memenuhi kerinduannya untuk bertemu dan berinteraksi dengan keluarganya. Sedangkan lansia yang sekarang di rawat di rumah

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

namun karena keterbatasan keluarga (kesibukan bekerja, keterbatasan ekonomi, dll) yang menyebabkan lansia kesepian di rumah, dapat beraktifitas di PSTW dan mengikuti kegiatan secara sistematis dan komprehensif.

Dua kegiatan utama perawatan lansia, baik pembentukan peguyuban keluarga lansia maupun pelayanan *day care*, penting untuk kita memperhatikan potensi dan kemampuan lansia tersebut sebagai landasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Ponnuswami, Francis dan Udhayakumar (2012) dalam Syamsuddin, Kanya Eka Santi dan La Alimuddin (2018), yang menulis tentang pendekatan kekuatan untuk praktik pekerjaan sosial dengan lansia dengan penegasan bahwa saat bekerja dengan lansia, pendekatan kekuatan sangat berguna dengan memandang bahwa kebanyakan lansia memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan serangkaian keterampilan. Hal ini bisa menggeser pendekatan pelayanan lansia yang hanya memandang lansia sebagai beban dan selalu tergantung orang lain.

Saleebey (1996) juga menyatakan bahwa pendekatan kekuatan meyakini bahwa setiap orang, memiliki potensi internal dan eksternal, kompetensi serta sumber daya. Potensi dan sumber inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan paguyuban keluarga lansia dan kegiatan *day care*. Mengacu pada pendapat Saleebey dalam Ishartono (2016), terdapat lima prinsip yang mengarahkan asumsi perspektif kekuatan tersebut, 1) Setiap individu, kelompok, keluarga dan masyarakat memiliki kekuatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lansia pada dasarnya masih mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan, minimal untuk menunjang kehidupannya sendiri. 2) Trauma, siksaan, sakit, dan perjuangan dapat membuat luka, tetapi hal tersebut dapat dijadikan sumber tantangan dan kesempatan/peluang. Beberapa lansia yang masih memiliki keluarga namun karena kesibukannya atau karena ketidakmampuannya merawat lansia, kemudian menitipkannya pada panti, tentu sajamelakukan luka batin pada lansia. Situasi ini bisa dikelola menjadi kekuatan lansia untuk tetap hidup dan bermanfaat, dengan tetap mendorong penyatuan lansia dalam keluarganya. 3) Diasumsikan bahwa kita sama sekali tidak mengetahui batas atas dari kapasitas untuk terus tumbuh dan berubah, dan melakukan aspirasi individu, kelompok dan masyarakat secara serius. Prinsip ini pada dasarnya merupakan kesadaran bagi pekerja sosial ataupun profesi pendampingan lainnya, bahwa pendamping tidak lebih memahami potensi dan kemampuan lansia. Oleh karena itu pendampingan lansia juga diarahkan pada bagaimana proses perawatan mendorong lansia mengeluarkan potensi dan kemampuannya. 4) Kita lakukan pelayanan terbaik kepada klien dengan berkolaborasi bersamanya, yang menciptakan potensi lebih besar akan dirinya sendiri. Kegiatan dalam paguyuban lansia dan *day care* nanti merupakan kegiatan kolaboratif antara semua pihak yang terkait dengan perawatan lansia. 5) Setiap lingkungan penuh dengan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan sosial. Prinsip ini memberikan tantangan kepada tenaga perawatan lansia untuk mengidentifikasi sumber-sumber perawatan lansia baik yang berasal dari keluarga lansia, dari masyarakat di lingkungan lansia, dari pemerintah, maupun dari pihak-pihak yang peduli dengan perawatan lansia. Kemampuan mengidentifikasi dan membangun jejaring kerja dengan sumber-sumber layanan perawatan lansia ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya perawatan lansia.

Berbagai macam kegiatan atau layanan yang diperuntukkan bagi lansia, yang terpenting semuanya mencoba untuk memenuhi sebagian besar keperluan fisik dan psikologis, dan kebutuhan sosial spiritual lansia. Kebutuhan fisik diantaranya: ketersediaan sarana tempat tinggal yang kondusif dan memadai bagi lansia. Sementara kebutuhan sosial psikologis lansia diantaranya: kedekatan dengan kerabat keluarga dan teman-temannya, serta ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan dan rekreasi (Elizabeth B. Hurlock: 1980)

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Perawatan lansia di dalam panti (PSTW) maupun di rumah mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pelaksanaan perawatan lansia di panti lebih sistematis, terencana serta didukung sumber daya manusia yang memadai, sementara perawatan lansia di rumah meskipun kurang sistematis, namun lebih membuat nyaman kehidupan lansia karena kedekatan dengan keluarga dibandingkan dengan lansia yang tinggal di panti. 2) Perawatan lansia

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

baik di panti maupun di rumah akan optimal dan efektif manakala ditunjang dengan kegiatan yang sistematis, meliputi aspek perawatan fisiologis, mental, sosial dan perawatan spiritual, dengan penekanan pada perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia dan optimalisasi keterlibatan keluarga dalam perawatan lansia.

## 6. Saran

Berdasarkan atas situasi dan kondisi perawatan lansia di PSTW dan di rumah, maka direkomendasikan perlunya pembentukan “paguyuban keluarga lansia” dan perlunya layanan perawatan jalan (*day care*) di PSTW. Perawatan ini merupakan kolaborasi antara perawatan lansia di dalam lembaga dengan perawatan di rumah, yang ditandai dengan aktifitas lansia dari pagi sampai sore dilaksanakan di lembaga, namun setelah itu menjalani aktifitas dan beristirahat di rumah. Melalui *day care* ini diharapkan para lansia di Kota Bengkulu mendapatkan kesempatan melakukan aktifitas secara sistematis dan komprehensif, dengan didampingi tenaga ahli dan sarana yang memadai, namun pada hari yang sama masih tetap bisa bertemu dengan keluarganya di rumah.

## Ucapan Terima kasih

Seluruh penulis dalam artikel ini merupakan kontributor utama yang terlibat langsung dalam penelitian mulai dari penggalan ide/gagasan, persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data sampai pada penyusunan artikel. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aksan S.Sos selaku kepala panti dan Mas Nurkholik SST selaku pekerja sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Bengkulu yang berkenan memberikan data serta berdiskusi tentang situasi dan kondisi pelayanan sosial, khususnya perawatan bagi lansia. Ungkapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh informan baik lansia maupun keluarganya yang berkenan bercerita tentang situasi dan kondisi perawatan lansia baik didalam institusi maupun perawatan lansia di rumah.

## Daftar Pustaka

- Audina Ika, Candrawati Erlisa , Adi W Ragil Catur, 2018, Perbedaan Kualitas Hidup Lansia yang Tinggal Di Panti Sosial dengan lansia Yang Tinggal Di Rumah, Nushing News Jurnal Ilmiah Keperawatan, Vol 3 No 2 2018.
- Bernadeta, Ari E.( 2017). Hubungan Kemandirian Dengan Kualitas Hidup Pada Lansia di Desa Margajaya RW 13 Kecamatan Ngamprah, Immanuel Jurnal Ilmu Kesehatan Volume 11, Nomor 1, Juni 2017 ISSN 1410-234X
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. (2014). Pedoman Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Rumah (Home care), dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2014
- Ishartono, Tri Raharjo Santoso, 2016, Perspektif Kekuatan dalam Pekerjaan Sosial, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial E M P A T I Vol. 5 No. 1 Juni 2016
- Hurlock B E. (1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima. PT Gelora Aksara Pratama.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2011). *Community Based Home Care for Older People, Minimum Standards of Home Care for Older People in Red Cross Red Crescent volunteer-based programming in the Europe Zone,*
- Indriana Y. (2012). Gerontologi & Progeria. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2012
- Murni, R. (2008), Interaksi Sosial Klien dengan Lingkungan Sosial, Studi pada PSTW Budi Dharma, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13, No 03, 2008: 51-60
- Nurfatimah R, Sulastrri Rifa'I S M, Jubaedah Y. (2017). Perancangan Program Pendampingan Lanjut Usia Berbasis Home care Di Posbindu Kelurahan Geger Kalong, *Jurnal Family Edu, Vol III No.2 Oktober 2017*
- Osira Y, Risdiyanto B. (2020). Home Care bagi Lanjut Usia Miskin. Dalam Fahrudin A, HA Malek

**Yessilia Osira, Bayu Risdiyanto**

Model Perawatan Lanjut Usia: Studi Komparatif Perawatan Lansia di dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah

- DM, Suryanto, Nurhidayah. Inovasi Bisnis dan Sosial di Era Disruptif. Total Media Yogyakarta.2012. halaman 91-106.
- Padmiati Etty, Diyanayati Kissumi, 2015, Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga Family Based Aged's Social Service, Jurnal PKS Vol 14 No 3 September 2015; 329 - 342
- Pae Kristina. (2017). Perbedaan Tingkat Depresi Pada Lansia Yang Tinggal Di Panti Werdha Dan Yang Tinggal Di Rumah Bersama Keluarga, Jurnal Ners LENTERA, Vol. 5, No. 1, Maret 2017
- Ponnuswami, I., Francis, A., & Udhayakumar, P, (2012), *Strengths -based approach to social work practice with older person*. In Pulla, Venkat, Chenoweth, Lesley, Francis, Abraham, and Bakaj, Stefan, (eds) *Papers in Strengths Based Practice*, Allied Publisher, New Delhi, India, pp. 150-161. Retrived from <https://researchonline.jcu.edu.au/25554/>
- Putra1 Iqbal Prasetya, Agrina , Utami Gamy Tri, 2014, Perbandingan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Dengan Lansia Di Keluarga, JOM PSIK VOL.1 NO.2 Oktober 2014
- Saleebey, D. (1996) *Strengths perspective insocial work practice: Extentons and cautions*, National Association of Social Work Inc.
- Sulastri Sri, Humaedi Sahadi, 2017, Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti, PROSIDING KS: RISET & PKM VOLUME: 4 NOMOR: 1 HAL: 1 - 140 ISSN: 2442-4480
- Syamsuddin, Santi KE, La Alimuddin. (2018). Keberfungsian Sosial Lanjut Ujia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Di Kota Kendari. *Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 7, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2018*
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998, *Tentang Kesejahteraan Lansia*
- Badan Pusat Statistik (BPS).(2018). Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2018





## Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan

Haffuaddi<sup>1\*</sup> , Ety Rahayu<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

\*Korespondensi: [haffuaddi@ui.ac.id](mailto:haffuaddi@ui.ac.id) ; Tel: (+62) 8118806776

Diterima: 2 Juni 2021; Disetujui: 27 Januari 2022; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Tingkat Kualitas Layanan, dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako di area perkotaan dan di area pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako terhadap Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data diambil dari sumber primer menggunakan metode survey. Unit analisis penelitian adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pada saat penelitian dilakukan pernah menerima manfaat Program Sembako minimal selama 6 bulan berturut-turut. Kualitas Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji beda independent t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Layanan dan Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako berbeda secara signifikan di area perkotaan dan di area pedesaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan KPM Program Sembako. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan segregasi wilayah pada Program Sembako dan menjadikan kualitas layanan sebagai fokus dari program. Hasil penelitian juga merekomendasikan peningkatan kualitas layanan Program Sembako, terutama terkait jenis produk, kualitas produk, dan kuantitas produk di e-warong.

**Kata kunci:** Program bantuan pangan, people centered program, evaluasi kepuasan, Program Sembako.

**Abstract:** The first objective of this study is to identify any significant differences between Income, Food Expenditure, Non-Food Expenditure, Quality Service, and the Satisfaction of the Beneficiaries of Program Sembako (Nine Essential Food Materials Program) in urban area and in rural area. The second objective of this study is to understand the impact of Income, Food Expenditure, Non-Food Expenditure, Quality Service towards the Satisfaction of the Beneficiaries of Program Sembako. The study uses a quantitative research approach. Primary data was collected by questionnaire from the urban area of Kelapa Gading Timur sub-district of North Jakarta and the rural area of Cisarua Village of Sukabumi. The unit of analysis of the study is the beneficiary family of the Program Sembako. The study employs the multiple linear regression analysis and the t-test analysis. The result shows that there are significant differences between the quality services and the satisfaction of beneficiaries in these two areas. The result also shows that quality service of Program Sembako is the only independent variables that significantly affects satisfaction of beneficiaries. The Quality of Service positively impacts the satisfaction of Beneficiaries. Hence, the result recommends that the urban-rural segregation is unnecessary and the improvement of quality services especially related to the diversity, quality, and quantity of products in e-warong.

**Keywords:** Nutrition transfer program, people centered program, Satisfactory Evaluation, Program Sembako.

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi sumber masalah dalam pembangunan, upaya untuk mengatasinya terus dilakukan. Berbagai program sudah dilakukan, bahkan terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan *Sustainable Development Goals*. Salah satu target yang hendak dicapai dalam *Sustainable Development Goals* adalah menghapus kemiskinan di dunia (BAPPENAS, 2017). Untuk kasus Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per bulan September 2020 adalah sebanyak 27,55 juta orang atau sebesar 10,19 % dari total seluruh penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2020 sebesar 7,88 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 13,20 persen (BPS, 2021a).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menggelontorkan Program Sembako. Program Sembako merupakan bentuk program bantuan pangan, dimana masyarakat memperoleh uang tunai dalam jumlah tertentu yang hanya dapat dibelanjakan untuk produk yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Program Sembako sebelumnya dikenal sebagai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelaksanaan BPNT pertama kali dimulai pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Terdapat 44 kabupaten/kota yang terpilih sebagai uji coba pelaksanaan Program BPNT. Besaran BPNT adalah Rp110.000,- / Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/bulan. Sejak Januari 2020 besaran Bantuan Pangan Non Tunai menjadi berjumlah Rp150.000,- /KPM/ bulan. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020, maka Program BPNT berganti nama menjadi Program Sembako dan besaran bantuan yang diterima KPM naik menjadi Rp200.000,-. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong, baik e-warong Kube Jasa, RPK (Rumah Pangan Kita), BRlink, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan.

Pendapatan keluarga merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut dapat digolongkan sebagai keluarga miskin atau tidak. Kemiskinan dapat definisi dengan gampang, yaitu ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi makan dan minum (Chaigneau et al., 2019; Navické et al., 2019). Sebagian besar definisi kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan dan kebercukupan (Chaigneau et al., 2019; Navické et al., 2019).

Disisi lain, untuk mengukur apakah suatu keluarga tergolong miskin atau tidak dapat dilihat dari pengeluaran perbulannya. Dari sisi pengeluaran, perlu untuk menentukan terlebih dahulu garis kemiskinan. Jika pengeluarannya di bawah garis kemiskinan maka keluarga tersebut dapat digolongkan dalam keluarga miskin. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,-/kapita/bulan (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp119.943,-/kapita/bulan (26,13 persen). Per September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2020). Dengan mengikuti angka rata-rata ini, maka Program sembako Rp200.000,- hanya memenuhi sekitar 8% dari kebutuhan konsumsi rata-rata per bulan rumah tangga.

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

Standar layanan Program Sembako telah ditentukan sama untuk seluruh wilayah implementasi Program Sembako berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 (TPPPBSSN, 2019). Standar layanan ini dapat menjadi dasar ekspektasi kualitas layanan Program Sembako untuk seluruh wilayah Indonesia.

Selain standar layanan Program Sembako yang diharapkan dapat menjadi *baseline* pengukuran manfaat Program Sembako, aspek kewilayahan diduga juga dapat mempengaruhi manfaat Program Sembako bagi penerima manfaat. Studi sebelumnya (Gertler et al., 2012; Henning-Smith et al., 2021; Saavedra, 2016) telah menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, diantaranya adalah tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran. Menurut Saavedra, pendapatan merupakan salah satu alat untuk mengukur garis kemiskinan (Saavedra, 2016). Faktor lain yang bervariasi antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan adalah pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran penduduk bervariasi mengikuti dinamika kenaikan dan penurunan harga. BPS mencatat adanya perbedaan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bervariasi di setiap kota besar di Indonesia (BPS, 2021b). Selain adanya perbedaan IHK pada setiap kota besar per provinsi, perbedaan harga juga umum terjadi di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Berdasarkan klasifikasi BPS (2010), daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif selevel desa/kelurahan dengan persyaratan, yaitu: memenuhi kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya, dan daerah pedesaan adalah suatu wilayah administratif selevel desa/kelurahan yang belum dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, seperti: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Produk dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu produk dalam bentuk barang dan produk dalam bentuk jasa (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Produk dalam bentuk barang bersifat *tangible* (berwujud dan bisa disentuh). Produk dalam bentuk jasa/layanan bersifat *intangible* (tidak berwujud). Kualitas layanan produk jasa sangat bergantung pada tiga hal, yaitu: sistem, teknologi dan manusia, namun manusia adalah penentu utama. Manusia mengontrol kualitas produk jasa dan menentukan kepuasan konsumen (Chowdhary & Prakash, 2007). Kualitas layanan produk jasa dapat dinilai dari lima faktor (Chowdhary & Prakash, 2007; Nuraeni & Noviyani, 2017; Lupiyoadi & Hamdani, 2006), yaitu: (1) *reliability* (kehandalan), yaitu terkait dengan kemampuan layanan untuk memberikan layanan sesuai janji, (2) *responsiveness*, yaitu kemampuan layanan untuk memberikan layanan dengan cepat dan responsif, (3) *assurance* (keterjaminan), yaitu kemampuan layanan untuk memberikan kepastian, (4) *emphaty* (empati), yaitu kemampuan layanan untuk memberikan pelayanan yang ramah, komunikasi yang baik, dan memenuhi kebutuhan konsumen, (5) *tangible* (bukti fisik), yaitu terkait fasilitas fisik penunjang layanan.

Mengadopsi konsep kepuasan dari bidang manajemen pemasaran jasa, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian produk atau standar kinerja yang diharapkan dan dengan kinerja produk setelah produk dibeli (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Pada produk jasa/layanan, kepuasan konsumen adalah respon atas pelayanan yang diterima antara ekspektasi di awal sebelum membeli layanan dan setelah membeli layanan (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Pada program sosial, Henning-Smith et al. (2021) dan (Setiadi & Rahman, 2016) menjelaskan bahwa kepuasan penerima manfaat program/bantuan sosial dapat diukur dengan mengevaluasi persepsi terkait harapan awal sebelum program/bantuan sosial didapatkan dengan kinerja program/ bantuan sosial yang sebenarnya.

Selanjutnya, pada konteks pembangunan, keberhasilan program/bantuan harus dianalisis berdasarkan keberhasilan program/bantuan sosial memenuhi tujuan diselenggarakannya program/bantuan sosial tersebut (Triyana & Shankar, 2017; Wu & Ramesh, 2014). Tujuan-tujuan ini selanjutnya dapat menjadi parameter harapan awal penerima manfaat terhadap program. Tujuan-tujuan ketercapaian program bantuan pangan, antara lain adalah: (1) Terpenuhinya pengeluaran konsumsi makanan (Anuciata, 2017; Saavedra, 2016); (2) Meningkatnya frekuensi mengkonsumsi makanan menjadi lebih sering (Aguila et al., 2017a; de Groot et al., 2017; Saavedra, 2016); (3)

Haffuaddi & Rahayu

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

Meningkatnya kualitas nutrisi makanan menjadi lebih baik (de Groot et al., 2017; Huda et al., 2018); (4) Meningkatnya kesinambungan/ keteraturan konsumsi makanan (Aguila et al., 2017); (5) Meningkatnya rasa aman terhadap ketersediaan makanan (Palmeira et al., 2020); (6) Meningkatnya perasaan subjektif lebih sejahtera (Khomaini, 2020; Palmeira et al., 2020; Saavedra, 2016). Selain tujuan global program bantuan pangan diatas, secara lebih spesifik, pada penelitian terkait Program Sembako, kinerja Program Sembako harus dikaitkan dengan tujuan Program Sembako sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 (TPPPBSSN, 2019) sebagai berikut: (1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, (2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, (3) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Apabila ditilik, tujuan Program Sembako poin 1 dan 2 diatas bila dilihat sudah sejalan dengan tujuan global program bantuan pangan sebagaimana telah diungkapkan, antara lain, oleh Saavedra (2016), de Groot et al. (2017), dan Huda et al., (2018).

Penelitian terkait manfaat dan tingkat kepuasan penerima program sosial sudah dilakukan beberapa peneliti antara lain Wu & Ramesh (2014), Bauhoff et al. (2011), Aguila et al. (2017), Hagen-Zanker & Leon Himmelstine (2015), dan Muhtar (2018). Penelitian terkait program bantuan sosial yang memasukkan faktor kewilayahan juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu antara lain Gertler et al. (2012) dan Henning-Smith et al. (2021). Penelitian yang terkait dengan program sejenis di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Yusuf (2018) dan Triyana & Shankar (2017). Terkait dengan program bantuan pangan di Indonesia, beberapa penelitian telah dilakukan, antara lain oleh Hermawati & Winarno (2020), Risnandar & Broto (2018), dan Sabarisman & Suradi (2020) yang berfokus pada implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai.

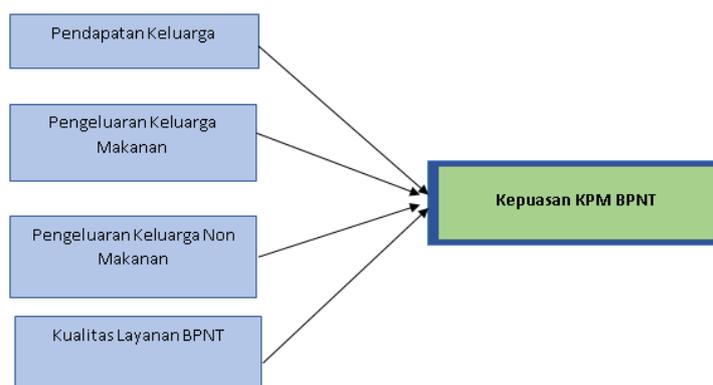
Walaupun beberapa penelitian terkait tingkat kepuasan penerima manfaat program sosial sudah dilakukan, dan penelitian terkait program sosial yang memasukkan unsur perkotaan-pedesaan juga sudah dilakukan, namun sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang meneliti tingkat kepuasan penerima manfaat program sosial pangan, khususnya Program Sembako, di Indonesia, dengan menganalisis variabel bebas kualitas pelayanan dan variabel bebas yang terkait dengan aspek perkotaan-pedesaan, yaitu pendapatan, pengeluaran makanan, dan pengeluaran non makanan.

Sejalan dengan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Tingkat Kualitas Layanan, dan Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako di area perkotaan dan area pedesaan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, dan Kualitas Layanan Program Sembako terhadap Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako.

## 2. Metode

Penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian pada level *empirical*, dimana peneliti melakukan pengujian konsep abstraksi tentang sebuah *phenomena* sosial untuk melihat bagaimana realitas yang ada di lapangan sesuai dengan konstruk yang dibuat pada desain penelitian. Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif dimana biasanya penelitian diawali dengan kerangka konsep yang sudah ada dan selanjutnya menggunakan kerangka ini untuk mengambil data di lapangan. Hasil penelitian kuantitatif umumnya disajikan dalam bentuk angka dan data.

Terkait dengan tujuan penelitian kedua, yaitu memahami apakah tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran makanan, tingkat pengeluaran non makanan, tingkat kualitas layanan akan mempengaruhi tingkat kepuasan Program Sembako, maka kerangka konseptual penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Peneliti (2021)

Pada kerangka konseptual diatas, variabel Tingkat Pendapatan Keluarga, Tingkat Pengeluaran Keluarga Makanan, Tingkat Pengeluaran Keluarga Non Makanan, dan Tingkat Kualitas Layanan bertindak sebagai variabel bebas. Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat bertindak sebagai variabel terikat.

Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah dalam satuan keluarga, yaitu keluarga penerima manfaat Program Sembako. Unit analisis adalah objek atau orang yang menjadi target penelitian (Bhattacharjee, 2012). Objek pada unit analisis bisa berupa orang, organisasi, negara, atau dalam bentuk lainnya.

Lokasi penelitian ada dua. Sebagai representasi wilayah perkotaan akan diambil Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020). Sebagai representasi wilayah pedesaan akan diambil Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi (BPS Kabupaten Sukabumi, 2020). Kedua wilayah ini diambil karena mewakili administratif perkotaan dan pedesaan, dan keduanya memiliki sebaran keluarga penerima manfaat Program Sembako.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan perangkat kuesioner.

Responden akan dipilih secara random dari daftar nama Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah sampel pada penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus Slovin (Bhattacharjee, 2012) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = error margin.

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel yang diambil di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan populasi N = 145 dan margin error penelitian e = 0,10 adalah 60 sampel. Sedangkan jumlah sampel yang diambil di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi N = 715 dan margin error penelitian e = 0,10 adalah 88 sampel. Untuk penelitian sosial, margin error 10% masih memadai (Silalahi, 2006).

Hipotesis penelitian dikembangkan dengan mengikuti tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas. Hipotesis penelitian ini adalah:

H11: Tingkat Pendapatan di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan Tingkat Pendapatan di wilayah perkotaan.

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

- H21: Tingkat Pengeluaran Makanan di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan Tingkat Pengeluaran Makanan di wilayah perkotaan.
- H31: Tingkat pengeluaran Non Makanan di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan Tingkat pengeluaran Non Makanan di wilayah perkotaan.
- H41: Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan Tingkat Kualitas Layanan di wilayah perkotaan.
- H51: Tingkat Kepuasan KPM di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan Tingkat Kepuasan KPM di wilayah perkotaan.
- H61: Tingkat Pendapatan Keluarga, Tingkat Pengeluaran Keluarga Makanan, Tingkat Pengeluaran Keluarga Non Makanan, dan Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako.

Operasionalisasi indikator variabel dapat dilihat pada **Tabel 1**. Penelitian ini menggunakan empat buah variabel bebas, yaitu Tingkat Pendapatan Keluarga, Tingkat Pengeluaran Keluarga Makanan, Tingkat Pengeluaran Keluarga Non Makanan, Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako, dan satu buah variabel terikat yaitu Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako.

**Tabel 1.** Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Parameter	Indikator	Kode
Tingkat Pendapatan Keluarga.	Nominal pendapatan keluarga adalah mencukupi.	Nominal pendapatan keluarga per bulan.	X1
Tingkat Pengeluaran Keluarga Makanan.	Nominal pengeluaran keluarga makanan diatas Garis Kemiskinan Makanan (GKM).	Nominal pengeluaran keluarga makanan per bulan.	X2
Tingkat Pengeluaran Keluarga Non Makanan.	Nominal pengeluaran keluarga non makanan diatas Garis Kemiskinan Makanan (GKM).	Nominal pengeluaran keluarga non makanan per bulan.	X3
Tingkat Kualitas Layanan	Kesesuaian jenis layanan antara yang dijanjikan dan diberikan adalah memuaskan ( <i>reliability</i> )	Komponen produk yang tersedia di E-warong.	X41
		Jenis produk yang tersedia di E-warong	X42
		Kualitas produk yang tersedia di E-warong	X43
		Kuantitas produk yang tersedia di E-warong.	X44
		Kecepatan layanan Program Sembako adalah memuaskan ( <i>responsiveness</i> ).	Ketepatan waktu transfer dana ke masing-masing rekening KPM.
		Kecepatan petugas E-warong melayani KPM.	X46
	Keterjaminan keberlangsungan layanan Program Sembako adalah memuaskan ( <i>assurance</i> ).	Kejelasan status KPM.	X47
Komunikasi pelaksana Program Sembako adalah memuaskan ( <i>empaty</i> ).		Keramahan fasilitator program.	X48
		Empati fasilitator program untuk mendengarkan keluhan.	X49

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

		Keramahan petugas E-warong dalam melayani KPM,	X410
		Empati petugas E-warong mendengarkan keluhan KPM.	X411
	Fasilitas fisik penunjang layanan Program Sembako adalah memuaskan ( <i>tangible</i> ).	Jarak rumah KPM dengan E-warong.	X412
		Ketersediaan mesin EDC di E-warong.	X413
		Ketersediaan timbangan barang di E-warong.	X414
Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako	Terpenuhinya pengeluaran konsumsi makanan.	Proporsi pengeluaran bulanan untuk makanan yang terpenuhi oleh Program Sembako.	Y11
	Meningkatnya frekuensi mengkonsumsi makanan.	Jumlah kali makan per hari.	Y12
	Meningkatnya kualitas nutrisi makanan.	Kualitas nutrisi setiap kali makan.	Y13
	Meningkatnya kesinambungan/keteraturan konsumsi makanan.	Keteraturan waktu makan setiap hari.	Y14
	Meningkatnya rasa aman terhadap ketersediaan makanan.	Persepsi terhadap rasa aman akibat ketersediaan makanan.	Y15
	Meningkatnya rasa sejahtera.	Persepsi terhadap rasa aman akibat ketersediaan makanan.	Y16
	Meningkatkan pilihan dan kendali untuk menentukan pilihan pangan.	KPM bebas menentukan pilihan makanan.	Y17

Sumber: Penelitian (2020)

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif sebagai metode analisis utama. Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis uji beda, dan analisis regresi multivariat.

### 1. Analisis statistik deskriptif.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggeneralisasi, dan menampilkan nilai dari variabel dan hubungan antar nilai variabel (Bhattacharjee, 2012). Analisis statistik deskriptif menampilkan antara lain nilai mean, median, modus, dan standar deviasi. Pada penelitian ini, analisis deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggeneralisasi, dan menampilkan nilai dari variabel-variabel demografis responden (misal jumlah anggota keluarga penerima manfaat, pendapatan keluarga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan lainnya). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak SPSS 24.

### 2. Analisis Validitas

Analisis validitas melihat apakah variabel dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Bhattacharjee, 2012). Sebuah indikator memiliki tingkat validitas yang baik apabila indikator ini berhasil mengukur secara konseptual apa yang ingin diukur berdasarkan *conceptual model* penelitian. Validitas konstruk diukur dengan koefisien korelasi antara skor masing-masing indikator/item pertanyaan dengan skor totalnya/faktor (Neuman, 2006). Uji validitas ini menggunakan korelasi product moment, sebagai berikut:

$$r_w = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

- $\sum X = \dots \sum Y = \dots \sum XY = \dots \sum X^2 = \dots \sum Y^2 = \dots n = \dots$   
 $X$  = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item  
 $Y$  = Skor total yang diperoleh dari seluruh item  
 $\sum X$  = Jumlah skor dalam distribusi  $X$   
 $\sum Y$  = Jumlah skor dalam distribusi  $Y$   
 $\sum X^2$  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi  $X$   
 $\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi  $Y$   
 $N$  = Banyaknya responden

### 3. Analisis Reliabilitas

Analisis reliabilitas melihat apakah suatu indikator konsisten mengukur variabel yang sama secara berulang (Bhattacharjee, 2012). Reliabilitas merupakan suatu tingkatan untuk mengukur konsistensi hasil apabila dilakukan pengukuran yang berulang pada suatu karakteristik. Pengujian reliabilitas dihitung menggunakan formula Cronbach's alpha yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left( \frac{s_x^2 - \sum_{j=1}^k s_j^2}{s_x^2} \right)$$

Dimana:

- $\alpha$  = Nilai Cronbach alpha.  
 $S_j^2$  = Varians skor item ke-j dimana  $j = 1, 2, \dots, k$ .  
 $k$  = Banyaknya item yang diuji.  
 $S_x^2$  = Varians skor total keseluruhan item.

Rumus diatas secara empiris menyatakan bahwa hasil  $\alpha < 0,6$  mengindikasikan bahwa konsistensi internal tidak memuaskan (Bhattacharjee, 2012). Sebuah indikator dikatakan memiliki reliabilitas baik apabila memiliki konsistensi internal memuaskan atau jika nilai  $\alpha \geq 0,6$ . Reliabilitas konsistensi internal merupakan suatu pendekatan untuk menaksir konsistensi internal dari kumpulan item/indikator, dimana beberapa item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total untuk menilai sebuah konstruk/variabel laten.

### 4. Analisis Uji Beda

Analisis uji beda digunakan untuk melihat keberadaan perbedaan yang signifikan antara dua (2) variabel. Penelitian ini dapat menggunakan uji beda *parametric t-test*. Uji t-test memperlihatkan seberapa signifikan perbedaan antara nilai rata-rata (*mean*) dua grup yang tidak terkait (*independent*) (Bhattacharjee, 2012). Asumsi yang digunakan pada t-test adalah:

- (1) Dua grup yang dinilai adalah tidak berasal dari responden yang sama (*independent*).
- (2) Data terdistribusi normal.
- (3) Varians dari dua group yang dinilai bersifat *homogeneous*.

Rumus dari t-test:

$$t = \frac{\mu_A - \mu_B}{\sqrt{\left[ \frac{(\sum A^2 - \frac{(\sum A)^2}{n_A}) + (\sum B^2 - \frac{(\sum B)^2}{n_B})}{n_A + n_B - 2} \right] \cdot \left[ \frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right]}}$$

Dimana:

- t = t-test score.
- $\mu_A$  = Mean of data set A.
- $\mu_B$  = Mean of data set B.
- $(\sum A)^2$  = Squared of the sum of data set A.
- $(\sum B)^2$  = Squared of the sum of data set B.
- $\sum A^2$  = Sum of the squares of data set A.
- $\sum B^2$  = Sum of the squares of data set B.
- $n_A$  = Number of items in data set A.
- $n_B$  = Number of items in data set B.

### 5. Analisis Uji Regresi

Uji regresi adalah *Analisis statistik inferensial* yang bertujuan melihat apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat (dependent)
- X (1,2,3,..) = Variabel bebas (independent)
- a = nilai konstanta
- b (1,2,3,...) = nilai koefisien regresi

## 3. Hasil

Bagian ini menyajikan hasil dan analisis terhadap hasil statistik pada penelitian ini.

### 3.1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2** memperlihatkan profil responden terkait gender, umur, responden, tingkat pendidikan responden, dan pekerjaan responden.

Profil	Kota dan Desa	Kota	Desa
<b>Gender</b>			
Laki-laki	6.8 %	8.3 %	5.7 %
Perempuan	93.2 %	91.7 %	93.1 %
Total	100.0 %	100.0 %	100.0 %
<b>Usia</b>			
Mean	45.3219	47.3667	43.8953
Std	12.08	10.56	12.91
<b>Pendidikan</b>			
Tamat S1/ S2/ S3	.7 %	0 %	1.2 %
Tamat D3/ D4	.7 %	1,7 %	0 %

Haffuaddi & Rahayu

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

Tamat SMA/ sederajat	11.0 %	20 %	4.7 %
Tamat SMP/ sederajat	13.7 %	15 %	12.8 %
Tamat SD/ sederajat	41.8 %	30 %	50.0 %
Tidak tamat SD	32.2 %	33,7 %	31.4 %
Total	100.0%	100%	100%
<b>Pekerjaan</b>			
Ibu rumah tangga	65.1%	60%	69.8%
Karyawan/ buruh	.7%	1,7%	0%
Nelayan pemilik kapal	.7%	0%	69.8%
Pedagang	9.6%	13,3%	7.0%
Pekerja lepas (bangunan/ kernet/ dll)	14.4%	25%	7.0%
Petani buruh	8.9%	0%	15.1%
Total	100%	100%	100

Sumber: Hasil olah data (2021)

**Tabel 3** memperlihatkan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran makanan, dan tingkat pengeluaran non makanan.

**Tabel 3.** Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, dan Tingkat Pengeluaran Non Makanan

	Kota dan Desa	Kota	Desa
<b>Tingkat Pendapatan (Rp)</b>			
Mean	2.569.178	2.688.500	2.485.930
Std. D	1.480.939	1.698.998	1.311.720
<b>Tingkat Pengeluaran Makanan (Rp)</b>			
Mean	1.410.055	1.456.830	1.377.965
Std. D	1.436.472	1.559.033	1.350.965
<b>Tingkat Pengeluaran Non Makanan (Rp)</b>			
Mean	1.436.472	1.559.033	1.350.965
Std. D	934.958	750.600	1.040.253

Sumber: Hasil olah data (2021)

Persepsi KPM terhadap indikator-indikator variabel Tingkat Layanan Program Sembako dapat dilihat pada **Tabel 4** dibawah:

**Tabel 4.** Tingkat Layanan Program Sembako (Likert Scale 1 -6)

	Mean $\pm$ Std. D		
	Kota dan Desa	Kota	Desa
Komponen produk yang tersedia di E-warong.	5,39 $\pm$ 0,96	5,21 $\pm$ 1,15	5,67 $\pm$ 0,48
Jenis produk yang tersedia di E-warong.	5,23 $\pm$ 1,13	4,97 $\pm$ 1,35	5,62 $\pm$ 0,49
Kualitas produk yang tersedia di E-warong	4,84 $\pm$ 1,19	4,34 $\pm$ 1,27	5,57 $\pm$ 0,50
Kuantitas produk yang tersedia di E-warong.	5,08 $\pm$ 1,15	4,68 $\pm$ 1,31	5,65 $\pm$ 0,48

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

Ketepatan waktu transfer dana ke masing-masing rekening KPM.	5,71 ± 0,57	5,86 ± 0,51	5,48 ± 0,57
Kecepatan petugas E-warong melayani KPM.	5,61 ± 0,71	5,56 ± 0,83	5,69 ± 0,51
Kejelasan status KPM.	5,81 ± 0,41	5,93 ± 0,30	5,63 ± 0,49
Keramahan fasilitator program.	5,8 ± 0,46	5,88 ± 0,42	5,70 ± 0,50
Empati fasilitator program untuk mendengarkan keluhan.	5,67 ± 0,64	5,73 ± 0,69	5,58 ± 0,53
Keramahan petugas E-warong dalam melayani KPM.	5,41 ± 0,94	5,24 ± 1,12	5,64 ± 0,52
Empati petugas E-warong mendengarkan keluhan KPM.	5,11 ± 1,05	4,79 ± 1,21	5,57 ± 0,53
Jarak rumah KPM dengan E-warong.	5,34 ± 0,94	5,16 ± 1,13	5,60 ± 0,49
Ketersediaan mesin EDC di E-warong.	5,75 ± 0,51	5,81 ± 0,52	5,67 ± 0,48
Ketersediaan timbangan barang di E-warong.	5,22 ± 1,09	4,98 ± 1,30	5,57 ± 0,53
<b>Rata-rata persepsi KPM</b>	<b>5,43 ± 0,84</b>	<b>5,35 ± 0,92</b>	<b>5,62 ± 0,51</b>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Nilai rata-rata indikator-indikator Tingkat Layanan Program Sembako adalah 5,43 dengan standard deviasi 0,84. Secara umum, KPM di wilayah pedesaan mempersepsikan kualitas layanan Program Sembako yang lebih baik dibandingkan KPM di wilayah perkotaan.

Persepsi KPM terhadap Tingkat Layanan Program Sembako dan Tingkat Kepuasan KPM terhadap Program Sembako berdasarkan indikator-indikator yang telah dioperasionalkan pada Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian (Tabel 1) diatas, dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Tingkat Kepuasan terhadap Program Sembako (Likert Scale 1 -6)

	Mean + Std. D		
	Kota dan Desa	Kota	Desa
Proporsi pengeluaran bulanan untuk makanan yang terpenuhi oleh Program Sembako.	5,30 ± 0,81	5,14 ± 0,92	5,53 ± 0,54
Jumlah kali makan per hari.	4,78 ± 0,97	4,49 ± 0,98	5,20 ± 0,78
Kualitas nutrisi setiap kali makan.	5,20 ± 0,79	5,00 ± 0,84	5,48 ± 0,60
Keteraturan waktu makan setiap hari.	5,33 ± 0,68	5,34 ± 0,71	5,32 ± 0,62
Persepsi terhadap rasa aman akibat ketersediaan makanan.	5,38 ± 0,68	5,28 ± 0,75	5,53 ± 0,54
Persepsi terhadap rasa sejahtera.	5,27 ± 0,75	5,08 ± 0,82	5,53 ± 0,54
KPM bebas menentukan pilihan makanan.	5,24 ± 0,71	5,13 ± 0,79	5,40 ± 0,53
<b>Rata-rata Kepuasan terhadap Program Sembako</b>	<b>5,21 ± 0,77</b>	<b>5,16 ± 0,83</b>	<b>5,43 ± 0,59</b>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Nilai rata-rata indikator-indikator Tingkat Kepuasan KPM terhadap Program Sembako secara umum adalah 5,21 dengan standard deviasi 0,77. KPM di wilayah rural merasa lebih puas terhadap Program Sembako dibandingkan KPM di wilayah urban.

Haffuaddi & Rahayu

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

### 3.2. Analisis Validitas dan Reliabilitas Pre-Test

Sebelum peneliti menyebarkan kuesioner sejumlah sampel yang telah ditentukan, pertama-tama peneliti melakukan pre-test dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 50 orang responden untuk mengecek validitas dan reliabilitas dari desain pertanyaan kuesioner.

#### 3.2.1. Hasil Uji Validitas Pre-Test

Suatu indikator dianggap valid apabila indikator tersebut memenuhi beberapa parameter, yaitu nilai Kaiser-Mayer-Olkin atau KMO > 0.5, Bartlett's Test of Sphrecity < 0.05, dan nilai item variabel memiliki r hitung (rxy) > r table product moment dengan tingkat signifikansi < 0,10 (Bhattacharjee, 2012). Nilai r table product moment (Lampiran 2), maka nilai r – two tailed n =50 p=0,1 adalah 0.184. Hasil uji validitas pre-test yang diperoleh dari output pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 6.

**Table 6.** Hasil uji validitas pre-test (n=50)

Variabel	Indikator	Kaiser-Mayer Olkin	Bartlett's Test of Sphrecity p value	rxy	Pearson correlation p value
X4	X41	0,841	0,000	.782**	0,000
	X42			.787**	0,000
	X43			.880**	0,000
	X44			.818**	0,000
	X45			.780**	0,000
	X46			.859**	0,000
	X47			.878**	0,000
	X48			.786**	0,000
	X49			.844**	0,000
	X410			.812**	0,000
	X411			.836**	0,000
	X412			.699**	0,000
	X413			.796**	0,000
	X414			.836**	0,000
Y1	Y11	0,823	0,000	.685**	0,000
	Y12			.536**	0,000
	Y13			.649**	0,000
	Y14			.608**	0,000
	Y15			.771**	0,000
	Y16			.767**	0,000
	Y17			.615**	0,000

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, untuk variabel laten X4, yaitu Tingkat Layanan Program Sembako, menunjukkan nilai Kaiserr-Mayer Olkin yang diperoleh adalah 0,841 yang melebihi nilai batas bawah 0,5. Nilai Bartlett's Test of Sphrecity p value yang diperoleh adalah 0,000 yang tidak melebihi nilai batas 0,10. Selanjutnya, seluruh variabel memiliki r hitung (rxy) > r table product moment dengan tingkat signifikansi < 0,10. Seluruh nilai p value pearson correlation menunjukkan nilai < 0,10. Hasil test validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang mewakili variabel X4 adalah valid.

#### Haffuaddi & Rahayu

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel laten Y1, yaitu Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako, menunjukkan nilai Kaiserr-Mayer Olkin yang diperoleh adalah 0,823 yang melebihi nilai batas bawah 0,5. Nilai Bartlett's Test of Sphrecity p value yang diperoleh adalah 0,000 yang tidak melebihi nilai batas 0,10. Untuk variabel ini, seluruh indikator adalah valid yang ditunjukkan oleh nilai r hitung ( $r_{xy}$ ) > r table product moment dengan tingkat signifikansi < 0,10 dan seluruh nilai p value pearson correlation menunjukkan nilai < 0,10.

### 3.2.2. Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test

Indikator dianggap reliabel apabila indikator-indikator tersebut memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.6 (Bhattacharjee, 2012). Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pre-test yang diperoleh dari output pengolahan menggunakan SPSS 24.

**Table 7.** Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test (n=50)

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha
X4	X41	0,966
	X42	
	X43	
	X44	
	X45	
	X46	
	X47	
	X48	
	X49	
	X410	
	X412	
	X413	
	X414	
	Y1	
Y12		
Y13		
Y14		
Y15		
Y16		
Y17		

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Hasil pengujian reliabilitas pre-test terhadap 50 responden memperlihatkan nilai Cronbrach's Alpha variabel X4 atau Kualitas Layanan sebesar 0,966 yang lebih besar dari batas minimal 0,6. Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam pengambilan data memiliki reliabilitas yang baik sebagai alat ukur.

Hasil pengujian reliabilitas juga memperlihatkan nilai Cronbrach's Alpha variabel Y1 atau Kepuasan KPM menunjukkan nilai sebesar 0,899 yang lebih besar dari batas minimal 0,6. Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Kepuasan KPM memiliki reliabilitas yang baik sebagai alat ukur.

### 3.3. Analisis Validitas dan Reliabilitas Main-Test

Sebelum masuk pada pengujian hipotesis penelitian, peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap keseluruhan responden sebanyak 146 responden. Hasilnya adalah sebagai berikut:

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

### 3.3.1. Hasil Uji Validitas Main-Test

Berikut ini adalah hasil uji validitas pre-test yang diperoleh dari output pengujian validitas terhadap 146 responden:

**Table 8.** Hasil Uji Validitas Main-Test (n=146)

Variabel	Indikator	Kaiser-Mayer Olkin	Bartlett's Test of Sphrecity p value	rxxy	Pearson correlation p value
X4	X41	0,702	0,000	.631**	0,000
	X42			.663**	0,000
	X43			.705**	0,000
	X44			.528**	0,000
	X45			.476**	0,000
	X46			.365**	0,000
	X47			.267**	0,000
	X48			.355**	0,000
	X49			.441**	0,000
	X410			.595**	0,000
	X411			.622**	0,000
	X412			.475**	0,000
	X413			.309**	0,000
	X414			.661**	0,000
Y1	Y11	0,846	0,000	.572**	0,000
	Y12			.575**	0,000
	Y13			.742**	0,000
	Y14			.397**	0,000
	Y15			.611**	0,000
	Y16			.581**	0,000
	Y17			.639**	0,000

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, untuk variabel laten X4 atau Tingkat Layanan, nilai Kaiserr-Mayer Olkin yang diperoleh adalah 0,712, dan nilai Bartlett's Test of Sphrecity p value yang diperoleh adalah 0,001. Selanjutnya, seluruh variabel memiliki r hitung (rxxy) > r table product moment dengan tingkat signifikansi < 0,10. Seluruh nilai p value pearson correlation menunjukkan nilai < 0,10. Hasil test validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang mewakili variabel Kualitas Layanan adalah valid.

Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel laten Y1, yaitu Tingkat Kepuasan KPM, menunjukkan nilai Kaiserr-Mayer Olkin yang diperoleh adalah 0,846 yang melebihi nilai batas bawah 0,5. Nilai Bartlett's Test of Sphrecity p value yang diperoleh adalah 0,000 dibawah nilai batas atas 0,10. Untuk variabel ini, seluruh indikator adalah valid yang ditunjukkan oleh nilai r hitung (rxxy) > r table product moment dengan tingkat signifikansi < 0,10. Seluruh nilai p value pearson correlation menunjukkan nilai < 0,10. Hasil pengujian validitas sekali lagi menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mewakili variabel Tingkat Kepuasan KPM.

### 3.3.2. Hasil Uji Reliabilitas Main-Test

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas main-test yang diperoleh dari output pengolahan menggunakan SPSS 24.

#### *Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

**Tabel 9.** Hasil Uji Reliabilitas Main-Test (n=146)

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha
X4	X41	0,806
	X42	
	X43	
	X44	
	X45	
	X46	
	X47	
	X48	
	X49	
	X410	
	X412	
	X413	
	X414	
	Y1	
Y12		
Y13		
Y14		
Y15		
Y16		
Y17		

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Hasil pengujian reliabilitas main-test memperlihatkan nilai Cronbrach's Alpha untuk variabel X4 atau Kualitas Layanan Program Sembako sebesar 0,806 yang lebih besar dari batas minimal 0,6 yang menunjukkan reliabilitas yang baik dari alat ukur yang digunakan.

Hasil pengujian reliabilitas main-test memperlihatkan nilai Cronbrach's Alpha untuk variabel Y1 atau Kepuasan KPM Program Sembako sebesar 0,871 yang lebih besar dari batas minimal 0,6, yang menunjukkan reliabilitas yang baik dari alat ukur yang digunakan.

### 3.4. Perbedaan Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Kualitas Layanan Program Sembako, dan Tingkat Kepuasan KPM di wilayah Pedesaan dan Perkotaan.

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan t-test untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Kualitas Layanan Program Sembako, dan Tingkat Kepuasan KPM di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan pada hipotesis H11 s.d H51.

**Tabel 10.** Hasil Pengujian T-Test

Hipotesis	T-value	p-value	Keputusan
H11: Tingkat pendapatan di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan tingkat pendapatan di wilayah perkotaan.	0,812	0,418	H1 ditolak
H21: Tingkat pengeluaran makanan di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan tingkat pendapatan di wilayah perkotaan.	0,843	0,400	H1 ditolak

Haffuaddi &amp; Rahayu

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

H31: Tingkat pengeluaran non makanan di area pedesaan berbeda secara signifikan dengan tingkat pendapatan di wilayah perkotaan.	1,326	0,187	H1 ditolak
H41: Tingkat kualitas layanan Program Sembako di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan tingkat pendapatan di wilayah perkotaan.	4,378	0,000	H1 diterima
H51: Tingkat kepuasan KPM terhadap Program Sembako di wilayah pedesaan berbeda secara signifikan dengan tingkat pendapatan di wilayah perkotaan.	4,673	0,000	H1 diterima

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran makanan, dan tingkat pengeluaran non-makanan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kualitas layanan Program Sembako di pedesaan dan di perkotaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kepuasan KPM terhadap Program Sembako di pedesaan dan di perkotaan.

**3.5. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Kualitas Layanan Program Sembako terhadap Tingkat Kepuasan KPM terhadap Program Sembako.**

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, Kualitas Layanan Program Sembako terhadap Tingkat Kepuasan KPM pada hipotesis H61.

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat Kepuasan KPM terhadap Program Sembako.

X1 = Tingkat Pendapatan

X2 = Tingkat Pengeluaran Makanan

X3 = Tingkat Pengeluaran Non Makanan

X4 = Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako

b1,b2,b3,b4 = koefisien dari x1,x2,x3,x4

e = error.

Hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 <sup>a</sup>	.841	.836	3.77344

a. Predictors: (Constant), Kualitas layanan Program Sembako, Pendapatan dalam satu KK, Pengeluaran non-makanan dalam satu KK, Pengeluaran makanan dalam satu KK

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10506.309	4	2626.577	184.465	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1993.443	140	14.239		
	Total	12499.752	144			

a. Dependent Variabel: Kepuasan KPM

b. Predictors: (Constant), Kualitas layanan Program Sembako, Pendapatan dalam satu KK, Pengeluaran non-makanan dalam satu KK, Pengeluaran makanan dalam satu KK

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.576	3.671		3.970	.000
	Pendapatan dalam satu KK	-2.598E-7	.000	-.041	-1.051	.295
	Pengeluaran makanan dalam satu KK	6.829E-7	.000	.041	.991	.323
	Pengeluaran non-makanan dalam satu KK	1.939E-7	.000	.019	.494	.622
	Kualitas layanan Program Sembako	1.280	.048	.915	26.797	.000

a. Dependent Variabel: Kepuasan KPM

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 24 menunjukkan nilai *adjusted R-square* sebesar 0,836, yang artinya Kepuasan KPM terhadap Program Sembako dapat ditunjukkan sebesar 83,6% oleh variabel-variabel bebas yang tercakup dalam model ini, dan sisanya sebesar 16,4% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Nilai F test menunjukkan sig sebesar 0,000 yang artinya pemodelan secara signifikan adalah valid. Tabel *coefficient* menunjukkan bahwa dari 4 variabel bebas yang diuji, ternyata hanya Kualitas Layanan Program Sembako yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan KPM pada Program Sembako yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,000. Sedangkan variabel bebas Pendapatan, Pengeluaran Makanan, dan Pengeluaran Non Makanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan KPM pada Program Sembako yang ditunjukkan dengan nilai sig diatas 0,10. Hasil akhir pemodelan adalah sebagai berikut:

Kepuasan KPM pada Program Sembako = 14.576 + 1.280 Kualitas Layanan Program Sembako + error.

Nilai koefisien Kualitas Layanan Program Sembako menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit ukur Kualitas Layanan Program Sembako akan menaikkan Kepuasan KPM pada Program Sembako sebesar 1,28 unit ukur. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Program Sembako merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi Kepuasan KPM pada Program Sembako. Sedangkan Pendapatan, Pengeluaran Makanan, dan Pengeluaran Non Makanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan Kepuasan KPM pada Program Sembako.

Haffuaddi & Rahayu

Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan

#### 4. Pembahasan

Beberapa penelitian sebelumnya terkait manfaat dan kepuasan penerima program sosial seperti yang telah dilakukan oleh Wu & Ramesh (2014), Bauhoff et al. (2011), Aguila et al. (2017) telah mendiskusikan implementasi program sosial. Walaupun begitu, penelitian-penelitian ini belum menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan penerima manfaat. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya di bidang program sosial dengan menguji faktor-faktor yang secara empiris mempengaruhi kepuasan penerima manfaat program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kualitas layanan produk jasa sebagaimana telah dijabarkan oleh Chowdhary & Prakash (2007), Nuraeni & Noviyani (2017), dan Lupiyoadi & Hamdani (2006), dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan program sosial. Hasil analisis validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator yang mewakili lima dimensi kualitas produk jasa, yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphaty*, dan *tangible*, dapat secara valid mengukur kualitas layanan Program Sembako. Hasil statistik deskriptif dan dan hasil uji beda menunjukkan bahwa persepsi KPM terkait tingkat layanan Program Sembako di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Dengan mengacu pada definisi kepuasan penerima manfaat program sosial yang diungkapkan oleh Henning-Smith et al. (2021) dan Setiadi & Rahman (2016), bahwa kepuasan penerima manfaat program/ bantuan sosial dapat diukur dengan mengevaluasi persepsi terkait harapan awal sebelum program/ bantuan sosial didapatkan dengan kinerja program/ bantuan sosial yang sebenarnya, maka lebih tingginya persepsi KPM terhadap kualitas layanan Program Sembako di wilayah pedesaan dapat disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu pertama, Program Sembako di wilayah pedesaan memberikan kualitas layanan yang lebih baik, atau, kedua, ekspektasi KPM kota terhadap kualitas layanan Program Sembako lebih tinggi dibandingkan ekspektasi KPM di wilayah pedesaan. Dengan mengacu pada kondisi dimana standar layanan Program Sembako adalah ditetapkan sama untuk seluruh wilayah Indonesia, maka alasan kedua, yaitu ekspektasi KPM di wilayah perkotaan lebih tinggi, adalah lebih mungkin menjadi penyebab adanya perbedaan persepsi terhadap kualitas pelayanan Program Sembako di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Walaupun hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi KPM terhadap kualitas layanan Program Sembako sudah baik (> 3, Likert scale 1-6), namun masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas layanan, yaitu dengan meningkatkan jenis produk, kualitas produk, dan kuantitas produk yang tersedia di e-warung, terutama di wilayah perkotaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan-tujuan program bantuan pangan yang mencakup terpenuhinya pengeluaran konsumsi makanan, meningkatnya frekuensi mengkonsumsi makanan, meningkatnya kualitas nutrisi makanan, meningkatnya keteraturan makan, meningkatnya rasa aman terhadap ketersediaan makanan, meningkatnya rasa sejahtera sebagaimana telah disampaikan pada beberapa penelitian sebelumnya seperti antara lain Saavedra (2016), Palmeira et al. (2020), dan Huda et al. (2018), adalah relevan dengan Program Sembako. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa faktor-faktor diatas valid untuk digunakan sebagai alat pengukuran tingkat kepuasan terhadap Program Sembako. Sebagai tambahan, Program Sembako juga memberikan manfaat tambahan meningkatkan fleksibilitas memilih produk pangan bagi penerima manfaat. Hasil analisis statistik deskriptif dan hasil uji beda memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan KPM di wilayah pedesaan lebih tinggi secara signifikan dari tingkat kepuasan KPM di wilayah perkotaan, terutama terkait dengan manfaat meningkatnya jumlah makan per hari dan meningkatnya nutrisi makanan. Dengan mengacu pada definisi kepuasan penerima manfaat program sosial yang diungkapkan oleh Henning-Smith et al. (2021) dan (Setiadi & Rahman, 2016), maka hasil penelitian yang menunjukkan lebih tingginya tingkat kepuasan KPM di wilayah pedesaan dibandingkan di wilayah perkotaan dapat disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu pertama, situasi awal KPM di wilayah pedesaan lebih berkekurangan dibandingkan KPM di wilayah perkotaan sehingga KPM di wilayah pedesaan mempersepsikan manfaat yang lebih besar dari Program Sembako, dan kedua, ekspektasi KPM di wilayah perkotaan terhadap program bantuan sosial dari pemerintah lebih tinggi dibandingkan KPM di wilayah pedesaan.

Hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran makanan, dan tingkat pengeluaran non makanan antara KPM di *Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gertler et al. (2012) dan Henning-Smith et al. (2021), yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur spasial pada program sosial. Beberapa upaya pemerintah untuk mengurangi dispersitas harga antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan tampaknya semakin membuahkan hasil, setidaknya di provinsi-provinsi yang terletak di pulau Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain. semakin berkurangnya dispersitas harga, yang antara lain didukung oleh semakin baiknya distribusi barang hingga pelosok desa dan terbukanya informasi terkait harga dari aplikasi digital. Di sisi lain, hasil uji beda memperlihatkan ada perbedaan yang signifikan antara persepsi KPM terhadap Tingkat Layanan dan Tingkat Kepuasan KPM di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. KPM di wilayah pedesaan memiliki persepsi yang lebih baik terhadap tingkat layanan dan tingkat kepuasan terhadap Program Sembako.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Kepuasan KPM terhadap pelaksanaan Program Sembako, sedangkan Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, dan Tingkat Pengeluaran Non Makanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepuasan KPM. Semakin baik KPM mempersepsikan kualitas layanan Program Sembako maka akan semakin baik juga mereka mempersepsikan kepuasan terhadap Program Sembako.

## 5. Kesimpulan

Terkait tujuan penelitian pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, dan Tingkat Pengeluaran Non Makanan antara daerah perkotaan (Kelurahan Kelapa Gading Timur) dan daerah pedesaan (Desa Cisarua). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kualitas Layanan Program Sembako dan Kepuasan KPM terhadap Program Sembako antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Terkait tujuan penelitian kedua, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, Tingkat Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Tingkat Kepuasan KPM Program Sembako, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Program Sembako merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi Kepuasan KPM pada Program Sembako. Sedangkan Pendapatan, Pengeluaran Makanan, dan Pengeluaran Non Makanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan Kepuasan KPM pada Program Sembako.

## 6. Saran

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa disparitas harga antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan semakin berkurang, yang ditunjukkan dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tingkat Pendapatan, Tingkat Pengeluaran Makanan, dan Tingkat Pengeluaran Non Makanan di wilayah perkotaan dan pedesaan pada penelitian ini. Hasil penelitian merekomendasikan tidak perlu perbedaan jumlah bantuan berdasarkan faktor spasial, yaitu dengan membedakan jumlah bantuan daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Tingkat Kualitas Layanan Program Sembako secara signifikan menentukan sekitar 84% Tingkat Kepuasan KPM terhadap Program Sembako. Oleh karena itu, pemerintah harus secara proaktif terus meningkatkan kualitas layanan Program Sembako. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan Program Sembako, terutama terkait jenis produk, kualitas produk, dan kuantitas produk, terutama di daerah perkotaan.

*Haffuaddi & Rahayu*

*Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan*

## Daftar Pustaka

- Aguila, E., Kapteyn, A., & Perez-Arce, F. (2017a). Consumption smoothing and frequency of benefit payments of cash transfer programs. *American Economic Review*, 107(5), 430–435. <https://doi.org/10.1257/aer.p20171147>
- Aguila, E., Kapteyn, A., & Perez-Arce, F. (2017b). Consumption Smoothing and Frequency of Benefit Payments of Cash Transfer Programs. *American Economic Review: Papers and Proceedings.*, 107(5), 430–435.
- Anuciata, B. (2017). *Stakeholder s' perceptions on cash transfer program as a strategy for poverty reduction in tanzania: a case of rorya district.*
- BAPPENAS. (2017). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs.*
- Bauhoff, S., Hotchkiss, D. R., & Smith, O. (2011). Responsiveness and satisfaction with providers and carriers in a safety net insurance program: Evidence from Georgia's Medical Insurance for the Poor. *Health Policy*, 102(2–3), 286–294. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2011.06.015>
- BPS. (2010). *Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia.*
- BPS. (2021a). Berita Resmi Statistik. In *Bps.Go.Id* (Issue 27). [bps.go.id](https://bps.go.id)
- BPS. (2021b). *Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia.*
- BPS Kabupaten Sukabumi, . (2020). *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2020.*
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2020.*
- Chaigneau, T., Coulthard, S., Brown, K., Daw, T. M., & Schulte-Herbrüggen, B. (2019). Incorporating basic needs to reconcile poverty and ecosystem services. *Conservation Biology*, 33(3). <https://doi.org/10.1111/cobi.13209>
- Chowdhary, N., & Prakash, M. (2007). Prioritizing service quality dimensions. *Managing Service Quality: An International Journal*, 17(5). <https://doi.org/10.1108/09604520710817325>
- de Groot, R., Palermo, T., Handa, S., Ragno, L. P., & Peterman, A. (2017). Cash Transfers and Child Nutrition: Pathways and Impacts. *Development Policy Review*, 35(5). <https://doi.org/10.1111/dpr.12255>
- Gertler, P. J., Martinez, S. W., & Rubio-Codina, M. (2012). Investing cash transfers to raise long-term living standards. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(1), 164–192. <https://doi.org/10.1257/app.4.1.164>
- Hagen-Zanker, J., & Leon Himmelstine, C. (2015). How Effective Are Cash Transfers in Reducing Poverty, Compared to Remittances? *Social Policy and Society*, 15(1), 29–42. <https://doi.org/10.1017/S1474746415000019>
- Henning-Smith, C., Hernandez, A., Neprash, H., & Lahr, M. (2021). Differences by Rurality in Satisfaction with Care Among Medicare Beneficiaries. *Journal of Rural Health*, 37(1), 114–123. <https://doi.org/10.1111/jrh.12423>
- Hermawati, I., & Winarno, E. (2020). *TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA BENEFICIARY FAMILY PERCEPTIONS Istiana Hermawati dan Endro Winarno Abstrak PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah RI dari waktu ke waktu . Kemiskinan termasuk permasalahan ko. 9(3), 257–270.*
- Huda, T. M., Alam, A., Tahsina, T., Hasan, M. M., Khan, J., Rahman, M. M., Siddique, A. B., Arifeen, S. El, & Dibley, M. J. (2018). Mobile-based nutrition counseling and unconditional cash transfers for improving maternal and child nutrition in Bangladesh: Pilot study. *JMIR MHealth and UHealth*, 6(7). <https://doi.org/10.2196/mhealth.8832>
- Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.161>
- Muhtar. (2018). Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Kabupaten Barito Kuala. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 119–129.
- Navickė, J., Čižauskaitė, A., & Užgalė, U. (2019). Basic Needs and Absolute Poverty in Lithuania: *Haffuaddi & Rahayu*
- Pengaruh Pendapatan, Pengeluaran Makanan, Pengeluaran Non Makanan, dan Tingkat Layanan terhadap Kepuasan Program Sembako: Perbandingan Area Perkotaan dan Pedesaan.*

- Method and Estimation. *Lietuvos Statistikos Darbai*, 58(1). <https://doi.org/10.15388/ljs.2019.16668>
- Nuraeni, M. F., & Noviyani, E. P. (2017). Konfirmasi Lima Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepuasan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) BPJS Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(1), 4–13.
- Palmeira, P. A., Salles-Costa, R., & Pérez-Escamilla, R. (2020). Effects of family income and conditional cash transfers on household food insecurity: Evidence from a longitudinal study in Northeast Brazil. *Public Health Nutrition*, 23(4). <https://doi.org/10.1017/S1368980019003136>
- Risnandar, & Broto, A. W. (2018). Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 146–161. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i3.1422>
- Saavedra, J. E. (2016). The Effects of Conditional Cash Transfer Programs on Poverty Reduction, Human Capital Accumulation and Wellbeing. *United Nations Expert Group Meeting: "Strategies for Eradicating Poverty to Achieve Sustainable Development for All,"* 1–10. <http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2016/Poverty-SDGs/JuanSaavedra-paper.pdf%0Ahttps://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2016/Poverty-SDGs/JuanSaavedra-paper.pdf>
- Sabarisman, M., & Suradi, S. (2020). Bantuan Pangan, Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial: Kasus Belitung Timur. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 285–294. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.2038>
- Setiadi, H. A., & Rahman, A. P. (2016). Analisis Keberhasilan Program Kampung Deret Petogogan menggunakan Pendekatan Evaluasi Pasca Huni. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 51–61.
- TPPPBSSN. (2019). Pedoman Umum Program Sembako 2020. In *Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.
- Triyana, M., & Shankar, A. H. (2017). The effects of a household conditional cash transfer programme on coverage and quality of antenatal care: A secondary analysis of Indonesia's pilot programme. *BMJ Open*, 7(10). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014348>
- Wu, A. M., & Ramesh, M. (2014). Poverty reduction in urban China: The impact of cash transfers. *Social Policy and Society*, 13(2), 285–299. <https://doi.org/10.1017/S1474746413000626>
- Yusuf, A. A. (2018). The direct and indirect effect of cash transfers: the case of Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 792–806. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0072>





## Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective

Nurliana Cipta Apsari <sup>1\*</sup> Santoso Tri Raharjo <sup>1</sup> Meilanny Budiarti Santoso <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pusat Studi Corporate Social Responsibility, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran, Propinsi Jawa Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id](mailto:nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id); Tel: (62) +81320713795

Diterima: 22 Maret 2021; Disetujui: 19 Januari 2022; Diterbitkan: 31 Januari 2022

**Abstrak:** Desa Padaawas merupakan salah satu desa di Propinsi Jawa Barat yang terletak cukup jauh dari ibukota Negara Indonesia. Sebagai daerah yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat Desa Padaawas mengalami tantangan-tantangan dalam pemenuhan kesejahteraan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Padaawas untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang berkelanjutan dianalisa dari sudut pandang *Asset Based Community Development*. Metode yang digunakan adalah metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), wawancara mendalam kepada para tokoh masyarakat dan observasi kepada kehidupan keseharian masyarakat Desa Padaawas. Penelitian menemukan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat menunjang kehidupan berkelanjutan warga desa dan mencapai kesejahteraan sosialnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas BUMDES agar dapat menarik bagi masyarakat dan terbangun kepercayaan dari masyarakat kepada BUMDES Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.

**Kata kunci:** Desa, peningkatan kapasitas, Bumdes

**Abstract:** Padaawas Village is one of remote area in West Java Province which is located far away from the capital city of Indonesia. As a remote area far from city, has made the citizen of the Padaawas Village experiencing challenges in fulfilling their state of social welfare. This research is aiming at describing the potentials acquired by the Village to achieve their state of social welfare and sustainable livelihood analyzed from the *Asset Based Community Development Perspective*. The method used is PRA (*Participatory Rural Appraisal*), in-depth interview to significant people within the community and observation to daily lives of the citizens of Padaawas Village. The research found natural resources and human resources serve as potential of ensuring the sustainable livelihood of the citizens of the village and achieving their welfare. The research recommends strengthening the capacity of BUMDES thus it will attract people and to build trust between community members with BUMDES of Padaawas Village of Pasirwangi of Garut Municipality.

**Keywords:** Village, capacity building, Bumdes

## 1. Pendahuluan

Desa merujuk pada sebuah lokasi geografis yang memiliki karakteristik khas yang bertolak belakang dengan Kota. Kata “Desa” biasanya disamakan dengan daerah yang kehidupan mayoritas penduduknya lebih sederhana, mengalami kemiskinan dan ketertinggalan sebagai akibat dari mobilitas yang rendah dan lokasinya yang jauh terpencil (Luthfia, 2013; Hadi, 2013). Karena lokasinya yang kadang terpencil dan mengalami ketertinggalan di sumber daya manusia, maka masyarakat desa sering dikategorikan sebagai masyarakat yang rentan. Pada umumnya suatu kelompok masyarakat dikatakan rentan disebabkan karena ketiadaan atau minimnya asset dan akses. Banyak strategi yang digunakan oleh para professional termasuk profesi pekerja sosial untuk mengatasi isu ketiadaan atau minim asset dan akses tersebut, salah satunya adalah dengan strategi pemberdayaan masyarakat (Green, 2010).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi berarti adalah sebuah proses mengembangkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak secara kolektif dan juga sebuah hasil aksi untuk mewujudkan perbaikan di segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain (Phillips & Pittman, 2009). Keadaan desa yang masuk ke dalam kelompok rentan karena keterbatasan akses memerlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan memperbaiki keadaan serta mengatasi masalah sosial yang ada di desa tersebut. Perkembangan strategi pemberdayaan masyarakat selanjutnya memusatkan perhatian pada pentingnya mengembangkan asset yang ada dalam masyarakat daripada memusatkan pada kebutuhan atau masalah yang ada dalam masyarakat. Asset yang dimaksud adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jody Kretzmann and John McKnight (1993) dalam (Green, 2010: 4) sebagai “*the gifts, skills, and capacities of individuals, associations, and institutions within a community*”. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan asset ini dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, potensi-potensi serta sumber daya-sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat. Dalam literatur lain, asset ini disebut juga sebagai “*community capital*” yang menurut Green & Haines (2002: viii) dalam Phillips & Pittman (2009: 6) dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yaitu “1 *Human capital: labor supply, skills, capabilities and experience, etc. 2 Physical capital: buildings, streets, infrastructure, etc. 3 Financial capital: community financial institutions, micro loan funds, community development banks, etc. 4 Environmental capital: natural resources, weather, recreational opportunities, etc*”.

Pemberdayaan masyarakat berbasis asset atau lebih dikenal sebagai *asset-based community development* (ABCD) merupakan sebuah strategi yang memusatkan perhatian pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Nel, 2015). Pendekatan ABCD berangkat dari kepercayaan bahwa banyaknya masalah sosial adalah sebagai akibat dari tidak meratanya distribusi sumber daya-sumber daya, sehingga seharusnya mengatasi masalah sosial ini tidak cukup hanya dengan menghapus hal-hal yang negative saja, tetapi juga dengan mencari dan meningkatkan hal-hal positif dalam situasi tersebut (Wood, 2008). Dengan strategi ABCD ini, pelaku pemberdayaan masyarakat tidak lagi bertumpu pada masalah dan kebutuhan masyarakat yang berada di seputaran isu-isu khas seperti pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan rumah tidak layak huni (Green, 2010), tetapi lebih pada kekuatan yang ada dalam masyarakat dan keberhasilan-keberhasilan masa lalu yang dicapai oleh anggota masyarakat di sebuah komunitas (Winther, 2015). Pendekatan ini juga sejalan dengan pendekatan berbasis kekuatan atau *strength-based approach*. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan ABCD berarti juga mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (Winther, 2015; Nel, 2015; Green, 2010; Phillips & Pittman, 2009).

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso

Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawwas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
Asset-Based Community Development Perspective

Pendekatan ABCD percaya bahwa ketika masyarakat menyadari dan mengetahui kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki, semakin tinggi pula kemampuan mereka mencapai tujuan dan bertindak untuk pengembangan diri mereka sendiri (Nel, 2015; Winther, 2015). Apabila tujuan dan pengembangan diri masyarakat telah terwujud, pendekatan ABCD percaya bahwa rasa memiliki anggota masyarakat dan pengembangan dirinya menjadi lebih kuat dan menyatu dalam diri mereka masing-masing sehingga membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan berkembang (Wood, 2008). Mengingat hal tersebut, maka proses penyadaran dan pengidentifikasian kekuatan dalam masyarakat seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri yang telah dilatih secara khusus untuk dapat memimpin proses pemberdayaan berbasis asset tersebut (Nel, 2015; Klee, et.al., 2014). Langkah-langkah dalam mengimplementasikan pendekatan ABCD menurut Klee, et.al. (2014) adalah penerimaan dari komunitas akan intervensi berbasis pendekatan ABCD, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang dapat diajak bekerja sama, mengeksplorasi cita-cita, harapan, mimpi, keterampilan dan minat anggota masyarakat, memetakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, menemui para tokoh pemimpin kelompok-kelompok tersebut untuk mengidentifikasi apa yang telah dilakukan, apa yang mereka harapkan dan apa yang dapat mereka tawarkan untuk bekerja bersama membuat perubahan, mengidentifikasi program-program yang dapat mengundang minat warga masyarakat untuk membuat perubahan di dalam masyarakat, mengkolaborasikan anggota masyarakat dengan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama, membagi cerita-cerita keberhasilan kepada warga masyarakat untuk mengundang lebih banyak warga terlibat dalam melakukan perubahan di masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kegiatan pemetaan sosial untuk program pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan baik itu dalam konteks masyarakat desa, keluarga dan kelompok rentan baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia (CDS & Coady International Institute, 2005; Nel, 2015; Hadi, 2013; Winther, 2015; Rahman, 2018; Khairul, dkk, 2018; Sholehah, 2017; Purwastuty, 2018; Maulana, 2019, Klee, et.al. 2014), namun demikian, belum ada yang melakukan analisa pemetaan sosial dari sudut pandang *asset-based community development perspective*. Dengan menggunakan *asset-based community development perspective*, potensi yang ada dalam masyarakat dapat diidentifikasi sebagai kekuatan dan diberdayakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan sosial warganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan potensi-potensi yang ada di Desa Padaawas dan menganalisanya dari sudut pandang *asset-based community development perspective*.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan untuk bersama-sama warga lokasi penelitian untuk mengeksplorasi kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki. Banyak cara yang digunakan dalam Teknik PRA ini, namun dalam penelitian, cara yang digunakan untuk mengeksplorasi lokasi penelitian adalah dengan cara pemetaan desa, diagram venn, ecomap, Analisa mata pencaharian dan diagram alur komoditas unggulan kepada unsur pemerintah/aparat desa, Kepala Dusun, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku ekonomi, serta kelompok tani. Selain PRA, informasi juga didapat dengan cara wawancara mendalam kepada setiap *stakeholder* yang ada Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut untuk menggali asset dan *community capital* yang ada di Desa Padaawas tersebut. Setelah data terkumpul, data analisis

dilakukan dengan proses reduksi data, pengelompokan data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi kesimpulan kepada pihak-pihak terkait.

### 3. Hasil

Desa Padaawas merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masuk kedalam kelompok rentan karena lokasinya yang jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat mengalami tantangan akses yang dapat membuat mereka mengalami ketiadaan atau minim asset. Desa Padaawas adalah salah satu desa di Kecamatan Pasirwangi di Kabupaten Garut yang terdiri 10 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT). Jarak Desa Padaawas ke Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi adalah 80 km, sementara jarak ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 300 km. Tingkat Pendidikan mayoritas warga Desa Padaawas adalah lulus SD/ sederajat yang mencapai 30% lebih dari total penduduk yang berjumlah 7248 jiwa. Lebih dari 30% penduduk Desa Padaawas mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan 19% penduduk memiliki lahan pertanian

Potensi-potensi yang berhasil diidentifikasi oleh penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Potensi yang bersifat sosial kemasyarakatan; 2. Potensi yang melekat pada sumber daya manusia - direpresentasikan oleh keberadaan para aktor sebagai stakeholder di wilayah Desa Padaawas -; 3. Potensi yang dimiliki oleh warga masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa Padaawas; dan 4. Potensi Modal Keuangan/Finansial.

#### 3.1. Potensi Sosial Kemasyarakatan

Potensi sosial kemasyarakatan yang teridentifikasi di Desa Padaawas adalah berbagai potensi yang berkaitan dengan kondisi penduduk, kondisi kesehatan, kondisi keagamaan, kondisi keamanan, kondisi pendidikan dan kondisi mata pencaharian dari warga masyarakat Desa Padaawas. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, jumlah penduduk Desa Padaawas setiap tahun menunjukkan peningkatan, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.

**Tabel 1:** Jumlah Penduduk Desa Padaawas dari tahun 2014-2017

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2014	3.327	3.099	6.426
2	2015	3.370	3.138	6.508
3	2016	3.431	3.817	7.288
4	2017	3.679	3.544	7.223

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Peningkatan jumlah penduduk ini menandakan adanya pertumbuhan penduduk yang baik di Desa Padaawas. Tingginya jumlah penduduk juga menunjukkan angka harapan hidup dan kelahiran yang tinggi untuk setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia, secara kuantitatif mengalami peningkatan. Meningkatnya angka harapan hidup dan kelahiran yang tinggi setiap tahunnya menandakan semakin bertambahnya usia produktif di Desa Padaawas dan meningkatnya kesehatan penduduk Desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa tingginya jumlah penduduk di Desa Padaawas diimbangi oleh kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Pemerintah desa dan beberapa pihak swasta yang berada di wilayah Desa Padaawas sama-sama berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

*Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso*

*Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
Asset-Based Community Development Perspective*

yang ditunjukkan dengan dimilikinya sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan Posyandu. Letak sarana dan prasarana kesehatan tersebut mudah untuk dijangkau, sehingga memudahkan upaya pemerintahan setempat dalam meningkatnya layanan kesehatan dan berbuah tingginya tingkat kesehatan masyarakat Desa Padaawas.

Kondisi keagamaan yang menjadi potensi sosial kemasyarakatan yang mendukung kondusifitas kehidupan bermasyarakat warga Desa Padaawas ditunjukkan pula oleh kentalnya kehidupan keagamaan terutama ditunjukkan oleh kehidupan beragama Islam. Besarnya jumlah warga masyarakat Desa Padaawas yang menganut agama Islam serta pengaruh keagamaan yang masih kuat dapat mendukung suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman terutama dalam menghindarkan warga masyarakat dari perbuatan negatif di lingkungan Desa Padaawas. Situasi tersebut didukung oleh dimilikinya sarana peribadatan di wilayah Desa Padaawas, antara lain berupa mushola dan masjid yang tersebar diberbagai wilayah RW di Desa Padaawas. Hal ini memudahkan warga masyarakat untuk mengakses tempat ibadah dan melaksanakan ibadah, sehingga memberikan nuansa keagamaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian berdampak positif pada kehidupan sosial Desa Padaawas.

Untuk kondisi keamanan sebagai hal penting lain yang menjadi potensi dari Desa Padaawas adalah dalam upaya masyarakat setempat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan lingkungan setempat, yang didukung oleh dimilikinya sarana dan prasarana yang menunjang warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat, yang terdiri dari pos koramil dan pos kamling. Pos kamling merupakan sarana prasarana utama bagi warga masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dari setiap wilayah Desa Padaawas. Keberadaan pos kamling yang tersebar di setiap wilayah dirasa telah memberikan rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan Desa Padaawas.

Siskamling juga merupakan sistem keamanan yang dijalani oleh masyarakat Desa Padaawas. Bergantian menjaga keamanan di setiap RW masing-masing. Siskamling yang ada di Desa Padaawas juga melakukan koordinasi dengan Hansip/LINMAS (Pelindung Masyarakat), BABINSA (Bintara Pembina Desa) dan KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat), koordinasi yang mereka lakukan membuat kerjasama yang mereka laksanakan menghasilkan hasil yang baik. Kepercayaan antar masyarakat juga terlihat dari terlaksananya arisan yang dijalani oleh Ibu-Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang tersebar di setiap RW selain menjaga silaturahmi juga menghasilkan tingkat kepercayaan diantara peserta menjadi semakin kuat. Serta keterlibatan aktif masyarakat pada setiap kegiatan di Desa seperti tujuhbelasan, pelatihan, pengajian dan Jumsih (Jumat bersih) yang menunjukkan rasa kepercayaan dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat Desa Padaawas.

Desa Padaawas merupakan salah satu wilayah pemerintahan desa yang termasuk ke dalam jangkauan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Indonesia Power. Dengan tingkat pendidikan warga masyarakat yang cukup baik, ditunjukkan dengan adanya potensi lulusan pasca SMA di Desa Padaawas yaitu D1, D2, D3, S1 dan S2. Hal ini menjadi potensi untuk mendukung berbagai program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Padaawas ataupun dalam melaksanakan program CSR yang diinisiasi oleh PT Indonesia Power, terutama pada sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan lulusan pendidikan tinggi baik itu strata satu (S1) ataupun tingkat magister (S2). Peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan setiap program CSR, terlebih dengan didorong oleh kualitas masyarakat yang berpendidikan tinggi akan membuat pelaksanaan program CSR lebih tepat sasaran, waktu dan tepat guna.

Potensi dalam bidang pendidikan yang dimiliki oleh warga Desa Padaawas tersebut dapat terwujud karena adanya dukungan sarana pendidikan yang dimiliki Desa Padaawas, yang terdiri dari

sarana pendidikan formal dan sarana pendidikan non-formal, diantaranya berupa pesantren, TK/PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederejat. Dengan adanya SMK dan MA di wilayah Desa Padaawas, hal ini membuat upaya pemerintah dalam mengkampanyekan kewajiban belajar 9 tahun yang merupakan program pemerintah pusat dapat dengan mudah terlaksana di wilayah Desa Padaawas, karena masyarakat dapat mengakses sarana pendidikan setingkat SMK dan MA dengan mudah dan berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka.

Secara geografis, letak Desa Padaawas pun berada pada lokasi yang menunjukkan mudah untuk mendapatkan akses ke jalan raya dan merupakan wilayah yang paling dekat dengan jalur utama desa yaitu tempat hilir mudiknya kendaraan terutama angkutan pedesaan dan jalur wisata, sehingga wilayah Desa Padaawas menjadi tempat perputaran perekonomian dan dapat dikatakan berlokasi strategis karena menjadi tempat pilihan utama bagi masyarakat sekitar untuk mendirikan tempat tinggal. Letak geografis ini dapat mendukung kondisi mata pencaharian warga Desa Padaawas yang beragam, sebagaimana tergambar dalam table 2 berikut ini

**Tabel 2 : Mata Pencaharian Desa Padaawas**

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	2546 orang
Pengusaha	3 orang
Pengrajin	32 orang
Pedagang	30 orang
TNI-POLRI	3 orang
Pensiunan	9 orang
Peternak	10 orang
Keamanan Desa (Hansip)	24 orang
Bidan	2 orang

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

### 3.2. Potensi Sumber Daya Manusia

Penelitian ini, potensi sumber daya manusia menunjukkan aktor-aktor sebagai pihak yang dapat memberikan pengaruh besar bagi Desa Padaawas berdasarkan bidangnya masing-masing. Aktor dalam hal ini terdiri dari aktor individu/kelompok dan organisasi. Keberadaan aktor baik itu aktor individu/kelompok dan organisasi tidak bisa terlepas dari *stakeholder* yang ada di masyarakat yang terdiri dari pemerintah, tokoh masyarakat dan berbagai pihak swasta yang berada di wilayah Desa Padaawas.

Berbagai stakeholder tersebut antara lain adalah kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat yaitu kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), BUMDES, Bapeling, Gapoktan, DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid), Karang Taruna, institusi lokal tradisional dan pihak swasta yang terdiri dari divisi *Community Development Officer* PT. Star Energy dan PT. Indonesia Power. Namun demikian, berdasarkan identifikasi *stakeholder* yang telah dilakukan, belum tampak secara signifikan kehadiran dan peran aktif dari kelembagaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di wilayah Desa Padaawas. Sejatinnya berbagai kelembagaan kesejahteraan sosial seperti: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat hadir di tengah-tengah kehidupan

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso

Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
Asset-Based Community Development Perspective

bermasyarakat dan berperan aktif dalam menangani pemenuhan kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Padaawas.

Potensi sumber daya manusia pun ditunjukkan oleh jaringan sosial yang dimiliki dan digunakan oleh para aktor dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Jaringan adalah hal terpenting bagi seorang aktor dalam menggambarkan luasnya hubungan sosial aktor baik dari lingkungan internal dan eksternal. Aktor dengan jaringan yang luas dapat berdampak semakin luasnya peran dan kepentingannya dan semakin luasnya pengaruh aktor dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai jaringan yang dimiliki oleh para aktor tersebut tergambar dalam ecomap yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan seseorang atau suatu kelompok di dalam suatu konteks sosial atau lingkungan sosialnya. Gambar 1 berikut ini adalah ecomap yang dimiliki oleh para aktor di Desa Padaawas:

**Gambar 1 : Ecomap Aktor Desa Padaawas**



Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Desa Padaawas memiliki jaringan yang cukup luas, ada beberapa kegiatan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat masih terlaksana hingga sekarang, yaitu program ecovillage, hingga menetaskan organisasi yang aktif mengenai lingkungan di Desa Padaawas, organisasi masyarakat yang terbentuk menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup bernama Barisan Peduli Lingkungan (BAPELING) di Desa Padaawas sendiri Bapeling memiliki struktur organisasi yang jelas dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Padaawas. BAPELING memiliki program yang masih berjalan hingga sekarang salah satunya JUMSIH (jumat bersih), Jumsih merupakan yang dilakukan seminggu sekali secara gotong royong bersama seluruh masyarakat mereka membersihkan lingkungan sekitar. Keanggotaan BAPELING sendiri sudah menyebar ke setiap RW yang ada di Desa Padaawas. Banyak rencana BAPELING untuk kedepannya salah satunya ingin membuat pengolahan sampah secara mandiri yang dapat menghasilkan kelompok berdaya dari pemanfaatan sampah yang ada di Desa Padaawas. Jaringan lainnya terkait pada perusahaan yang berada dekat dengan Desa Padaawas yaitu Pertamina, Star Energy dan Indonesia Power hubungan baik dengan Desa Padaawas menjadi kekuatan jaringan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam mewujudkan suatu program untuk pembangunan di Desa Padaawas.

*Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso*

*Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective*

Organisasi/kelompok merupakan bagian dari aktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Organisasi/kelompok yang terdapat di suatu wilayah masyarakat keberadaannya sangatlah mempengaruhi setiap pembangunan yang berjalan dan akan dilaksanakan di Desa Padaawas yang dapat dikategorikan menjadi organisasi/kelompok yang berasal dari pihak pemerintah (pemerintahan Desa Padaawas, BUMDES, Bapelin), tokoh kemasyarakatan (PKK, DKM, Karang Taruna, Gapoktan) dan pihak swasta (PT. Star Energy dan PT. Indonesia Power). Berikut ini adalah beberapa organisasi/kelompok di Desa Padaawas:

- 1) Pemerintahan desa memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat terutama dalam penentuan berbagai program kebijakan desa dan penyaluran bantuan dari pemerintahan pusat kepada masyarakat serta memiliki akses yang dekat karena semua masyarakat dengan mudah meminta pelayanan kepada pemerintahan desa dan mengakses bantuan dari pemerintahan pusat, dalam hubungan dengan stakeholder yang lain, pemerintahan desa memiliki hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat setempat serta pemerintahan diluar desa.
- 2) BUMDES adalah lembaga usaha milik desa yang bergerak dalam bidang usaha pertanian, penyaluran bantuan, pengelolaan aset desa dan BRI Link. BUMDES memiliki akses yang dekat karena banyak masyarakat yang mulai bekerjasama dengan BUMDES terutama dalam penyaluran bantuan.
- 3) PKK sebagai lembaga yang menaungi para kader dalam peningkatan kesejahteraan ibu-ibu, anak-anak dan lansia. PKK memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat terutama dibidang anak-anak, ibu-ibu dan lansia, serta juga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah karena tersebar disetiap wilayah.
- 4) Bapeling Memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup wilayah Desa Padaawas, dapat dilihat dengan lingkungan yang semakin baik dengan diadakannya Jumsih oleh Bapeling dan pengolahan sampah yang mulai dilakukan. Bapeling juga mudah diakses oleh masyarakat Desa, siapapun dapat bergabung dan tersebar disetiap RW. Memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan desa dan pihak luar yaitu dinas lingkungan hidup.
- 5) Gapoktan adalah lembaga yang menaungi kelompok-kelompok tani di Desa Padaawas, memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat karena Gapoktan menaungi setiap petani di Desa Padaawas, dengan jumlah petani yang besar di Desa Padaawas sehingga pengaruhnya besar dan aksesnya dekat karena disetiap RW terdapat kelompok tani yang tersebar di Desa Padaawas.
- 6) DKM adalah lembaga dakwah dan kerohanian di Desa Padaawas. Memiliki pengaruh yang besar terhadap hal spiritual masyarakat Padaawas terutama dalam pengajaran agama islam, karena masyarakat Desa Padaawas yang mayoritas beragama islam membuat lembaga DKM sangatlah berpengaruh. Lembaga inipun mudah diakses oleh banyak masyarakat dengan nuansa islami yang kental, didukung dengan adanya program pengajian desa setiap satu bulan sekali.
- 7) Karang Taruna menaungi pemuda-pemuda yang ada di Desa Padaawas. Karang taruna ini menaungi kegiatan-kegiata kepemudaan, namun kini karang taruna sedang tidak aktif maka pengaruhnya tidak besar bagi masyarakat Padaawas dan masyarakat sulit mengaksesnya karena ketidakaktifannya.
- 8) Institusi Lokal Tradisional bergerak kepada bidang kesenian dan budaya tradisional, untuk menjaga kelestarian nilai, norma dan adat istiadat setempat. Kegiatan yang dilestarikan adalah pencak silat, qosidah dan marawis, dengan banyak melibatkan elemen masyarakat baik yang sudah dewasa atau anak-anak.

Merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan dalam rangka membahas kepentingan public, warga masyarakat menggunakan sebuah media yang disebut sebagai forum. Forum adalah suatu kegiatan yang sangat efektif untuk membahas suatu kepentingan yang bersifat publik dalam kehidupan bermasyarakat. Di Desa Padaawas terdapat forum-forum yang diadakan untuk membahas kepentingan publik, baik yang skalanya kecil atau besar. Forum-forum yang diadakan dalam setahun cukup banyak dengan pembahasan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan serta kepentingan publik yang menjadi target sasaran. Forum-forum yang ada di Desa Padaawas adalah Forum Ketua RW, Forum Dusun, MUSDES (Musyawarah Desa), MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

### 3.3. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Padaawas yang terletak di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Berikut adalah identifikasi potensi sumber daya alam di Desa Padaawas:

#### 3.3.1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Wilayah Desa Padaawas memiliki potensi sumber daya alam yang besar di bidang pertanian seluas 1.250 Ha yang terdiri dari 75,493 Ha berupa daratan dan 230 Ha perbukitan palawija 10,72 Ha, tanah pertanian/ darat 98,50 Ha. Dengan jumlah petani sebanyak 2.546 orang yang terdiri dari pemilik dan buruh tani menjadikan potensi pertanian sangat besar di Desa Padaawas baik dari hasil pertaniannya sendiri maupun dalam keterampilan yang dimiliki oleh petani dalam persoalan pertanian yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber peningkatan pendapatan bagi petani dan pembangunan Desa Padaawas. Jumlah buruh tani yang besar juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Padaawas memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengelola lahan, dengan adanya pengelolaan dan aturan yang baik dan jelas serta dukungan dari berbagai pihak, maka dapat diharapkan hal tersebut akan memajukan para buruh tani di Desa Padaawas.

Potensi lainnya dari segi pertanian dan perkebunan adalah tanaman buah-buahan yaitu pisang dan kopi. Kondisi geografis dari Desa Padaawas mendukung untuk ditanami tanaman kopi dan didukung pula oleh adanya wilayah perkebunan Perhutani yaitu hutan pinus konservatif. Kerjasama yang terbentuk antara masyarakat dan perhutani juga dapat menjadi kolaborasi yang baik dan dapat menjadi alternatif mata pencaharian di Desa Padaawas. Dengan potensi tanaman kopi, dukungan yang diperlukan oleh masyarakat setempat adalah program pemberdayaan petani mengenai tanaman kopi, pengolahan hasil perkebunan kopi dan akses terhadap pemasaran untuk hasil panen kopi.

Dalam hal sayuran, Desa Padaawas merupakan daerah penghasil kentang, wortel, sawi, tomat, bawang merah, jagung manis, dan cabe. Tanaman kentang merupakan komoditas unggul Desa Padaawas dengan mayoritas petani atau buruh tani menanam kentang. Bibit kentang yang dipakai adalah intan dan granola. Proses pertanian kentang dimulai dari proses penyemaian untuk memunculkan tunas dari bibit yang berasal dari kentang yang tidak lolos penyortiran untuk penjualan ke pasar-pasar.

#### 3.3.2. Potensi Peternakan

Desa Padaawas memiliki potensi ternak yaitu ternak kelinci. Potensi ternak kelinci di Desa Padaawas sangat besar dan dapat terus dikembangkan, karena tergolong mudah untuk mempelajari

proses pemeliharaan kelinci, bahan pangan yang murah serta adanya pasar terutama di luar wilayah Garut. Selain kelinci, di Desa Padaawas juga terdapat peternakan domba.

### 3.3.3. Potensi Objek Wisata

Desa Padaawas memiliki 5 objek wisata yang memanfaatkan sumber mata air panas yang bersumber di Puncak Jaya Darajat. 5 objek wisata tersebut terdiri dari empat pemandian umum dan satu wisata hutan. Empat tempat yang di jadikan wisata oleh masyarakat merupakan pemandian umum yaitu Pemandian Air Panas Ciendog yang berada di RW 01 dan digunakan untuk pemandian bagi masyarakat umum. Terdapat sungai kecil di belakang pemandian umum Air Panas Ciendog yang, setiap sore hari selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar untuk mandi disana, dipercaya oleh warga sekitar bahwa pemandian air panas tersebut juga dapat menjadi sarana terapi berbagai macam penyakit. Berikutnya adalah Kolam Air Panas Bukit Rejeng Indah (BRI) yang mulai beroperasi pada tahun 2012. Bapak H. Habib adalah pemilik dari Kolam Air Panas tersebut yang berlokasi di pinggir jalan raya Darajat. Fasilitas yang tersedia ialah kolam renang, penginapan dengan 12 Kamar, *waterboom* mini dan Kedai Kopi. Kolam tersebut ramai oleh pengunjung karena lokasi yang strategis dan tarif masuknya tidak begitu mahal. Pemandian umum berikutnya adalah Kolam Air Panas Puncak Jaya Darajat. Puncak Jaya Darajat adalah kolam renang air panas, penginapan 20 Kamar, *waterboom* mini, *Bungalow*, dan *water park*, serta lapangan yang cukup luas untuk keperluan *outbond*. Tetapi puncak jaya Darajat dikhususkan untuk penginapan keluarga atau melaksanakan *gathering*. Kolam Air Panas Awit adalah kolam renang air panas yang juga menyediakan fasilitas penginapan sebanyak 55 Kamar, *waterboom* mini, dan Resto yang beroperasi 24 jam. Awit memiliki 10 *cottage minimalis* dengan kapasitas maksimal 10 orang/*cottage*. Sementara itu, satu wisata hutan adalah Wisata Alam Perhutani (Hutan Pinus), yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang berkordinasi dengan pihak Dinas Perhutani. Ada beberapa fasilitas yang dapat dikembangkan menjadi potensi dari Wisata Alam Perhutani adalah *Green Camp*, *Lintas Hutan*, dan *Crooser*.

### 3.4. Potensi Modal Keuangan/Finansial

Di Desa Padaawas terdapat beberapa potensi keuangan berupa lembaga simpan pinjam, baik itu yang berasal dari bank konvensional, koperasi, maupun rentenir. Selain potensi keuangan yang bersifat kelembagaan, terdapat juga modal finansial di tingkat keluarga yaitu berupa pendapatan warga masyarakat, pengeluaran, dan tabungan keluarga.

Terdapat beberapa lembaga yang menjadi sumber asset bagi masyarakat Desa Padaawas. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah salah satu lembaga yang menjadi sumber pendapatan finansial bagi Desa. Lembaga BUMDES berada di bawah kepengurusan Desa dan mempunyai struktur kepengurusan tersendiri secara terpisah dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada kepala desa.

Terdapat beberapa asset yang dimiliki oleh Desa dikelola oleh BUMDES, seperti Gelanggang Olah Raga (GOR). BUMDES bertugas untuk membantu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga miskin yang terdaftar menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, BUMDES pun menjadi agen BRI LINK untuk membantu masyarakat Desa Padaawas dalam hal tarik tunai, pembayaran listrik, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, dan transaksi-transaksi lain yang fiturnya terdapat pada mesin EDS.

Lembaga Simpan Pinjam di Desa Padaawas belum banyak, dan hanya beberapa masyarakat yang memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan, terutama yang bersifat konvensional. Beberapa

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso

Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
Asset-Based Community Development Perspective

lembaga keuangan yang dapat menjadi sumber modal finansial bagi masyarakat adalah BRI Link, tengkulak dan bank keliling. Dalam memanfaatkan layanan lembaga keuangan yang tersedia, masyarakat mempertimbangkan besarnya manfaat dan juga resiko yang harus mereka tanggung. Faktanya, masyarakat Desa Padaawas lebih memilih untuk meminjam uang kepada bank keliling atau tengkulak dari pada memanfaatkan layanan bank konvensional, hal ini dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari bank keliling atau tengkulak dirasa lebih mudah untuk dipenuhi walaupun dengan bunga yang besar, jika dibandingkan dengan proses meminjam uang pada bank konvensional.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan buruh tani di Desa Padaawas dapat dihitung sesuai dengan pendapatan buruh tani pada desa-desa lainnya di sekitar Kecamatan Pasir Wangi, yaitu untuk perhari buruh tani mendapatkan penghasilan berkisar Rp. 25.000 untuk buruh tani perempuan dan Rp.30.000 untuk buruh tani laki-laki, dengan jam kerja sekitar 6 jam sehari. Selain itu, masyarakat Desa Padaawas pun suka melakukan kegiatan arisan terutama bagi para ibu-ibu, hal ini pun menjadi salah satu sumber finansial bagi masyarakat Desa Padaawas.

#### 4. Pembahasan

Kaur (2017: 46) mendefinisikan perubahan sosial sebagai *“the accepted modes of life whether due to alteration in geographical conditions, in cultural equipment, composition of the population or ideologies ...”*. Desa Padaawas yang secara geografis terletak jauh dari pusat kota mengalami perubahan sosial yang tidak ekstrim dan dramatis. Hal ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana desa yang masih terbatas sebagai akibat dari pembangunan yang belum merata seperti Desa Padaawas tersebut. Desa yang secara geografis terletak lebih jauh dari kota mengalami ketimpangan kekuasaan, sehingga salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial tersebut, metode pemberdayaan masyarakat berbasis aset pada masyarakat dapat diandalkan. Pemberdayaan masyarakat berbasis aset akan memusatkan perhatiannya pada kekuatan yang ada di masyarakat (Nel, 2015) sehingga masalah sosial sebagai akibat dari ketidakadilan struktural dapat teratasi oleh kekuatan dan potensi yang ada di dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus berjalan.

Aset-aset yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh masyarakat sangat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan pengembangan, pemberdayaan kapasitas atau kemampuan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nel (2015) pendekatan berbasis aset berupaya untuk mengakomodir perbedaan mencari nafkah dan mencoba untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keragaman mata pencaharian dan potensi yang ada di Desa Padaawas saling melengkapi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk meningkatkan kapasitas manusia dalam rangka memperbaiki kehidupannya, diperlukan aset fisik seperti sekolah atau rumah sakit sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, pendidikan, maupun kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan aset fiskal atau aset keuangan sangat mendukung masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Aset sosial sebagai sarana untuk mengembangkan ikatan sosial atau jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, modal atau aset natural dan teknologi sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki dengan dibantu oleh penguasaan teknologi yang dapat meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang ada di masyarakat seperti penggunaan teknologi untuk pengembangan pertanian masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 bentuk “*community capital*” telah tersedia di Desa Padaawas yang memungkinkan Desa Padaawas untuk bisa keluar dari ketidakadilan sosial sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan. Sumber daya manusia yang terampil, berpengetahuan dan berpengalaman yang dimiliki masyarakat dapat mendorong pemberdayaan di masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadaan kesejahteraan warga masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia di Desa Padaawas yang mayoritas bertani dan tingkat pendidikan yang rendah membatasi daya tawar mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Namun begitu, semangat gotong royong yang terbentuk dan khas pada masyarakat desa membuat warga masyarakat tetap merasakan kesejahteraan meskipun penghasilan mereka terbatas. Semangat gotong royong tersebut dibuktikan dengan keberadaan aktor-aktor di dalam masyarakat. Aktor-aktor di dalam masyarakat tersebut berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan aktor di luar masyarakat sehingga meskipun warga masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dan berpendidikan rendah, tetapi desa dan warganya tetap berdaya dan terlepas dari “*image desa*” yang miskin dan tertinggal. Hal ini sejalan dengan Sen (2000) yang mengungkapkan bahwa pembangunan yang bersifat statistik tidak dapat menjamin kebebasan yang dirasakan oleh masyarakatnya, sehingga pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang dapat menjamin kebebasan masyarakat sambil juga memperhatikan indikator ekonomi dari sebuah pembangunan daerah.

Modal fisik seperti bangunan, jalan, infrastruktur dan lain-lain dapat menunjang kesejahteraan sosial warga. Keberadaan aktor di luar warga masyarakat seperti melalui program CSR perusahaan dapat membantu desa membangun modal fisik seperti halnya yang terjadi di Desa Padaawas. Hasil penelitian telah berhasil mengidentifikasi stakeholder yang dapat menjadi asset untuk pengembangan masyarakat Desa Padaawas. Sementara itu, modal finansial secara teoritis dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan pinjaman-pinjaman lunak yang bermanfaat bagi warga desa yang ingin memulai dan mengembangkan usaha sebagai salah satu cara menambah penghasilan sehari-hari. Pada faktanya, modal finansial yang ada di Desa Padaawas beragam, ada yang menjerat warga, dan ada juga yang konvensional. Namun begitu, keberadaan BUMDES sebagai asset masyarakat dapat menjadi modal finansial yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa tersebut.

Selain modal finansial, modal lingkungan sebagai asset masyarakat dapat membantu masyarakat agar lebih berdaya. Modal sosial berupa norma, kepercayaan, kohesivitas, altruisme dan jaringan sosial (Saputra, dkk, 2021) juga merupakan asset yang dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi di bidang pertanian dan perkebunan, serta peternakan, Desa Padaawas yang secara letak geografis berada di dekat sumber mata air panas dan hutan memiliki potensi wisata-wisata yang berbasis air panas dan keragaman hayati. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis asset dimungkinkan terjadi di Desa Padaawas karena potensi-potensi yang ada di masyarakat telah tersedia sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Potensi kesejahteraan sosial di Desa Padaawas berdasarkan konsep *Asset Based Community Development* yang teridentifikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.

Dengan demikian, potensi kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Desa Padaawas sebagai asset komunitas kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sejalan dengan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menghilangkan ataupun mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Fahrudin (2012: 12) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso  
Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
*Asset-Based Community Development Perspective*

- 1) Fungsi pencegahan (*preventive*), kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial.
- 2) Fungsi penyembuhan (*curative*), kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam hal ini, fungsi penyembuhan (*curative*) juga mencakup fungsi pemulihan (*rehabilitative*).
- 3) Fungsi pengembangan (*development*), kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Fungsi penunjang (*support*), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lainnya.

Modal-modal yang terwujud dalam potensi kesejahteraan sosial di Desa Padaawas dalam konsep *asset-based community development perspective* merupakan bentuk modal *tangible* dan *intangible* (Mathie & Cunningham, 2008) yang dapat menunjang aktifitas serta meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah Desa Padaawas.

## 5. Kesimpulan

Terdapat banyak potensi di Desa Padaawas, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Potensi yang bersifat sosial kemasyarakatan; 2. Potensi yang melekat pada sumber daya manusia - direpresentasikan oleh keberadaan para aktor sebagai stakeholder di wilayah Desa Padaawas -; 3. Potensi yang dimiliki oleh warga masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa Padaawas; dan 4. Potensi Modal Keuangan/Finansial. Potensi yang bersifat sosial kemasyarakatan diantaranya adalah berupa jumlah penduduk, kondisi kesehatan, kondisi keagamaan, kondisi keamanan, kondisi pendidikan dan kondisi mata pencaharian. Sementara itu, potensi stakeholder-stakeholder yang dimiliki Desa Padaawas diantaranya adalah adanya Lembaga-lembaga pemerintahan desa, kader PKK, Bumdes, Bapeling, Gapoktan, DKM, Karang taruna, UMKM, PT. Star Energy dan PT. Indonesia Power. Sementara itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki dan di kelola warga masyarakat ada di bidang pertanian dan perkebunan, peternakan dan wisata yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu wisata berbasis sumber mata air panas dan wisata berbasis hutan (keragaman hayati). Potensi keuangan/finansial Desa Padaawas diantaranya adalah lembaga simpan pinjam baik itu berupa bank konvensional, bank keliling, koperasi, rentenir dan tengkulak. Sayangnya, banyak warga yang memilih menggunakan jasa tengkulak dan rentenir karena strategi mereka yang lebih proaktif dan mudah persyaratan meskipun bunga yang ditetapkan tinggi, padahal BUMDES menurut peraturannya dibentuk untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (Ulumudin, dkk, 2019).

## 6. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada mengenai potensi-potensi kesejahteraan sosial Desa Padaawas, diperlukan peningkatan kemampuan para anggota Bumdes terkait lembaga finansial melalui pelatihan manajemen keuangan di bidang perbankan atau koperasi. Rekomendasi berikutnya adalah pemberian bantuan modal berupa modal dasar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menguatkan bumdes sebagai lembaga finansial khususnya di bidang perkebunan tertentu agar dapat bersaing dengan pihak bank keliling dan tengkulak. Penguatan Bumdes ini bertujuan agar lebih menarik dan membangun kepercayaan masyarakat.

*Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso*

*Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut:  
Asset-Based Community Development Perspective*

Bagi kementerian sosial sebagai institusi di tingkat pusat yang bersentuhan langsung dengan kelembagaan kesejahteraan sosial hingga tingkat desa, sekiranya dapat meningkatkan peran serta berbagai kelembagaan kesejahteraan sosial seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yaitu berupa: Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar dapat hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berperan aktif dalam menangani pemenuhan kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa dengan melibatkan dunia usaha sebagai organisasi beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai wujud dari tanggung jawab sosial.

**Ucapan terimakasih:** Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Padaawas yang telah memberikan data-data penelitian. Terima kasih juga kepada pihak PT. Indonesia Power yang telah membiayai penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- Center for Development Services & Coady International Institute. (2005). *Asset-Based Development: Success Stories from Egyptian Communities: A Manual for Practitioners*. Cairo: Center for Development Services.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Green, G. P. (2010). Community Assets: Building the Capacity for Development. In G. P. Green, & A. Goetting, *Mobilizing Communities: Asset Building as a Community Development Strategy* (pp. 1-13). Philadelphia: Temple University Press.
- Hadi, F. (2013). Membangun Barbasis Aset: Upaya Membangkitkan Warga Desa yang Berdaya dan Aktif Membangun Kemandiriannya. *Jurnal Mandatory*, 10(1), 107-122.
- Kaur, M. (2017). Social Change: The Phenomenon of Transformation. *International Research Journal of Management Sociology and Humanity*, 8(10), 46-50.
- Khairul, Mulyati, & Darrini. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa (Studi di Desa Mandalamekar dan Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162-171.
- Klee, D., Mordey, M., Phua, S., & Russell, C. (2014). Asset-based community development - enriching the lives of older citizens. *WORKING WITH OLDER PEOPLE*, 18(3), 111-119.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*, IV(02), 135-142.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2008). *From clients to citizens; communities changing the course of their own development*. Warwickshire: Practical Action Publishing.

- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambu Kaliurang. *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259-278.
- Nel, H. (2015). An integration of the livelihoods and asset-based community development approaches: A South African case study. *Development Southern Africa*, 32(4), 511-525. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/0376835X.2015.1039706>
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2009). A Framework for Community and Economic Development. In R. Phillips, & R. H. Pittman, *An Introduction to Community Development* (pp. 3-19). Oxon: Routledge.
- Purwastuty, I. (2018). Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-16.
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 207-215.
- Saputra, T., Aguswan, Syofian, & Harapan Tua, F. S. (2020). Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkulu. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(02), 147-158.
- Sen, A. (2000). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sholehah, I. (2017). Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 183-205.
- Ulumudin, A., Fauzan, H. S., & Rismayanti, H. H. (2019). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmu Administrasi*, XVI(2), 228-242.
- Wibowo, B., Raharjo, S. T., Supriyadi, D., Humaedi, S., Hermawan, H., Mulyana, N., . . . Santoso, M. B. (2018). *Pemetaan Sosial Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*. Sumedang: Niaga Muda.
- Winther, T. (2015). What Lies Within? An Exploration of Asset Based Community Development (ABCD). *Thesis*. Auckland, New Zealand: Unitec Institute of Technology.
- Wood, S. K. (2008). Asset-Based Community Development: A Case Study. *Thesis*. Canada: Wilfrid Laurier University.

